

## V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

### 5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

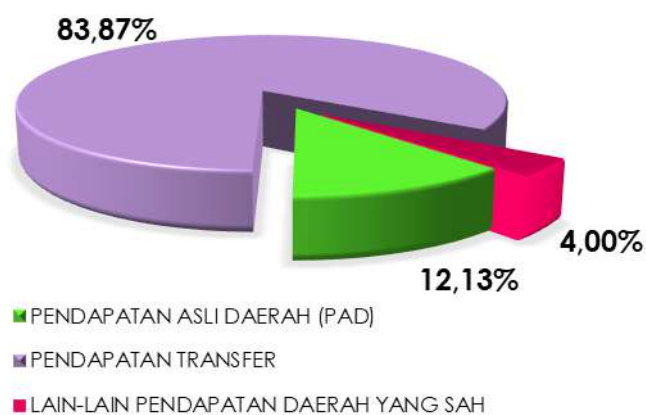
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Pendapatan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	380.346.200.398,00	331.059.847.831,25	87,04	274.112.885.092,99
Pendapatan Transfer	2.265.621.241.368,00	2.289.284.360.966,00	101,04	1.972.976.082.091,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	39.787.034.802,00	109.315.906.788,00	274,75	31.210.802.114,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.685.754.476.568,00</b>	<b>2.729.660.115.585,25</b>	<b>101,63</b>	<b>2.278.299.769.297,99</b>

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.

**Diagram Anggaran dan Realisasi Pendapatan**



Rincian saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 1*.



### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	181.460.899.220,00	182.328.157.865,50	100,48	147.240.146.529,07
Pendapatan Retribusi Daerah	26.922.702.017,00	31.058.523.271,00	115,36	20.820.541.076,85
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.741.149.852,00	12.741.149.852,00	100,00	11.824.141.617,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	159.221.449.309,00	104.932.016.842,75	65,90	94.228.055.870,07
<b>Jumlah</b>	<b>380.346.200.398,00</b>	<b>331.059.847.831,25</b>	<b>87,04</b>	<b>274.112.885.092,99</b>

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LRA untuk pos pendapatan pajak daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo pendapatan pajak daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	29.926.836.083,87	261.843.932,00	0,87	31.017.043.511,84
Pajak Restoran	26.557.660.472,48	673.886.229,91	2,54	26.121.087.581,04
Pajak Hiburan	639.694.120,00	3.806.500,00	0,60	8.813.025.350,00
Pajak Reklame	2.631.245.928,00	1.947.094.265,00	74,00	2.474.103.456,00
Pajak Penerangan Jalan	23.073.604.102,00	0,00	0,00	27.939.630.764,00
Pajak Parkir	1.186.539.192,00	176.927.675,00	14,91	2.466.398.329,00
Pajak Air Tanah	10.775.373.200,00	487.944.413,00	4,53	327.308.567,00
Pajak Sarang Burung Walet	8.704.315.763,00	4.350.000,00	0,05	18.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.278.803,00	3.549.329.804,00	202,79	1.348.208.186,58
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.110.079.000,00	16.013.894.795,00	66,42	17.149.230.084,61
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.000.000.000,00	35.702.051.083,00	123,11	29.566.110.699,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.737.466.720,52	40.558.956.651,69	601,99	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	7.548.879.315,00	31.282.324.551,00	414,40	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	5.441.341.044,13	45.255.519.994,40	831,70	0,00
PBJT-Jasa Parkir	226.766.596,00	1.449.087.453,00	639,02	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.150.818.880,00	4.961.140.518,50	157,46	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>181.460.899.220,00</b>	<b>182.328.157.865,50</b>	<b>100,48</b>	<b>147.240.146.529,07</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut.

1. Pendapatan Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp30.755.199.579,84 atau 99,16% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp31.017.043.511,84. Hal ini disebabkan adanya



perubahan nomenklatur dari Pajak Hotel menjadi PBJT Atas Jasa Perhotelan, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan pada tanggal 19 Januari 2024. Namun, karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September 2024. Atas kondisi tersebut telah dilakukan reklasifikasi penerimaan Pajak Hotel setelah tanggal 19 Januari 2024 dicatat sebagai PBJT Jasa Perhotelan;

2. Pendapatan Pajak Restoran mengalami penurunan sebesar Rp25.447.201.351,13 atau 97,42% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp26.121.087.581,04. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Restoran menjadi PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Namun, karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September 2024. Atas kondisi tersebut telah dilakukan reklasifikasi penerimaan Pajak Restoran setelah tanggal 19 Januari 2024 dicatat sebagai PBJT Makanan dan/atau Minuman;
3. Pendapatan Pajak Hiburan mengalami penurunan sebesar Rp8.809.218.850,00 atau 99,96% dibandingkan dengan Tahun 2023, sebesar Rp8.813.025.350,00 hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Hiburan menjadi PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Namun, karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September 2024. Atas kondisi tersebut telah dilakukan reklasifikasi penerimaan Pajak Hiburan setelah tanggal 19 Januari 2024 dicatat sebagai PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan;
4. Pendapatan Pajak Reklame mengalami penurunan sebesar Rp527.009.191,00 atau 21,30% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.474.103.456,00. Hal ini disebabkan jumlah objek pajak reklame Tahun 2024 menurun dan animo pemasangan reklame lebih rendah dibandingkan tahun 2023;
5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan sebesar Rp27.939.630.764,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp27.939.630.764,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT Atas Tenaga Listrik, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Namun, karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September Tahun 2024. Atas kondisi tersebut telah dilakukan reklasifikasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan setelah tanggal 19 Januari 2024 dicatat sebagai PBJT Tenaga Listrik;
6. Pendapatan Pajak Parkir mengalami penurunan sebesar Rp2.289.470.654,00 atau 92,83% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.466.398.329,00. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Parkir menjadi PBJT Atas Jasa Parkir, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Namun, karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September Tahun 2024. Atas kondisi tersebut telah dilakukan reklasifikasi penerimaan Pajak Parkir setelah tanggal 19 Januari 2024 dicatat sebagai PBJT Jasa Parkir;
7. Pendapatan Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp160.635.846,00 atau 49,08% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp327.308.567,00. Hal ini disebabkan oleh:



- Kinerja SATGAS PAD yang ditugaskan khusus untuk optimalisasi Pajak Air Tanah dengan menargetkan hotel-hotel dan industri yang ada di kabupaten Lombok Tengah. SATGAS melakukan sosialisasi dan merekomendasikan para pelaku usaha untuk mengurus izin air tanah dan memasang meteran air untuk mengukur debit air yang digunakan dan mempermudah penghitungan pajak air tanahnya;
  - Beberapa objek pajak sudah mulai memasang meter air untuk pembayaran pajak air tanah sehingga mulai melakukan pembayaran pajak air tanah di 2024.
8. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan sebesar Rp13.650.000,00 atau 75,83% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp18.000.000,00. Hal ini disebabkan:
- Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena penurunan produksi walet di tahun 2024;
  - Rendahnya kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak. Selain itu juga dari hasil penelusuran ke wajib pajak, para pengusaha sarang burung walet mengaku tidak ada walet yang bersarang di Gedung milik pengusaha.
9. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar Rp2.201.121.617,42 atau 163,26% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.348.208.186,58. Hal ini disebabkan oleh:
- Karena ada SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah sejak Tahun 2024 sehingga Bapenda dibantu dalam penagihan Pajak MBLB. adanya SKK ini mampu memperoleh realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.559.459.460,00;
  - Penambahan MBLB lebih banyak di Tahun 2024 disebabkan pembangunan fisik baik oleh pemerintah maupun masyarakat lebih banyak dibandingkan Tahun 2023.
10. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami penurunan sebesar Rp1.135.335.289,61 atau 6,62% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp17.149.230.084,61. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 untuk pertama kali Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan menjadi pemungut PBBP2. Penerapan kebijakan baru ini memerlukan adaptasi dan penyesuaian serta diberikan pemahaman lebih lanjut kepada Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk optimalnya penagihan PBBP2;
11. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kenaikan sebesar Rp6.135.940.384,00 atau 20,75% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp29.566.110.699,00. Hal ini disebabkan lebih banyak pergantian hak tanah dan bangunan di tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dan perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat di KEK Mandalika;
12. Pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman mengalami kenaikan sebesar Rp40.558.956.651,69 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur dari Pajak Restoran menjadi PBJT atas Pajak Makanan dan/atau Minuman, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan dari PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Restoran tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan 2024. Realisasi penerimaan dari PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman mencapai Rp40.558.956.651,69, sedangkan pendapatan dari Pajak Restoran sebesar Rp673.886.229,91. Jika diakumulasikan mencapai Rp41.232.842.881,60. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp15.111.755.300,56 atau 57,85%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya objek pajak baru dan intensifitas pendataan secara periodik dengan membentuk satgas dan evaluasi secara berkala. Selain itu melakukan uji petik dan pemeriksaan serta berkolaborasi dengan instansi terkait penagihan;



13. Pendapatan PBJT-Tenaga Listrik mengalami kenaikan sebesar Rp31.282.324.551,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur dari Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT Tenaga Listrik sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024.  
Realisasi penerimaan dari PBJT Atas Tenaga Listrik mencapai Rp31.282.324.551,00, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.342.693.787,00 atau 11,96%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan penggunaan listrik di Kabupaten Lombok Tengah dan kenaikan konsolidasi dengan PLN terkait sosialisasi pembayaran pajak;
14. Pendapatan PBJT-Jasa Perhotelan mengalami kenaikan sebesar Rp45.255.519.994,40 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur dari Pajak Hotel menjadi PBJT atas Jasa Perhotelan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan pada tanggal 19 Januari 2024.  
Akibat perubahan ini, pendapatan dari PBJT Atas Jasa Perhotelan dan Pajak Hotel tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan 2024. Realisasi penerimaan dari PBJT Jasa Perhotelan mencapai Rp45.255.519.994,40, sedangkan pendapatan dari Pajak Hotel sebesar Rp261.843.932,00. Jika diakumulasikan, total penerimaan dari sektor perhotelan pada 2024 mencapai Rp45.517.363.926,40. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.500.320.414,56 atau 46,75%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya objek pajak baru dan intensifitas pendataan secara periodik dengan membentuk satgas dan evaluasi secara berkala. Selain itu melakukan uji petik dan pemeriksaan serta berkolaborasi dengan instansi terkait penagihan;
15. Pendapatan PBJT atas Jasa Parkir mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.087.453,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur dari Pajak Parkir menjadi PBJT atas Jasa Parkir sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024.  
Akibat perubahan ini, pendapatan dari PBJT Atas Jasa Parkir dan Pajak Parkir tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan 2024. Realisasi Penerimaan BPJT atas Jasa Parkir sebesar Rp1.449.087.453,00 sedangkan Pendapatan Pajak Parkir 2024 sebesar Rp176.927.675,00,00. Jika diakumulasikan total penerimaan sebesar Rp1.626.015.128,00. Jika dibandingkan dengan Pajak Parkir tahun 2023 sebesar Rp2.466.398.329,00 mengalami penurunan sebesar Rp840.383.201,00 atau 34,07%. Hal ini disebabkan adanya perubahan tarif pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut, tarif Pajak Parkir yang sebelumnya sebesar 30% mengalami penurunan menjadi 10%; dan
16. Pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp4.961.140.518,50 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur dari Pajak Hiburan menjadi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan pada tanggal 19 Januari 2024.  
Akibat perubahan ini, pendapatan dari PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan Pajak Hiburan tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan 2024. Realisasi Penerimaan BPJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan 2024 sebesar Rp4.961.140.518,50 sedangkan Pendapatan Pajak Hiburan 2024 sebesar Rp3.806.500,00. Jika diakumulasikan total penerimaan sebesar Rp4.964.947.018,50. Jika dibandingkan dengan Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp8.813.025.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.848.078.331,50 atau 43,66%. Hal ini disebabkan adanya perubahan tarif pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan



Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut, tarif Pajak Hiburan yang sebelumnya sebesar 30% mengalami penurunan menjadi 10%.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>20.391.120.117,00</b>	<b>23.439.213.656,00</b>	<b>114,95</b>	<b>14.538.825.474,85</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.523.503.792,00	21.230.856.048,00	169,53	10.666.407.760,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	431.945.000,00	109,61	323.869.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00	251.980.000,00	37,55	208.676.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar	6.802.442.325,00	1.494.343.675,00	21,97	1.502.676.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	411.027.744,85
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	7.690.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	30.088.933,00	0,00	1.418.478.270,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.739.385.400,00</b>	<b>4.135.366.500,00</b>	<b>110,59</b>	<b>3.729.315.876,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.428.581.000,00	3.101.429.500,00	127,71	2.089.534.626,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	572.424.000,00	688.364.000,00	120,25	1.225.237.750,00
Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	19.448.000,00	30,27	19.850.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	237.600.000,00	156.600.000,00	65,91	92.063.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00	169.525.000,00	45,87	267.630.500,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.792.196.500,00</b>	<b>3.483.943.115,00</b>	<b>124,77</b>	<b>2.552.399.726,00</b>
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	166.750.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.244.312.500,00	2.626.981.115,00	117,05	2.385.399.726,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	547.884.000,00	856.962.000,00	156,41	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.922.702.017,00</b>	<b>31.058.523.271,00</b>	<b>115,36</b>	<b>20.820.541.076,85</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp10.564.448.288,00 atau 99,04% dari tahun 2023 sebesar Rp10.666.407.760,00 hal ini disebabkan oleh:

a) Terjadinya peningkatan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari sisi klaim non kapitasi karena Program *Universal Health Coverage* (UHC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui anggaran Dinas Kesehatan. Per 31



- Desember 2024 masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sudah dipremikan ke peserta JKN sejumlah 1.104.599 atau 99,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah;
- b) Adanya peningkatan tarif pelayanan di Puskesmas sesuai PERDA Nomor 1 Tahun 2024, sehingga tarif pendapatan dan retribusi pelayanan kesehatan meningkat juga;
  - c) Adanya penambahan Rumah Sakit mitra pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah yang secara langsung menjadi tambahan penghasilan bagi Dinas Kesehatan;
  - d) Adanya pendapatan operasional tahun 2023 yang bersumber dari pelayanan kesehatan tahun 2023 baru dibayar oleh penjamin pada 2024 yaitu Pasien Jampersal yang merupakan pasien yang dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme klaim dan Pasien Bansos yang merupakan pasien dengan penjamin pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui PPKD pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga Bidang Kesehatan atas Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota sebesar Rp6.271.983.769,00; dan
  - e) Terdapat peningkatan pendapatan jasa layanan pasien umum pada Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan Kesehatan kepada pasien yang tidak memiliki jaminan Kesehatan dari Lembaga penjamin manapun.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp108.076.000,00 atau 33,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp323.869.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah penduduk di Lombok Tengah sehingga mengakibatkan kenaikan volume sampah yang dihasilkan setiap hari, Atas kondisi tersebut diperlukan lebih banyak layanan pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah.
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan sebesar Rp43.303.300,00 atau 20,75% dari tahun sebelumnya sebesar Rp208.676.700,00. Hal ini disebabkan oleh:
    - a) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan kepada para juru parkir secara berkala di semua kecamatan;
    - b) Jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik untuk kontribusi dari ritel modern Alfamart dan Indomaret; dan
    - c) Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar mengalami penurunan sebesar Rp8.332.325,00 atau sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.502.676.000,00. Hal ini disebabkan karena penurunan omset pedagang sehingga pedagang tidak bisa membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan akibatnya banyak pedagang yang tidak berjualan di pasar.
  - 5) Pada 2024 sudah tidak terdapat lagi pungutan terhadap Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena Retribusi pengujian Kendaraan bermotor (KIR) telah dihapus dan digratiskan sejak 1 Januari 2024. Perubahan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan yang wajib uji KIR, seperti bus, truk, dan mobil penumpang umum. Penghapusan retribusi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
  - 6) Pada 2024 sudah tidak terdapat Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus karena dasar pemungutannya telah dihapus dari PERDA No 1 Tahun 2024.



7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan sebesar Rp1.388.389.337,00 atau 97,88% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.418.478.270,00. Pada 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lagi memungut Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pendapatan yang diperoleh pada 2024 merupakan pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya.

b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.011.894.874,00 atau 48,43% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.089.534.626,00, hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya pembayaran atas piutang pendapatan sewa tanah Hotel Raja oleh PT TP pada 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 2 Januari 2024;
- b) Adanya pembayaran sewa tanah dan bangunan BBI Pemepek untuk 5 tahun sebesar Rp7.700.000,00;
- c) Terdapat pembayaran dari Sewa Rusunawa sebesar Rp19.620.000,00; dan
- d) Terdapat 6 objek Retribusi pada 2024, yang MOU nya diperbaharui dimana terdapat perubahan kenaikan tarif sehingga terdapat penambahan retribusi sebesar Rp38.700.000,00.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami penurunan sebesar Rp536.873.750,00 atau 43,82% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.225.237.750,00, hal ini disebabkan karena penurunan omset pedagang dampak dari meningkatnya transaksi penjualan secara *online shop*.

Terdapat pendapatan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir pertokoan dan tempat kegiatan usaha lain sebesar Rp975.000,00 yang salah dalam pengidentifikasian kode akun saat pengentrian pada SIPD sehingga dilakukan reklasifikasi menjadi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

3) Pada 2024 tidak terdapat Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan di Teluk Awang karena Semakin banyaknya Pihak swasta yang lebih menguasai pasar pembenihan ikan disekitar Kabupaten Lombok Tengah.

4) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami penurunan sebesar Rp402.000,00 atau 2,03% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp19.850.000,00. Hal ini disebabkan oleh permintaan hewan ternak menurun, yang pada akhirnya menurunkan retribusi yang diterima.

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga mengalami kenaikan sebesar Rp64.537.000,00 atau 70,10% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp92.063.000,00. Hal ini sebabkan oleh adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pada beberapa objek tempat rekreasi dan olah raga sehingga kunjungan masyarakat meningkat.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami penurunan sebesar Rp98.105.500,00 atau 36,66% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp267.630.500,00. Semakin banyaknya pihak swasta yang lebih menguasai pasar pembenihan ikan disekitar Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdapat aktivitas ditempat pelelangan ikan (TPI Teluk Awang), selain itu adanya wabah penyakit baik virus maupun bakteri sehingga mempengaruhi target panen.



c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Pada tahun 2024 sudah tidak terdapat Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena dasar pemungutannya telah dihapus dari PERDA No 1 Tahun 2024.
  - 2) Pada tahun 2024 sudah tidak terdapat Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum karena dasar pemungutannya telah dihapus dari PERDA No 1 Tahun 2024.
  - 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengalami kenaikan sebesar Rp241.581.389,00 atau 10,13% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.385.399.726,00. Hal ini disebabkan adanya perkembangan pariwisata dan pendukung untuk sirkuit Mandalika sehingga berdampak pada meningkatnya perizinan bangunan baru.
  - 4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengalami kenaikan sebesar Rp856.962.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan karena penarikan Retribusi dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ini baru bisa dilaksanakan pada 2024 yang mengacu pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sedangkan pada tahun sebelumnya belum bisa dilakukan penarikan retribusi, karena belum memiliki payung hukum yang kuat.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah diatas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang merupakan pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.741.149.852,00	12.741.149.852,00	100,00	11.824.141.617,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.824.141.617,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberian/pembagian deviden dan kontribusi terhadap laba bersih BUMD; dan
  - b. Pada tahun 2024 terdapat penerimaan laba atas penyertaan modal pada Perumdam TIARA Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    - 1) Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 31. Rincian Realisasi Bagian Laba atas penyertaan modal pada  
Perusahaan Milik Daerah/BUMD**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Perumdam TIARA Loteng	123.433.505,00	123.433.505,00	100,00	0,00
PT Bank NTB Syariah	11.301.134.268,00	11.301.134.268,00	100,00	10.585.023.452,00
PD BPR NTB	1.268.260.101,00	1.268.260.101,00	100,00	1.198.051.443,00
Jamkrida	48.321.978,00	48.321.978,00	100,00	41.066.722,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.824.141.617,00</b>

- a) Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal dari:
- (1) Bagian Laba Bersih PDAM Tirta Ardhia Rinjani Tahun Buku 2023 sebesar Rp123.433.505,00 diakui berdasarkan Laporan Keuangan *audited* PDAM Tahun Buku 2023;
  - (2) Pendapatan bagian laba PT Bank NTB Syariah sebesar Rp11.301.134.268,00 diakui berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank NTB Syariah Tanggal 26 Maret 2024 dalam bentuk Akta Notaris;
  - (3) Pendapatan bagian laba PT BPR NTB sebesar Rp1.268.260.101,00 diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) tanggal 16 Mei 2024; dan
  - (4) Pendapatan bagian laba PT Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp48.321.978,00 diakui berdasarkan RUPS dengan akta no No 1 Tanggal 4 April 2024 Tahun Buku 2023 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan Terbatas PT Jamkrida NTB Bersaing.

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Giro	1.250.000.000,00	1.791.092.003,99	143,29	1.367.792.747,67
Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	2.244.946.521,53	118,16	2.722.228.822,26
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.817.049.169,51	0,00	5.898.433.802,50
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	56.600.533.061,00	758.893.603,44	1,34	1.826.464.667,86
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	268.527.214,34
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	795.163.493,55	0,00	849.246.680,54
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	55.276.447,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	906.228.284,37	0,00	330.683.550,00
Pendapatan BLUD	99.470.916.248,00	96.618.643.766,36	97,13	69.367.346.118,63
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	11.542.055.819,27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	159.221.449.309,00	104.932.016.842,75	65,90	94.228.055.870,07

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Pendapatan Jasa Giro mengalami kenaikan sebesar Rp423.299.256,32 atau 30,95% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.367.792.747,67. Hal ini disebabkan oleh frekuensi atau volume transaksi perbankan meningkat, baik itu transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya yang melibatkan rekening giro, maka pendapatan dari biaya-biaya transaksi juga akan meningkat. Pendapatan Jasa Giro lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 33. Tabel Rincian Pendapatan Jasa Giro**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Realisasi	Realisasi
<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>1.411.548.641,75</b>	<b>1.014.358.791,04</b>
003.21.00706.00-0 ( Bank NTB syariah)	1.410.036.258,21	1.012.859.616,11
161-00-0126379-2 ( Bank Mandiri )	1.512.383,54	1.499.174,93
<b>Kas Giro Pada Kas di Bendahara</b>	<b>320.413.885,00</b>	<b>289.373.421,18</b>
Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran	245.901.584,00	221.742.604,18
Rekening kas Dana BOK PKM	74.512.301,00	67.630.817,00
<b>Jasa Giro pada Rekening Dana BOS</b>	<b>59.129.477,24</b>	<b>64.060.535,45</b>
Bagi Hasil Giro rekening Dana Bos	59.129.477,24	64.060.535,45
<b>Jumlah</b>	<b>1.791.092.003,99</b>	<b>1.367.792.747,67</b>

- 1) Pendapatan Bunga mengalami penurunan sebesar Rp477.282.300,73 atau 17,53% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.722.228.822,26. 2024 terdapat Pendapatan transfer TDF remunerasi atas imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemerintah daerah pada fasilitas TDF sebesar Rp371.011.313,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.701.295.493,00. Persentase remunerasi ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp4.081.384.632,99 atau 69,19% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp5.898.433.802,50. Hal ini disebabkan:
  - a) Jumlah kasus penyalahgunaan kerugian daerah yang ditemukan berkurang karena peningkatan kepatuhan maupun efektivitas pengawasan;
  - b) Pemerintah Daerah meningkatkan sistem pengendalian internal, pengawasan, dan audit sehingga potensi kerugian daerah dapat dicegah; dan
  - c) Terdapat beberapa tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang belum menjadi ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sehingga terhadap nilai setoran tersebut direklasifikasi menjadi Pendapatan Pengembalian Kelebihan Belanja.
- b. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mengalami penurunan sebesar Rp1.067.571.064,42 atau 58,45% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.826.464.667,86. Hal ini disebabkan karena beberapa penerimaan yang masuk ke kas daerah sudah dapat ditelusuri jenis pendapatannya.



- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp54.083.186,99 atau 6,37% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp849.246.680,54. Hal ini disebabkan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu sudah mulai meningkat dan sistem pengelolaan pajak daerah 2024 lebih optimal sehingga pengenaan atas denda pajak berkurang.
- d. Pendapatan Denda Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp55.276.447,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp55.276.447,00 Pada 2024 tidak terdapat Pendapatan dari denda Retribusi hal ini disebabkan karena wajib retribusi memiliki kesadaran penuh untuk membayar retribusi secara tepat waktu sehingga tidak terdapat denda atas keterlambatan.
- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja mengalami peningkatan sebesar Rp575.544.734,37 atau 174,05% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp330.683.550,00. Hal ini disebabkan oleh faktor dalam konteks kebijakan dan kondisi yang ada, selain itu terdapat reklasifikasi pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Non Bendahara ke Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja atas tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan yang belum menjadi ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp906.228.284,37. Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Belanja lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 34. Tabel Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja**

No	Uraian	Realisasi
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>151.850.067,00</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.850.067,00
2	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>12.151.438,00</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.151.438,00
3	<b>Dinas PU dan Penataan Ruang</b>	<b>9,00</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	9,00
4	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>742.226.770,37</b>
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	486.594.068,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.530.947,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	180.733.940,93
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	3.065.072,60
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.600.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Alat Kedokteran Umum	1.631.286,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	28.371.455,84
	<b>Jumlah</b>	<b>906.228.284,37</b>

- f. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp27.251.297.647,73 atau 39,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp69.367.346.118,63. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum yang memiliki jaminan Kesehatan dari lembaga penjamin seperti BPJS Kesehatan dan Jasaraharja.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pendapatan layanan Pasien Umum pada Puskesmas maupun Pendapatan BLUD yang bersumber dari layanan pasien umum pada RSUD yang tidak

memiliki jaminan Kesehatan dari Lembaga penjamin manapun yang sebelumnya terdapat pada akun Lain-Lain PAD dialihkan menjadi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan layanan yang diberikan oleh BLUD, mengacu pada kebijakan yang diatur dalam UU HKPD dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (KUPDRD).

Pendapatan BLUD 2024 sebesar Rp96.618.643.766,36 merupakan Pendapatan BLUD pada Puskesmas sebesar Rp17.047.870.688,50 dan Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp79.570.773.077,86.

Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Hasil Kerja Sama dengan pihak lain berupa pemanfaatan aset daerah terdiri dari:

- 1) RSUD Praya melakukan Kerjasama dengan PT MTP untuk pengelolaan lahan parkir dalam jangka waktu Kerjasama selama 5 tahun sampai dengan tahun 2027 dengan ketentuan bahwa pengelola parkir mempunyai kewajiban membayar pembagian laba sebesar Rp14.000.000,00 per bulan kepada RSUD Praya;
- 2) RSUD Praya bekerjasama sewa Gedung Koperasi dengan pengurus koperasi karyawan dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 per bulan; dan
- 3) Sewa bangunan ruang ATM bekerjasama dengan PT NTBS dan PT BM sebesar Rp24.300.000,00 selama 1 tahun.

Selain itu terdapat Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Giro sebesar Rp15.940.728,91.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.136.210.331.604,00	2.165.107.290.050,00	101,35	1.853.774.800.135,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.410.909.764,00	124.177.070.916,00	95,96	119.201.281.956,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.265.621.241.368,00</b>	<b>2.289.284.360.966,00</b>	<b>101,04</b>	<b>1.972.976.082.091,00</b>

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	1.927.479.843.604,00	1.956.376.802.050,00	101,50	1.681.147.943.135,00
Dana Desa	185.021.712.000,00	185.021.712.000,00	100,00	166.892.819.000,00
Insentif Fiskal	23.708.776.000,00	23.708.776.000,00	100,00	5.734.038.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.136.210.331.604,00</b>	<b>2.165.107.290.050,00</b>	<b>101,35</b>	<b>1.853.774.800.135,00</b>



Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Saldo Dana Perimbangan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	99.153.212.000,00	132.877.850.000,00	134,01	117.944.860.668,00
Dana Alokasi Umum	1.248.585.571.900,00	1.248.441.289.000,00	99,99	1.047.472.659.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	206.665.442.000,00	202.489.811.306,00	97,98	149.737.378.651,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	373.075.617.704,00	372.567.851.744,00	99,86	365.993.044.816,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.927.479.843.604,00</b>	<b>1.956.376.802.050,00</b>	<b>101,50</b>	<b>1.681.147.943.135,00</b>

Penjelasan:

- a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kebijakan perhitungan alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus-DAK Fisik maupun Dana Alokasi Khusus-DAK Non Fisik pada Tahun 2023 sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan besaran penetapan alokasi masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
- 2) Terdapat penyaluran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil tahun 2023 yang disalurkan pada 2024 yang bersumber dari penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF. Penyaluran tersebut berdasarkan surat dari kementerian Keuangan Nomor S-319/KPN.2301/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2023 secara non tunai melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Terdapat perbedaan pengakuan jumlah Dana Transfer Pusat antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp217.448.546.000,00 dimana perbedaan tersebut karena pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO. Penjelasan terkait perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 38. Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LRA dan LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>217.448.546.000,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>217.448.546.000,00</b>
Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Laporan Operasional	185.021.712.000,00
Pembayaran piutang Pendapatan Remunerasi TDF pada pemerintah pusat 2024	
:	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	505.973.000,00
DBH PPh Pasal 21	1.584.168.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	11.367.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	30.325.326.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>217.448.546.000,00</b>

- b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.052.743.000,00	1.558.716.000,00	148,06	3.378.721.317,00
DBH PPh Pasal 21	7.599.532.000,00	9.026.127.000,00	118,77	9.131.153.008,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	0,00	168.940.000,00	0,00	444.134.783,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	77.161.253.000,00	78.496.742.000,00	101,73	78.552.848.868,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Royalty	11.925.439.000,00	42.250.765.000,00	354,29	24.880.168.692,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	37.685.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	8.821.800,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.376.560.000,00	1.376.560.000,00	100,00	1.548.995.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.153.212.000,00</b>	<b>132.877.850.000,00</b>	<b>134,01</b>	<b>117.944.860.668,00</b>

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp132.877.850.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah;

- c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	1.008.659.488.900,00	1.008.515.206.000,00	99,99	981.565.317.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	28.956.609.000,00	28.956.609.000,00	100,00	63.507.342.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	108.198.288.000,00	108.198.288.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan	94.850.184.000,00	94.850.184.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penggunaannya Bidang Kesehatan				
DAU yang Ditentukan				
Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	5.521.002.000,00	5.521.002.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.248.585.571.900,00</b>	<b>1.248.441.289.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1.047.472.659.000,00</b>

Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp1.248.441.289.000,00, telah/tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah.

- d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – PAUD	3.683.557.000,00	3.657.503.650,00	99,29	998.100.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SD	29.003.917.000,00	28.745.809.347,00	99,11	10.529.463.351,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler – SMP	28.932.887.000,00	28.802.010.000,00	99,55	5.487.331.070,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	3.419.333.000,00	3.235.282.907,00	94,62	10.010.220.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.426.531.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	2.121.964.000,00	2.074.731.500,00	97,77	1.983.867.500,00
DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	12.227.438.730,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan -Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	29.940.716.000,00	29.536.294.000,00	98,65	4.107.600.000,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	2.066.400.000,00	2.054.848.775,00	99,44	1.875.626.440,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan	5.507.103.000,00	5.468.033.900,00	99,29	2.747.711.000,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	13.943.433.000,00	13.537.563.000,00	97,09	27.198.356.000,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	13.256.386.000,00	12.760.463.000,00	96,26	9.041.339.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	10.018.592.000,00	10.018.592.000,00	100,00	10.136.004.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	9.411.685.000,00	7.839.024.000,00	83,29	0,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan	2.359.130.000,00	2.344.845.000,00	99,39	703.430.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hidup				
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	53.000.339.000,00	52.414.810.227,00	98,90	43.601.041.470,00
DAK Fisik - Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.646.099.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>206.665.442.000,00</b>	<b>202.489.811.306,00</b>	<b>97,98</b>	<b>149.720.158.651,00</b>

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp202.489.811.306,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah.

- e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	116.103.800.000,00	116.036.717.040,00	99,94	115.662.855.816,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	3.605.000.000,00	3.605.000.000,00	100,00	3.630.000.000,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	165.611.536.000,00	165.611.536.000,00	100,00	147.935.056.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	6.566.750.000,00	6.566.750.000,00	100,00	5.952.250.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	25.864.800.000,00	25.779.531.000,00	99,67	27.199.620.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	7.121.000.000,00	6.765.586.000,00	95,01	7.882.011.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	12.182.789.000,00	12.182.789.000,00	100,00	11.061.400.423,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	585.623.577,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	18.442.861.704,00	18.442.861.704,00	100,00	28.318.210.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	9.655.535.000,00	9.655.535.000,00	100,00	9.865.702.000,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	612.881.000,00	612.881.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.449.970.000,00	1.449.970.000,00	100,00	1.409.254.100,00
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	417.035.000,00	417.035.000,00	100,00	406.900.000,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	342.000.000,00	342.000.000,00	100,00	375.000.000,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.126.900.000,00	3.126.900.000,00	100,00	1.268.095.000,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.972.760.000,00	100,00	4.000.000.000,00
DAK Non Fisik - PK2UMK	0,00	0,00	0,00	458.286.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>373.075.617.704,00</b>	<b>372.567.851.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.010.264.816,00</b>

Penjelasan:

- 1) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp372.567.851.744,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah;



2. Dana Desa yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp185.021.712.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan No 352 2024 Tentang Rincian Insentif setiap Desa Tahun 2024; dan
3. Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp23.708.776.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah.

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	129.410.909.764,00	124.177.070.916,00	95,96	115.616.707.956,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	3.584.574.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>129.410.909.764,00</b>	<b>124.177.070.916,00</b>	<b>95,96</b>	<b>119.201.281.956,00</b>

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.947.811.378,00	21.253.972.468,00	96,84	18.418.274.550,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.796.611.913,00	26.805.188.548,00	122,98	20.479.859.200,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.154.268.357,00	31.146.940.872,00	88,60	33.753.178.884,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	90.507.979,00	85.826.522,00	94,83	88.500.318,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.421.710.137,00	44.885.142.506,00	89,02	42.876.895.004,00
<b>Jumlah</b>	<b>129.410.909.764,00</b>	<b>124.177.070.916,00</b>	<b>95,96</b>	<b>115.616.707.956,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-184 2024 alokasi Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sebesar Rp116.502.699.351,00 dan Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah 2024 sebesar Rp62.490.227.494,00; dan
  - b. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 yang dibayarkan 2024 lebih besar dari Piutang Pendapatan Bagi Hasil tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023. Sehingga realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran meningkat.
2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	3.584.574.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.574.000,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi terhadap bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

### 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	302.000.000,00	266.910.500,00	88,34	700.863.693,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.485.034.802,00	109.048.996.288,00	276,18	30.509.938.421,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.787.034.802,00</b>	<b>109.315.906.788,00</b>	<b>274,75</b>	<b>31.210.802.114,00</b>

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	53.025.943,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	302.000.000,00	266.910.500,00	88,38	647.837.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>266.910.500,00</b>	<b>88,38</b>	<b>700.863.693,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Pada 2024 tidak terdapat realisasi atas Hibah Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP-IFAD)* karena program tersebut telah berahir pada tahun 2023; dan
  - b. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis merupakan sumbangan atas rekom ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp237.910.500,00 dan Kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp29.000.000,00.

#### 5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dan



Tahun 2023 yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	39.485.034.802,00	34.759.393.827,00	88,03	30.509.938.421,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	0,00	74.289.602.461,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.485.034.802,00</b>	<b>109.048.996.288,00</b>	<b>276,18</b>	<b>30.509.938.421,00</b>

Penjelasan:

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami peningkatan sebesar Rp4.249.455.406,00 atau 13,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30.509.938.421,00 diuraikan diantaranya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan jumlah layanan meningkat. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 49. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas**

Uraian	SP2B PENDAPATAN	
	Tahun 2024	Tahun 2023
Puskesmas Batunyal	1.350.413.713,00	1.423.234.385,00
Puskesmas Kopang	1.863.126.702,00	1.721.362.473,00
Puskesmas Mantang	1.921.814.642,00	1.570.252.758,00
Puskesmas Sengkol	2.439.366.303,00	2.343.323.034,00
Puskesmas Muncan	1.545.006.402,00	1.438.210.982,00
Puskesmas Pengadang	1.969.951.135,00	1.995.876.577,00
Puskesmas Penujak	1.366.942.261,00	1.372.381.048,00
Puskesmas Kuta	1.619.622.446,00	1.369.855.655,00
Puskesmas Mangkung	1.627.013.693,00	1.290.868.436,00
Puskesmas Teruwai	921.704.183,00	901.823.690,00
Puskesmas Mujur	1.617.116.983,00	1.543.937.471,00
Puskesmas Bonjeruk	1.485.320.366,00	1.205.856.925,00
Puskesmas Bagu	1.934.707.914,00	1.683.835.062,00
Puskesmas Ganti	1.210.767.255,00	885.942.032,00
Puskesmas Darek	1.826.393.594,00	1.626.185.479,00
Puskesmas Ubung	1.983.002.451,00	1.636.541.194,00
Puskesmas Teratak	1.608.045.779,00	1.225.732.957,00
Puskesmas Pringgarata	1.835.630.447,00	1.423.133.148,00
Puskesmas Langko	1.418.076.390,00	1.262.514.465,00
Puskesmas Batu Jangkih	1.069.643.360,00	843.474.835,00
Puskesmas Batujai	704.727.219,00	575.540.975,00
Puskesmas Wajageseng	646.334.520,00	548.700.680,00
Puskesmas Tanak Beak	794.666.069,00	621.354.160,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.759.393.827,00</b>	<b>30.509.938.421,00</b>

2. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mengalami peningkatan sebesar Rp74.289.602.461,00 dibandingkan dengan tahun 2023.

Pada Tanggal 19 Februari 2024 terdapat pelimpahan bagi hasil laba dari PT AMNT ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp16.143.889.520,00, yang merupakan Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT AMNT untuk Tahun Buku 2020 dan Tahun Buku 2021 sebesar



Rp15.488.053.333,33. Pengakuan Piutang ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat pembahasan teknis pembayaran tagihan keuntungan bersih Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri) dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan PT AMNT pada tanggal 13 Agustus Tahun 2023. Terdapat selisih nilai yang ditetapkan pada saat rekonsiliasi dengan nilai yang disetorkan sebesar Rp655.836.186,67. Hal ini disebabkan karena perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar pada saat pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah.

Pada Tanggal 25 Juni 2024 terdapat pelimpahan bagi hasil laba dari PT AMNT ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp40.456.643.541,00, yang merupakan Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT AMNT untuk Tahun Buku 2022 senilai \$2.470.333 atau setara dengan Rp38.139.471.187,00 dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp15.439,00. Pengakuan piutang atas pembagian laba bersih dari PT AMNT Tahun Buku 2022 didasarkan pada berita acara rekonsiliasi nomor 974/305A/BAPENDA/2024 tanggal 25 April 2024.

Pada tanggal 19 Desember 2024 PT AMNT melakukan pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah atas Bagi Hasil Laba Bersih Tahun Buku 2023 senilai Rp17.689.069.400,00 sehingga jumlah penerimaan dari Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT AMNT untuk 2024 sebesar Rp74.289.602.461,00.

### 5.1.2 BELANJA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2.044.506.252.611,78	1.978.538.947.668,32	96,77	1.683.457.039.797,23
Belanja Modal	303.638.167.904,22	283.920.793.925,66	93,51	236.112.590.581,00
Belanja Tidak Terduga	9.537.388.811,00	8.838.353.947,00	92,67	14.359.344.815,00
Belanja Transfer	346.370.182.924,00	346.298.032.584,00	99,98	327.262.013.855,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.704.051.992.251,00</b>	<b>2.617.596.128.124,98</b>	<b>96,80</b>	<b>2.261.190.989.048,23</b>

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 51. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.207.540.559.105,65	1.156.476.918.161,76	95,77	1.028.819.909.685,20
Belanja Barang dan Jasa	729.703.947.593,13	715.146.946.996,56	98,01	560.356.950.091,03
Belanja Bunga	11.500.000.000,00	11.302.707.488,00	98,28	12.111.886.019,00
Belanja Hibah	95.221.745.913,00	95.072.375.022,00	99,84	81.628.294.002,00
Belanja Bantuan Sosial	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	540.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.044.506.252.611,78</b>	<b>1.978.538.947.668,32</b>	<b>96,77</b>	<b>1.683.457.039.797,23</b>

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.



Rekapitulasi Belanja operasi, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 52. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>747.249.660.947,20</b>	<b>734.793.209.114,00</b>	<b>98,33</b>	<b>658.857.933.039,00</b>
Belanja Gaji Pokok ASN	558.839.759.447,40	555.623.383.693,00	99,42	491.911.903.261,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	56.607.029.387,00	55.435.105.024,00	97,93	49.152.088.834,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.288.747.520,00	5.934.487.495,00	94,37	6.853.162.715,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.476.979.747,50	34.013.916.514,00	98,66	28.924.567.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.646.514.941,00	12.869.074.000,00	94,30	11.793.427.200,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	32.687.718.312,00	31.940.260.280,00	97,71	30.141.080.660,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.085.995.632,00	938.089.394,00	86,38	1.544.754.342,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.635.958,30	7.776.116,00	32,90	6.943.799,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	38.989.483.233,00	33.566.410.514,00	86,09	34.517.664.452,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.151.144.056,00	1.116.176.520,00	96,96	1.037.309.258,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.452.652.713,00	3.348.529.564,00	96,98	2.975.031.518,00
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>115.400.075.300,00</b>	<b>112.907.215.219,00</b>	<b>97,84</b>	<b>104.739.028.587,00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	115.400.075.300,00	112.907.215.219,00	97,84	104.695.411.371,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	43.617.216,00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>261.273.226.300,00</b>	<b>244.890.528.535,56</b>	<b>93,73</b>	<b>187.001.713.748,80</b>
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.073.044.961,00	5.576.464.025,00	61,46	5.152.856.387,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.368.185.131,00	976.135.753,00	71,35	687.830.468,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	206.790.811.630,00	200.766.596.770,00	97,09	147.660.183.984,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.534.250.000,00	7.970.625.000,00	93,40	6.031.575.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	34.559.847.578,00	28.741.362.987,56	83,16	26.581.070.909,80
Belanja Honorarium	942.287.000,00	854.544.000,00	90,69	888.197.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>24.648.292.317,00</b>	<b>23.759.407.930,00</b>	<b>96,39</b>	<b>23.925.039.130,00</b>
Belanja Uang Representasi DPRD	1.233.289.721,00	1.112.580.000,00	90,21	1.114.260.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	146.323.510,00	119.443.800,00	81,63	119.025.900,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.915.440,00	140.494.800,00	80,32	140.567.220,00
Belanja Uang Paket DPRD	105.508.000,00	95.340.000,00	90,36	95.508.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.623.297.116,00	1.613.241.000,00	99,38	1.615.677.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	153.967.600,00	120.155.700,00	78,04	145.063.800,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	100,00	6.300.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.050.000.000,00	1.039.500.000,00	99,00	1.575.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.311.266,00	227.728.004,00	86,82	229.309.295,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.166.679.664,00	5.635.534.626,00	91,39	5.652.002.915,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.955.000.000,00	6.912.500.000,00	99,39	6.915.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.000.000,00	442.890.000,00	92,85	23.625.000,00
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>174.866.097,00</b>	<b>168.309.702,00</b>	<b>96,25</b>	<b>168.910.972,00</b>
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.900.000,00	54.600.000,00	99,45	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.648.000,00	7.644.000,00	99,95	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.360.000,00	98.280.000,00	99,92	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.500.000,00	7.531.680,00	88,61	7.531.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	282.215,00	253.286,00	89,75	854.556,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	806,00	736,00	91,32	736,00
Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.725.796,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>912.000.000,00</b>	<b>791.000.000,00</b>	<b>86,73</b>	<b>852.000.000,00</b>
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.000.000,00	231.000.000,00	74,04	252.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	93,33	600.000.000,00
<b>Belanja Pegawai BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.502.092.200,00</b>
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	18.502.092.200,00
<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>57.882.438.144,45</b>	<b>39.167.247.661,20</b>	<b>67,67</b>	<b>34.773.192.008,40</b>
Belanja Pegawai BLUD	57.882.438.144,45	39.167.247.661,20	67,67	34.773.192.008,40
<b>Jumlah</b>	<b>1.207.540.559.105,65</b>	<b>1.156.476.918.161,76</b>	<b>95,77</b>	<b>1.028.819.909.685,20</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.



- a. Tahun 2023 Belanja Guru Tidak Tetap (GTT) dicatat sebagi belanja Pegawai BOS, sedangkan pada 2024 disesuaikan dengan menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Belanja Jasa Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
  - b. Meningkatnya porsi pembayaran Jasa Pelayanan pada belanja pegawai BLUD RSUD yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai kontrak BLUD hasil dari perekrutan 2024;
  - c. Terdapat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD atas tahun 2023 yang dibayarkan pada 2024;
  - d. Berdasarkan PP no 14 2024 pembayaran Tambahan Penghasilan ASN (TPP) 14 untuk Tunjangan Hari Raya dan TPP 13 untuk bantuan pendidikan dibayarkan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 50%; dan
  - e. Terdapat kenaikan pendapatan pada puskesmas BLUD dari sisi kapitasi maupun non kapitasi sehingga Belanja Pegawai BLUD juga meningkat.
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 2*.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 53. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Barang</b>	<b>342.150.985.014,96</b>	<b>319.198.797.580,50</b>	<b>93,29</b>	<b>264.532.444.185,00</b>
Belanja Barang Pakai Habis	338.513.241.420,96	315.652.987.630,50	93,25	264.532.444.185,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.637.743.594,00	3.545.809.950,00	97,47	0,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>205.164.806.876,00</b>	<b>197.200.408.855,64</b>	<b>96,12</b>	<b>150.003.516.279,00</b>
Belanja Jasa Kantor	92.530.189.111,00	86.915.330.688,64	93,93	81.323.617.604,00
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	91.583.781.281,00	91.281.377.121,00	99,67	49.295.416.763,00
Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.312.019.034,00	3.205.832.068,00	96,79	4.391.418.444,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.261.183.860,00	1.994.815.076,00	88,22	2.385.483.813,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	31.287.589,00	31.271.164,00	99,95	90.722.678,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.743.813.533,00	2.443.832.600,00	89,07	695.675.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	382.000.000,00	346.967.180,00	90,83	731.939.407,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.290.000,00	25.290.000,00	100,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.289.242.468,00	10.949.692.958,00	89,10	11.084.241.670,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.251.651.819,00</b>	<b>5.067.068.633,83</b>	<b>96,49</b>	<b>6.240.869.830,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.039.776.100,00	2.915.280.898,00	95,90	2.351.478.400,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.382.102.010,00	1.375.474.459,83	99,52	1.258.208.460,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	829.773.709,00	776.313.276,00	93,56	2.631.182.970,00
<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>32.659.604.436,00</b>	<b>29.717.328.031,00</b>	<b>90,99</b>	<b>21.267.079.884,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.659.604.436,00	29.717.328.031,00	90,99	21.267.079.884,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan</b>	<b>25.443.381.812,00</b>	<b>25.260.797.478,00</b>	<b>99,28</b>	<b>6.102.097.240,00</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>				
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.382.331.812,00	25.199.750.078,00	99,28	5.952.247.240,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.050.000,00	61.047.400,00	100,00	149.850.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>77.441.398.715,00</b>	<b>78.134.638.811,72</b>	<b>100,90</b>	<b>62.015.292.686,00</b>
Belanja Barang dan Jasa BOS	77.441.398.715,00	78.134.638.811,72	100,90	62.015.292.686,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>41.592.118.920,17</b>	<b>60.567.907.605,87</b>	<b>145,62</b>	<b>50.195.649.987,03</b>
Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.592.118.920,17	60.567.907.605,87	145,62	50.195.649.987,03
<b>Jumlah</b>	<b>729.703.947.593,13</b>	<b>715.146.946.996,56</b>	<b>98,01</b>	<b>560.356.950.091,03</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - Tahun 2023 Belanja Guru Tidak Tetap (GTT) dicatat sebagai belanja Pegawai BOS, sedangkan pada 2024 disesuaikan dengan menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Belanja Jasa Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
  - Belanja Barang dan Jasa BLUD meningkat dari tahun sebelumnya disebabkan karena tingginya kebutuhan operasional tahun berjalan akan barang-barang kefarmasian; dan
  - Terdapat belanja bunga atas pinjaman BLUD RSUD pada PT BSI sebesar Rp108.584.295,78.
- Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

**5.1.2.1.3 Belanja Bunga**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 54. Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	11.500.000.000,00	11.302.707.488,00	98,28	12.111.886.019,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.500.000.000,00</b>	<b>11.302.707.488,00</b>	<b>98,28</b>	<b>12.111.886.019,00</b>

Penjelasan:

- Bunga dan Pokok Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp11.302.707.488,00 pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan langsung melalui Pendapatan DAU Umum oleh Pemerintah Pusat. Pembayaran bunga maupun pokok pinjaman kepada PT SMI berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kewajiban Pinjaman Reguler dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah tahun 2021(PEN APBD tahun 2021) Kabupaten Lombok Tengah Nomor BA-17/SMI/DPPPP/DPPU1/2024; dan



2. Berikut adalah tabel estimasi nilai total kewajiban pokok dan bunga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan masa pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah terakhir yang disepakati dengan diperhitungkan langsung terhadap tagihan selama 2024.

**Tabel 55. Tabel Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat**

Tanggal Periode	Kewajiban Pokok	Kewajiban Bunga
31/12/2023	0,00	989.650.160,00
31/01/2024	0,00	989.650.160,00
29/02/2024	0,00	925.801.762,00
31/03/2024	0,00	989.650.160,00
30/04/2024	2.598.391.445,00	957.725.962,00
31/05/2024	2.598.391.445,00	975.800.012,00
30/06/2024	2.598.391.445,00	930.919.223,00
31/07/2024	2.598.391.445,00	948.099.716,00
31/08/2024	2.598.391.445,00	934.249.568,00
30/09/2024	2.598.391.445,00	890.709.116,00
31/10/2024	2.598.391.445,00	906.549.272,00
30/11/2024	2.598.391.445,00	863.902.377,00
<b>Total</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>11.302.707.488,00</b>

3. Belanja bunga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah masih melakukan pembayaran Bunga Pinjaman untuk Pembangunan Pasar Jelojok kepada PT SMI dimana Pemerintah Daerah juga melakukan pinjaman kepada PT SMI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pembayaran bunga pinjamannya mulai dilakukan pada tahun 2023 sehingga Realisasi Belanja Bunga lebih tinggi.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 56. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>28.476.375.550,00</b>	<b>28.476.375.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.984.250.366,00</b>
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.476.375.550,00	28.476.375.550,00	100,00	18.984.250.366,00
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>16.276.574.000,00</b>	<b>16.005.892.500,00</b>	<b>98,34</b>	<b>61.746.955.340,00</b>
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.451.574.000,00	7.380.892.500,00	99,05	53.196.955.340,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.150.000.000,00	7.950.000.000,00	97,55	7.400.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	1.150.000.000,00
<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>932.236.363,00</b>	<b>904.086.372,00</b>	<b>96,98</b>	<b>897.088.296,00</b>
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	932.236.363,00	904.086.372,00	96,98	897.088.296,00
<b>Belanja Hibah Dana BOSP</b>	<b>49.536.560.000,00</b>	<b>49.686.020.600,00</b>	<b>100,30</b>	<b>0,00</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Dana BOSP – BOS	16.709.160.000,00	17.140.903.600,00	102,58	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	25.706.400.000,00	25.779.531.000,00	100,28	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	7.121.000.000,00	6.765.586.000,00	95,01	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>95.221.745.913,00</b>	<b>95.072.375.022,00</b>	<b>99,84</b>	<b>81.628.294.002,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Terdapat peningkatan Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp9.492.125.184,00 atau 50,00% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp18.984.250.366,00 dalam rangka Pemilihan Umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
  - b. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
    - 1) BAWASLU berupa dokumen NPHD yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 431/NPHD/203/BKBP/X/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2024; dan
    - 2) Komisi Pemilihan Umum berupa dokumen NPHD yang di dasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 431/NPHD/202/BKBP/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2024.
  - c. Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp6.998.076,00 atau 0,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp897.088.296,00 hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah partai yang memenangkan Pemilu pada Tahun 2024 yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gelora.

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Gerindra	127.552.938,67	127.552.938,00	100,00	128.958.132,00
Partai Golkar	123.768.034,33	123.768.034,33	100,00	127.157.661,00
Partai Kebangkitan Bangsa	104.159.687,67	104.159.687,67	100,00	99.725.820,00
Partai Keadilan Sejahtera	91.878.190,67	91.878.190,67	100,00	82.549.745,00
Partai Persatuan Pembangunan	96.149.549,00	96.149.549,00	100,00	88.964.828,00
Partai Demokrat	92.479.420,33	92.479.420,33	100,00	86.774.979,00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	70.873.768,00	70.873.768,00	100,00	58.028.585,00
Partai Bulan Bintang	54.363.283,00	54.363.283,00	100,00	60.351.981,00
PDI-P	38.307.608,33	38.307.608,33	100,00	36.550.044,00
Partai Amanat Nasional	40.001.349,00	40.001.349,00	100,00	39.562.092,00
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	39.241.901,00	39.241.901,00	100,00	46.239.442,00
Partai Beringin Karya	28.149.990,33	0,00	0,00	42.224.987,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Persatuan Indonesia	14.273.439,00	14.273.439,00	100,00	0,00
Partai Gelombang Rakyat	11.037.203,67	11.037.203,67	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>932.236.363,00</b>	<b>904.086.372,00</b>	<b>96,98</b>	<b>897.088.296,00</b>

- Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah selama Tahun 2024 yang didasarkan pada pada Permedikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis juknis BOS BOSP 2024-2025 menggantikan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus non fisik.

Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 3a-3e*.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 58. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>				
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	540.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>540.000.000,00</b>

Penjelasan:

- Tidak terdapat perbedaan antara capaian realisasi dibandingkan dengan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di Tahun 2024 dan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari tidak terdapat kenaikan atau penurunan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada buruh pabrik rokok; dan
- Pemberian Bantuan Sosial diatas, sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 2024.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	96.853.744.004,22	91.727.573.671,12	94,71	80.516.876.650,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	152.154.849.650,00	142.704.330.558,54	93,79	104.743.919.626,00
Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.004.342.270,00	38.965.281.078,00	90,61	41.496.385.300,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	11.615.231.980,00	10.513.658.618,00	90,52	9.355.409.005,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>303.638.167.904,22</b>	<b>283.920.793.925,66</b>	<b>93,51</b>	<b>236.112.590.581,00</b>



Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada LRA *Lampiran 2*.

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 60. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>5.975.697.831,00</b>	<b>5.927.141.139,00</b>	<b>99,19</b>	<b>6.587.824.090,00</b>
Belanja Modal Alat Bantu	5.975.697.831,00	5.927.141.139,00	99,19	6.587.824.090,00
<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>9.551.686.359,00</b>	<b>9.264.109.000,00</b>	<b>96,99</b>	<b>8.183.436.457,00</b>
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.551.686.359,00	9.264.109.000,00	96,99	8.183.436.457,00
<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>43.448.985,00</b>	<b>22.780.000,00</b>	<b>52,43</b>	<b>1.695.465.939,00</b>
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	403.230.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	43.448.985,00	22.780.000,00	52,43	1.290.371.939,00
<b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>	<b>43.411.279,00</b>	<b>25.815.000,00</b>	<b>59,47</b>	<b>2.988.220.000,00</b>
Belanja Modal Alat Pengolahan	43.411.279,00	25.815.000,00	59,47	2.988.220.000,00
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>6.952.155.555,00</b>	<b>6.380.373.626,00</b>	<b>91,78</b>	<b>3.457.686.120,00</b>
Belanja Modal Alat Kantor	1.125.845.837,00	1.051.582.526,00	93,40	963.916.452,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.765.661.768,00	5.268.241.100,00	91,37	2.426.852.693,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.647.950,00	60.550.000,00	99,84	66.916.975,00
<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>907.105.762,00</b>	<b>871.162.505,00</b>	<b>96,04</b>	<b>927.631.656,00</b>
Belanja Modal Alat Studio	876.757.762,00	841.162.505,00	95,94	750.836.390,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	30.348.000,00	30.000.000,00	98,85	176.795.266,00
<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>21.912.492.779,00</b>	<b>21.304.161.241,00</b>	<b>97,22</b>	<b>37.437.074.203,00</b>
Belanja Modal Alat Kedokteran	13.074.840.403,00	12.913.749.004,00	98,77	15.122.758.731,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.837.652.376,00	8.390.412.237,00	94,94	22.314.315.472,00
<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>20.911.474.220,00</b>	<b>20.449.453.613,00</b>	<b>97,79</b>	<b>22.349.800,00</b>
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	565.447.816,00	549.074.700,00	97,10	22.050.700,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.895.843.486,00	18.462.805.913,00	97,71	299.100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.450.182.918,00	1.437.573.000,00	99,13	0,00
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>9.822.103.389,00</b>	<b>9.616.296.715,00</b>	<b>97,90</b>	<b>3.341.434.308,00</b>
Belanja Modal Komputer Unit	6.918.059.338,00	6.783.294.320,00	98,05	2.694.743.735,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.904.044.051,00	2.833.002.395,00	97,55	646.690.573,00
<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>95.793.407,00</b>	<b>95.741.640,00</b>	<b>99,95</b>	<b>21.751.000,00</b>
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	95.793.407,00	95.741.640,00	99,95	21.751.000,00
<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Alat Pelindung	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>1.138.500.000,00</b>	<b>1.137.000.000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.138.500.000,00	1.137.000.000,00	99,87	0,00
<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>104.863.798,00</b>	<b>101.597.218,12</b>	<b>96,88</b>	<b>91.410.200,00</b>
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	104.863.798,00	101.597.218,12	96,88	91.410.200,00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>15.041.446.000,00</b>	<b>14.349.693.120,00</b>	<b>95,40</b>	<b>14.139.914.167,00</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.041.446.000,00	14.349.693.120,00	95,40	14.139.914.167,00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP</b>	<b>158.400.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	158.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	0,00	0,00	0,00	<b>4.000.000,00</b>
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>4.153.564.640,22</b>	<b>2.140.648.854,00</b>	<b>51,54</b>	<b>1.618.678.710,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.153.564.640,22	2.140.648.854,00	51,54	1.618.678.710,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.853.744.004,22</b>	<b>91.727.573.671,12</b>	<b>94,71</b>	<b>80.516.876.650,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - Terdapat Belanja Pengadaan Peralatan Penunjang Pembelajaran Interaktif untuk Sekolah Dasar dan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - Terdapat peningkatan belanja modal komputer jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa SKPD memperbaharui perangkat keras dan lunak sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Selain itu penggantian terhadap komputer lama karena cenderung tidak lagi mendukung aplikasi dengan tujuan efisien dalam menjalankan tugas administratif dan pelayanan publik.
- Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada LRA *Lampiran 2*.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 61. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>151.290.938.525,00</b>	<b>141.955.915.438,59</b>	<b>93,83</b>	<b>104.626.634.126,00</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	151.290.938.525,00	141.946.265.438,59	93,82	104.626.634.126,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	9.650.000,00	0,00	0,00
<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>448.243.979,00</b>	<b>447.972.931,95</b>	<b>99,94</b>	<b>99.091.600,00</b>
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	448.243.979,00	447.972.931,95	99,94	99.091.600,00
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>415.667.146,00</b>	<b>300.442.188,00</b>	<b>72,28</b>	<b>18.193.900,00</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	415.667.146,00	300.442.188,00	72,28	18.193.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.154.849.650,00</b>	<b>142.704.330.558,54</b>	<b>93,79</b>	<b>104.743.919.626,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.



- a. Terdapat Pembangunan Gedung poliklinik dan rawat inap serta Gedung *cathlab* dan *cytotoxic* pada RSUD Praya (anggaran Dana Alokasi Khusus);
  - b. Pengalokasian dana DAU bidang Pendidikan dan Kesehatan yang diarahkan untuk penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan PMK No 212 Tahun 2022 yang mengatur tentang penggunaan DAU *Earmark* atau DAU yang di tentukan penggunaannya; dan
  - c. Terdapat rehabilitasi sekolah maupun pembangunan laboratorium beberapa sekolah SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 62. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>22.924.433.000,00</b>	<b>20.547.605.759,00</b>	<b>89,63</b>	<b>39.055.942.850,00</b>
Belanja Modal Jalan	15.674.433.000,00	15.064.711.000,00	96,11	34.189.824.000,00
Belanja Modal Jembatan	7.250.000.000,00	5.482.894.759,00	75,63	4.866.118.850,00
<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>14.222.070.000,00</b>	<b>12.609.332.740,00</b>	<b>88,66</b>	<b>205.617.000,00</b>
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.182.070.000,00	12.609.332.740,00	88,91	45.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	40.000.000,00	0,00	0,00	160.617.000,00
<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>5.645.845.131,00</b>	<b>5.596.453.900,00</b>	<b>99,13</b>	<b>1.615.950.450,00</b>
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	339.992.600,00	337.596.000,00	99,30	1.587.321.600,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.018.871.800,00	3.972.857.900,00	98,86	28.628.850,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.286.980.731,00	1.286.000.000,00	99,92	0,00
<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>211.994.139,00</b>	<b>211.888.679,00</b>	<b>99,95</b>	<b>618.875.000,00</b>
Belanja Modal Jaringan Listrik	211.994.139,00	211.888.679,00	99,95	618.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.004.342.270,00</b>	<b>38.965.281.078,00</b>	<b>90,61</b>	<b>41.496.385.300,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah terdapat pembangunan jembatan Ngerapak tidak dapat diselesaikan tepat waktu sampai akhir 2024 karena terdapat bencana banjir di sungai Ngerapak yang mengikis pondasi jembatan; dan
2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 2**.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase



capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 63. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset Tetap lainnya**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>74.944.600,00</b>	<b>99,93</b>	<b>124.975.438,00</b>
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00	74.944.600,00	99,93	124.975.438,00
<b>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga</b>	<b>376.267.980,00</b>	<b>374.466.000,00</b>	<b>99,52</b>	<b>5.214.596,00</b>
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	376.267.980,00	374.466.000,00	99,52	5.214.596,00
<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.031.200,00</b>
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	34.031.200,00
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>11.163.964.000,00</b>	<b>10.064.248.018,00</b>	<b>90,15</b>	<b>9.191.187.771,00</b>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.163.964.000,00	10.064.248.018,00	90,15	9.191.187.771,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.615.231.980,00</b>	<b>10.513.658.618,00</b>	<b>90,52</b>	<b>9.355.409.005,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pada 2024 terdapat pengadaan Alat Musik Marching Band dan alat musik kesenian pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAU Earmark) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 2*.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 64. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset lainnya**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud</b>				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena pada 2024 terdapat pengadaan Aplikasi Pelayanan Perizinan Melalui QR Kode pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; dan
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 2*.

#### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja



Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 65. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	9.537.388.811,00	8.838.353.947,00	92,67	14.359.344.815,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.537.388.811,00</b>	<b>8.838.353.947,00</b>	<b>92,67</b>	<b>14.359.344.815,00</b>

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Tidak Terduga 2024 sebesar Rp8.838.353.947,00 lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 66. Tabel Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Tahun 2024
	Realisasi (Rp)
Konflik sosial masyarakat desa segala Anyar dan desa ketara kecamatan pujut kabupaten lombok tengah tanggal 7 sd 20 februari 2024	305.940.400,00
luran 4% JKN KIS Perangkat Desa (Bulan Desember)Kabupaten Lombok Tengah	33.076.480,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota pada RSU Praya	6.271.983.769,00
Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota pada RSJ Mutiara Sukma	157.462.631,00
Pengembalian pembayaran sewa lahan/ area parkir di Pasar Jelojok Kecamatan Kopang untuk bulan Maret 2023	30.000.000,00
Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ta. 2023 ( Pilkada)	2.501.856,00
penyesuaian atas pemotongan penyaluran DAK Non Fisik atas silpa tahun sebelumnya	2.037.388.811,00
<b>Total</b>	<b>8.838.353.947,00</b>

2. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bencana/pengembalian atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Pengeluaran belanja tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 67. Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	20.838.360.124,00	20.838.360.124,00	100,00	12.045.737.949,00
Transfer Bantuan Keuangan	325.531.822.800,00	325.459.672.460,00	99,98	315.216.275.906,00
<b>Jumlah</b>	<b>346.370.182.924,00</b>	<b>346.298.032.584,00</b>	<b>99,98</b>	<b>327.262.013.855,00</b>

##### 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



**Tabel 68. Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.146.089.922,00	18.146.089.922,00	100,00	10.590.662.789,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.692.270.202,00	2.692.270.202,00	100,00	1.455.075.160,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.838.360.124,00</b>	<b>20.838.360.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.045.737.949,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah 2024 dan pembayaran hutang dana bagi hasil ke Desa tahun 2023 yang dibayarkan 2024;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan dana transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 20 2024 tentang Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2024 setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah; dan
3. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 127 desa yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 31 2024 tentang Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah .

Rincian Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada Lampiran LRA. *Lampiran 5 a-5b*.

#### 5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 69. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	316.405.822.800,00	316.384.972.460,00	99,99	284.554.153.675,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	9.126.000.000,00	9.074.700.000,00	99,44	30.662.122.231,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.531.822.800,00</b>	<b>325.459.672.460,00</b>	<b>99,98</b>	<b>315.216.275.906,00</b>

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 70. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	Realisasi	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>316.384.972.460,00</b>	<b>284.554.153.675,00</b>
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	86.776.530.000,00	72.615.405.454,00
Alokasi Dana Desa	35.531.583.670,00	38.427.772.362,00
Iuran JKN KIS 1% untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	801.988.960,00	763.341.066,00
Dana Desa	185.021.712.000,00	166.892.819.000,00
Iuran BPJS Tenaga Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.253.157.830,00	5.854.815.793,00
<b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	<b>9.074.700.000,00</b>	<b>30.662.122.231,00</b>
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Trantib	3.891.600.000,00	3.891.600.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Marbot	3.331.200.000,00	3.309.600.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Rukun Tetangga	1.617.300.000,00	0,00
kendaraan Operasional Kepala Dusun Desa	234.600.000,00	23.460.922.231,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.459.672.460,00</b>	<b>315.216.275.906,00</b>

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Terdapat peningkatan Pendapatan Realisasi Dana Bagi Hasil dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga formasi perhitungan anggaran sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil juga mengalami peningkatan; dan
  - b. Terdapat penurunan belanja kendaraan operasional Kepala Dusun pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan ke Desa didasarkan pada:
  - a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata cara perhitungan, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
  - b. Penyaluran Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024; dan
  - c. Pembayaran Iuran JKN KIS 1% untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong dengan Kabupaten Lombok Tengah Triwulan IV 2024 No. 2526/BA/XI.10/1224.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyalurkan kepada 127 Desa dengan rincian dapat dilihat pada Rincian desa penerima Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada *lampiran 4a – 4d*.

### 5.1.3 Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang dihitung dengan rincian:

**Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	39.084.647.243,00	44.064.564.543,49	112,74	41.877.120.219,73



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00	19.901.253.226,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>18.297.515.683,00</b>	<b>23.277.432.983,49</b>	<b>127,22</b>	<b>21.975.866.993,73</b>

### 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 72. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.084.647.243,00	39.084.647.243,49	100,00	41.854.120.219,73
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	4.950.317.300,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	29.600.000,00	0,00	23.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.084.647.243,00</b>	<b>44.064.564.543,49</b>	<b>112,74</b>	<b>41.877.120.219,73</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terdapat realisasi pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 2024 sebesar Rp4.950.317.300,00, ini merupakan kerjasama pembiayaan antara RSUD BLUD Praya dengan PT BSI dalam bentuk dana talangan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

#### 5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.769.472.976,24 lebih rendah 6,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp41.854.120.219,73.

Uraian Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 73. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2024**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	22.555.286.973,55	25.655.073.633,32
Kas di Bendahara Penerimaan	271.718.835,30	163.027.296,82
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.670.411,20	17.420.119,00
Kas di BLUD	4.652.784.282,97	10.349.096.950,50
Kas Dana BOS	647.168.714,71	688.227.475,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	11.020.654.257,00	4.981.249.745,00
Koreksi silpa Tahun 2022	0,00	24.999,38
Kas Lainnya- Rekening bendahara pengeluaran di Kelurahan	363.768,76	0,00
Uang titipan berupa uang Jaminan Keberlangsungan Sewa Tanah Pasar Renteng dan Pasar Jelujuk	(76.000.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.084.647.243,49</b>	<b>41.854.120.219,73</b>

#### 5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang merupakan saldo Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



**Tabel 74. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	4.950.317.300,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.317.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun 2024 telah menerima Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yaitu PT BSI sebesar Rp4.950.317.300,00 yang digunakan untuk biaya Operasional RSUD Praya dengan jangka waktu 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025 dengan tingkat bunga flat dan metode perhitungan bunga yaitu 0,70% Per Bulan seluruhnya dibayar dimuka. Penerimaan pinjaman tersebut diikat dengan Perjanjian Nomor 04/017.3/SF.BPJS/ACB Denpasar tentang perjanjian *line facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tertanggal 30 Desember 2024.

#### 5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 75. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	29.600.000,00	0,00	23.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>

Penjelasan:

Penerimaan kembali Dana Bergulir merupakan pengembalian pokok atas investasi dana bergulir perkuatan modal koperasi sebesar Rp29.600.000,00 yang bersumber dari koperasi usaha kecil dan menengah.

Rincian Penerimaan kembali Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

#### 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 76. Pengeluaran Pembiayaan**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00	19.901.253.226,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.901.253.226,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pembayaran pokok pinjaman kepada PT SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang pembayarannya



dipotong langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Utang antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT SMI untuk periode pembayaran pokok utang dari bulan April sampai dengan bulan November 2024 masing-masing perbulannya senilai Rp2.598.391.445,00 sehingga total pembayaran pokok pinjaman sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp20.787.131.560,00. Pinjaman ini diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember Tahun 2021 telah dirubah melalui Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei Tahun 2022 antara Direktur PT SMI dengan Bupati Lombok Tengah.

#### 5.1.3.2.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada Tahun 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 77. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00	19.901.253.226,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.901.253.226,00</b>

Penjelasan:

Merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 dicatat dan diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember Tahun 2021 telah dirubah melalui Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei Tahun 2022 antara Direktur PT SMI dengan Bupati Lombok Tengah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari yaitu PT SMI sebesar Rp20.787.131.560,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp185.665.776.050,00, sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp164.878.644.490,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca.

#### 5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang dihitung dari.

**Tabel 78. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.685.754.476.568,00</b>	<b>2.729.660.115.585,25</b>	<b>101,63</b>	<b>2.278.299.769.297,99</b>
Pendapatan Asli Daerah	380.346.200.398,00	331.059.847.831,25	87,04	274.112.885.092,99
Pendapatan Transfer	2.265.621.241.368,00	2.289.284.360.966,00	101,04	1.972.976.082.091,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	39.787.034.802,00	109.315.906.788,00	274,75	31.210.802.114,00
<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.357.681.809.327,00</b>	<b>2.271.298.095.540,98</b>	<b>96,34</b>	<b>1.933.928.975.193,23</b>
Belanja Operasi	2.044.506.252.611,78	1.978.538.947.668,32	96,77	1.683.457.039.797,23
Belanja Modal	303.638.167.904,22	283.920.793.925,66	93,51	236.112.590.581,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	9.537.388.811,00	8.838.353.947,00	92,67	14.359.344.815,00
<b>Transfer Daerah</b>	<b>346.370.182.924,00</b>	<b>346.298.032.584,00</b>	<b>99,98</b>	<b>327.262.013.855,00</b>
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	20.838.360.124,00	20.838.360.124,00	100,00	12.045.737.949,00
Transfer Bantuan Keuangan	325.531.822.800,00	325.459.672.460,00	99,98	315.216.275.906,00
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>18.297.515.683,00</b>	<b>23.277.432.983,49</b>	<b>127,22</b>	<b>21.975.866.993,73</b>
Penerimaan Pembiayaan	39.084.647.243,00	44.064.564.543,49	112,74	41.877.120.219,73
Pengeluaran Pembiayaan	20.787.131.560,00	20.787.131.560,00	100,00	19.901.253.226,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>135.341.420.443,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.084.647.243,49</b>

Dari SiLPA tersebut di atas masih terdapat Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp4.558.236.580,00 yang belum dibayarkan kepada tenaga kesehatan di puskesmas yang berstatus Non-BLUD. Kondisi ini terjadi karena kekurangan penganggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan untuk tenaga kesehatan di puskesmas dalam APBD Tahun 2024.

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan diatas, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp135.341.420.443,76 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 79. Rincian SILPA Terikat dan SILPA Non-Terikat**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Dana SiLPA Terikat</b>	<b>32.039.409.467,77</b>
Dana pada Kas di BLUD	9.005.264.738,26
Dana pada Kas Dana BOS	644.439.673,71
Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80
<b>DAK Fisik Bidang Reguler:</b>	<b>6.473.925.731,00</b>
DAK Fisik Bidang Pendidikan	6.300.821.714,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan	94.095.015,00
DAK Fisik Bidang Jalan	26.400.000,00
DAK Fisik Bidang Air Minum	48.191.002,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi	4.403.000,00
DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan	15.000,00
<b>DAK Fisik penugasan</b>	<b>109.049.312,00</b>
DAK Fisik Bidang Jalan	55.700.000,00
DAK Fisik Bidang Transportasi Pedesaan	14.074.000,00
DAK Fisik Bidang Pertanian	26.045.500,00
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	140.000,00
DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	606,00
DAK Fisik Bidang Pariwisata	93.631,00
DAK Fisik Bidang Air Minum	1.330.000,00
DAK Fisik Bidang Irigasi	127.725,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi	1.537.850,00
DAK Fisik Bidang UMKM	10.000.000,00
<b>Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:</b>	<b>13.945.350.476,00</b>
Dana Non Fisik – BOS	
Tunjangan Profesi Guru	5.717.359.660,00
Tambahan Penghasilan Guru	498.250.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.346.254.177,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	574.681.134,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	6.096.100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Pelayanan Kepariwisata	27.987.400,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	17.438.400,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	39.628.900,00
Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	73.649.336,00
Dana Penguatan Kelembagaan Sentra IKM	112.150.641,00
Dana Insentif Daerah	531.854.728,00
<b>Dana SiLPA Non-Terikat</b>	<b>103.302.010.975,99</b>
Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00
Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	0,00
Dana pada Kas di BLUD	0,00
<b>Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:</b>	<b>103.281.537.181,99</b>
Pelampauan Pajak Daerah	5.586.743.605,79
Pelampauan Retribusi Daerah	5.886.615.485,79
Pelampauan Pendapatan Hibah	
Pelampauan Dana Darurat	91.604.333.190,41
Pelampauan Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	17.689.069.400,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.101.508.000,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Cukai Hasil Tembakau	3.230.408.691,88
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	30.325.326.000,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	7.514.327,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	23.178.364.740,53
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	12.417.752.059,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2.858.234.872,00
<b>Jumlah</b>	<b>135.341.420.443,76</b>

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut.

Tabel 80. Rincian keberadaan SiLPA

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	9.005.264.738,26
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80
Kas Dana BOSP	644.439.673,71
Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00
<b>Jumlah</b>	<b>135.341.420.443,76</b>

3. Terdapat selisih antara jumlah SiLPA dengan nilai saldo kas akhir dalam LAK sebesar Rp742.851.465,77 yang merupakan saldo kas lainnya di bendahara selain BUD.



## 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 81. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	22.555.286.973,55	25.655.073.633,32
Kas di Bendahara Penerimaan	271.718.835,30	163.027.296,82
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.670.411,20	17.420.119,00
Kas di BLUD	4.652.784.282,97	10.349.096.950,50
Kas Dana BOS	647.168.714,71	688.227.475,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	11.020.654.257,00	4.981.249.745,00
Kas Lainnya- Rekening bendahara pengeluaran di Kelurahan	363.768,76	0,00
Uang titipan berupa uang Jaminan Keberlangsungan Sewa Tanah Pasar Renteng dan Pasar Jelujuk	(76.000.000,00)	0,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	24.999,38
<b>Jumlah</b>	<b>39.084.647.243,49</b>	<b>41.854.120.219,73</b>

Saldo diatas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 82. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	39.084.647.243,49	41.854.120.219,73
<b>Jumlah</b>	<b>39.084.647.243,49</b>	<b>41.854.120.219,73</b>

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2024 dan Tahun 2023.

### 5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo dibawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 83. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	135.341.420.443,76	39.084.647.243,49
<b>Jumlah</b>	<b>135.341.420.443,76</b>	<b>39.084.647.243,49</b>



Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 6.1.3*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 6.1.4* di bawah.

#### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

#### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang terdiri dari:

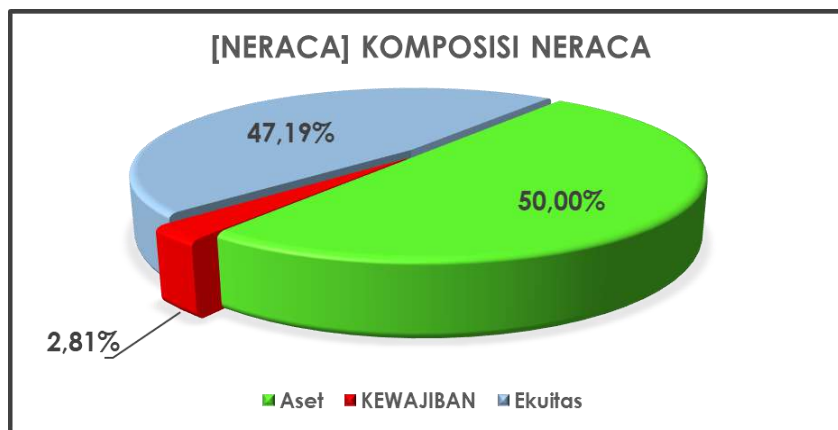
**Tabel 84. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	271.718.835,30
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.670.411,20
Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97
Kas Dana BOS	0,00	647.168.714,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
Setara kas	0,00	363.768,76
Kas Dana BOSP	644.439.673,71	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	0,00
Uang titipan berupa uang Jaminan Keberlangsungan Sewa Tanah Pasar Renteng dan Pasar Jelujuk	0,00	(76.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>135.341.420.443,76</b>	<b>39.084.647.243,49</b>

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point 5.3.5*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.6.3* di atas.

### 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023.



Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.3.1. ASET

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut.

**Tabel 85. Rincian Aset**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Aset Lancar	239.380.450.241,04	208.688.779.340,18	30.691.670.900,86	14,71
2	Investasi Jangka Panjang	143.047.444.147,13	140.158.906.519,13	2.888.537.628,00	2,06
3	Aset Tetap	3.712.625.425.091,81	3.646.662.721.461,85	65.962.703.629,96	1,81
4	Properti Investasi	25.386.152.486,00	25.833.394.242,00	(447.241.756,00)	(1,73)
5	Aset Lainnya	42.476.524.583,79	69.005.473.019,72	(26.528.948.435,93)	(38,44)
	<b>Jumlah</b>	<b>4.162.915.996.549,77</b>	<b>4.090.349.274.582,88</b>	<b>72.566.721.966,89</b>	<b>1,77</b>

#### 5.3.1.1. Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut.

**Tabel 86. Rincian Aset Lancar**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kas dan setara Kas	136.084.271.909,53	39.620.688.881,37	96.463.583.028,16	243,47
2	Piutang	124.284.183.773,99	189.096.802.718,99	(64.812.618.945,00)	(34,27)
3	Penyisihan Piutang	(54.161.634.997,02)	(41.730.971.316,51)	(12.430.663.680,51)	29,79
4	Beban dibayar dimuka	397.901.932,53	297.805.333,33	100.096.599,20	33,61
5	Persediaan	32.775.727.622,01	21.404.453.723,00	11.371.273.899,01	53,13
	<b>Jumlah</b>	<b>239.380.450.241,04</b>	<b>208.688.779.340,18</b>	<b>30.691.670.900,86</b>	<b>14,71</b>

#### 5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase



kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 87. Rincian Kas dan Setara Kas**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55	96.264.904.900,44	426,80
2	Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	271.718.835,30	(251.245.041,30)	(92,47)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.670.411,20	(12.670.411,20)	(100,00)
4	Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97	4.352.480.455,29	93,55
5	Kas Dana BOS	0,00	647.168.714,71	(647.168.714,71)	(100,00)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00	(9.159.274.720,20)	(83,11)
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	742.851.465,77	460.405.406,64	282.446.059,13	61,35
8	Kas Dana BOSP	644.439.673,71	0,00	644.439.673,71	100,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	0,00	4.989.670.827,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>136.084.271.909,53</b>	<b>39.620.688.881,37</b>	<b>96.463.583.028,16</b>	<b>243,47</b>

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 yang ditempatkan di Bank NTB Syariah dan PT Bank Mandiri Cabang Praya dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 88. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah**

No Rekening	Uraian	Bank	31 Desember 2024	31 Desember 2023
003.21.00706.00.0	RKUD Kab. Lombok Tengah	Bank NTB Cabang Praya	118.567.960.049,14	22.304.567.532,24
161.00.0126379.2	Giro	Bank Mandiri	252.231.824,85	250.719.441,31
	<b>Jumlah</b>		<b>118.820.191.873,99</b>	<b>22.555.286.973,55</b>

- a. Saldo Kas di Kas Daerah yang ditempatkan pada Bank NTB Syariah Cabang Praya per 31 Desember 2024 yang disajikan tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara BUD Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak Bank NTB Syariah Cabang Praya yang dicantumkan dalam berita acara rekonsiliasi. Dalam Berita Acara Rekonsiliasi tersebut terdapat perbedaan pencatatan saldo kas antara BUD dengan Bank NTB Syariah dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 89. Selisih Saldo Kas di Kas Daerah PT Bank NTB Syariah Cab. Praya**

No	Saldo Menurut PT Bank NTB Syariah Cab. Praya	Saldo Menurut BUD Kab. Lombok Tengah	Selisih
1	120.906.153.999,14	118.567.960.049,14	2.338.193.950,00

Perbedaan senilai Rp2.338.193.950,00 tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Outstanding Cheque* senilai Rp2.298.942.900,00 merupakan nilai SP2D yang telah dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada bulan Desember 2024 namun dibayarkan/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh PT Bank NTB Cabang Praya pada bulan Januari 2025. Nilai sebesar tersebut telah diakui sebagai pengeluaran atau belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran untuk periode per 31 Desember 2024. Seluruh *Outstanding Cheque* senilai Rp2.298.942.900,00 telah dipindahbukukan terakhir tanggal 6 Januari 2025;
- 2) Bank lebih bayar senilai Rp200,00 atas SP2D Nomor 52.02/04.0/000583/LS/1.04.1.03. 2.10.01.0000/PPR3/12/2024, Dinas Perumahan dan Permukiman atas pembayaran retensi pekerjaan penataan lingkungan senilai Rp4.495.650,00 dan terbayar oleh pihak Bank senilai Rp4.495.850,00 atas kejadian ini pihak Bank NTB telah melakukan pemindahbukuan dari Pihak III ke RKUD pada 3 Januari 2025;
- 3) Terdapat Uang Pihak Ketiga senilai Rp46.000.000,00 berupa uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah areal parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang

jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan dilaporan realisasi anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sampai dengan perjanjian sewa tersebut berakhir dan dikembalikan ke pihak penyewa;

- 4) Terdapat pembayaran ganda atas Retensi 5% dari Nilai Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di Polindes Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang An. CV Karisma Bimaraya, dengan SP2D Tanggal 24 Desember 2024 Nomor 52.02/04.0/ 001170/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 dan SP2D Tanggal 30 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 52.02/04.0/001429/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PPR3/ 12/2024 senilai Rp6.748.750,00. Atas kelebihan tersebut telah dikreditkan ke rekening Kas Daerah pada 6 Januari 2025.
- b. Selain pada Bank NTB Syariah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menempatkan Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Praya dengan Nomor Rekening 161.00.0126379.2 sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2024. Rekening tersebut digunakan dalam penempatan bunga deposito atas pembentukan dana deposito pada Bank Mandiri Cabang Praya. Saldo Kas di Kas Daerah pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Praya per 31 Desember 2024 Senilai Rp252.231.824,85. Tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Kas Daerah yang ditempatkan pada Bank Mandiri Cabang Praya antara pencatatan pihak Bank Mandiri Cabang Praya dengan BUD Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dari Saldo Kas di Bank NTB Cabang Praya senilai Rp118.567.960.049,14 terdapat saldo dana BOSP yang direklasifikasi dari Kas Dana BOSP ke Kas di Kas Daerah PT Bank NTB Syariah senilai Rp105.388.595,28 atas Satuan Pendidikan yang ditutup dan dimerger dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 90 Pengembalian Saldo Kas BOSP**

No	Nama Satuan Pendidikan	Nilai
1	SDN 8 Praya	43.378.035,00
2	SDN 2 Bombas	13.630.000,00
3	SD Negeri 2 Tengari	33.840.000,00
4	SMPN 7 Praya	14.540.560,28
<b>Jumlah</b>		<b>105.388.595,28</b>

2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 yang disetor pada Awal Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 91 Kas di Bendahara Penerimaan**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	650.600,00	40.792.320,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan DPMPSTP	19.823.194,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Bappenda	0,00	3.909.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan Dishub	0,00	9.300,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan PPKD/BKAD	0,00	4.138.215,30
6	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian	0,00	222.870.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.473.794,00</b>	<b>271.718.835,30</b>

Berikut rincian penyetoran saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 ke RKUD:

**Tabel 92 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke RKUD**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Tahun 2024		Tahun 2023		
		Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Setor Ke RKUD	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Setor Ke RKUD	
1	Dikes	540.000,00	09/01/2025	40.792.320,00	09/01/2024	461.000,00
		110.600,00	14/03/2025		16/01/2024	1.571.040,00
					18/01/2024	4.795.620,00
					22/01/2024	1.500.000,00
					29/01/2024	327.740,00
					30/01/2024	12.541.000,00
					31/01/2024	780.000,00
					06/02/2024	40.000,00
					13/02/2024	4.755.600,00
					15/02/2024	1.485.840,00
					19/02/2024	8.824.800,00
		20/02/2024	571.680,00			
		27/02/2024	2.718.000,00			
		06/03/2024	420.000,00			
2	DPMPTSP	19.823.194,00	10/01/2025	0,00		
3	Bappenda	0,00		3.909.000,00	09/01/2024	325.000,00
					09/01/2024	2.198.000,00
					23/01/2024	1.386.000,00
4	Dishub	0,00		9.300,00	29/01/2024	9.300,00
5	PPKD/BKAD	0,00		4.138.215,30	17/01/2024	4.046.211,00
					12/01/2024	91.991,01
					29/01/2024	13,29
6	Dinas Pertanian	0,00		222.870.000,00	08/05/2024	222.870.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.473.794,00</b>		<b>271.718.835,30</b>		<b>271.718.835,30</b>

- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 seluruhnya telah dilimpahkan/disetorkan pada tahun 2024 ke RKUD.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyajikan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.005.264.738,26. Rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 93 Rincian Kas di BLUD**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	RSUD Praya	5.433.013.896,83	2.552.530.363,84
2	Puskesmas Praya	515.572.509,55	392.971.208,25
3	Puskesmas Puyung	478.409.339,81	396.370.512,94
4	Puskesmas Aikmual	972.309.096,56	689.765.925,01
5	Puskesmas Janapria	896.755.553,86	507.664.732,62
6	Puskesmas Aik Darek	709.204.341,65	113.481.540,31
<b>Jumlah</b>		<b>9.005.264.738,26</b>	<b>4.652.784.282,97</b>

Penjelasan posisi Kas di BLUD RSUD Praya per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 94 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Praya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>A</b>	<b>Kas di Bank</b>	<b>4.287.543.198,92</b>	<b>2.215.992.749,84</b>
1	Bank Mandiri	225.139.397,00	308.263.247,00
2	Bank NTB Syariah 1	205.835.883,92	1.896.947.080,84
3	Bank NTB Syariah 2	3.880.800,00	3.880.800,00

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4	Bank Negara Indonesia (BNI)	6.795.558,00	6.901.622,00
5	Bank Syariah Indonesia (BSI)	3.845.891.560,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>1.145.470.698,00</b>	<b>336.537.614,00</b>
1	Kas Tunai	12.678.698,00	9.027.858,00
2	Sisa Panjar kegiatan	1.132.792.000,00	327.509.756,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.433.013.896,92</b>	<b>2.552.530.363,84</b>

Komponen Kas di BLUD RSUD Praya terdiri dari Kas di Bank dan Kas di Bendahara BLUD. Kas di Bank merupakan rekening yang dibentuk dalam rangka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Praya. Sedangkan Kas di Bendahara BLUD merupakan kas tunai yang masih berada pada Bendahara BLUD RSUD Praya baik dalam bentuk kas tunai dan Sisa Panjar Kegiatan.

Penjelasan Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 95 Rincian Kas di BLUD Puskesmas**

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Tunai	Bank	Jumlah	
1	Kas di BLUD Puskesmas Praya	20.957.131,00	494.615.378,55	515.572.509,55	392.971.208,25
2	Kas di BLUD Puskesmas Puyung	10.000.000,00	468.409.339,81	478.409.339,81	396.370.512,94
3	Kas di BLUD Puskesmas Aikmual	7.176.476,50	965.132.620,06	972.309.096,56	689.765.925,01
4	Kas di BLUD Puskesmas Janapria	5.118.916,76	891.636.637,10	896.755.553,86	507.664.732,62
5	Kas di BLUD Puskesmas Aik Darek	13.555.928,81	695.648.412,84	709.204.341,65	113.481.540,31
<b>Jumlah</b>		<b>56.808.453,07</b>	<b>3.515.442.388,36</b>	<b>3.572.250.841,43</b>	<b>2.100.253.919,13</b>

5. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 menyajikan saldo Kas di BOS senilai Rp0,00. Kas Dana BOS sekolah negeri per 31 Desember 2024 mengalami penurunan senilai Rp647.168.714,71 atau sebesar 100% dibanding posisi per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena terjadi pengalihan penyajian saldo Kas di Bendahara BOS ke Akun Kas Dana BOSP. Berikut rincian posisi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2024:

**Tabel 96 Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS**

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Kas Dana BOS SD	0,00	0,00	0,00	513.620.526,08
2	Kas Dana BOS SMP	0,00	0,00	0,00	133.548.188,63
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.168.714,71</b>

6. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1.861.379.536,80. Saldo Kas Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibanding posisi per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 Saldo Kas FKTP yang bersumber dari Dana BOK disajikan dalam akun Kas Dana Kapitasi pada FKTP sedangkan pada Tahun 2024 Dana FKTP yang bersumber dari Dana BOK disajikan pada akun tersendiri. Berikut rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) yang bersumber dari pendanaan Dana JKN sebagai berikut.

**Tabel 97 Rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) Dana JKN**

No	FKTP	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Puskesmas Batunyala	75.885.401,00	0,00	75.885.401,00	575.401.468,00
2	Puskesmas Kopang	272.027.714,00	99.035.403,00	371.063.117,00	488.418.029,00
3	Puskesmas Mantang	111.365.003,00	2.252,00	111.367.255,00	423.954.187,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	FKTP	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Bank	Tunai	Jumlah	
4	Puskesmas Sengkol	76.855.569,00	0,00	76.855.569,00	838.568.287,00
5	Puskesmas Muncan	54.673.227,00	0,00	54.673.227,00	884.446.272,00
6	Puskesmas Pengadang	15.732.313,00	0,00	15.732.313,00	655.756.233,00
7	Puskesmas Penujak	53.970.085,00	0,00	53.970.085,00	200.460.524,00
8	Puskesmas Kuta	81.141.257,00	0,00	81.141.257,00	267.000.864,00
9	Puskesmas Mangkung	77.221.991,00	5.437.113,00	82.659.104,00	264.268.116,00
10	Puskesmas Teruwai	296.153,00	0,00	296.153,00	377.496.021,00
11	Puskesmas Mujur	143.062.302,00	2.908.220,00	145.970.522,00	442.052.321,00
12	Puskesmas Bonjeruk	51.898.216,00	0,00	51.898.216,00	502.722.254,00
13	Puskesmas Bagu	30.549.363,00	628	30.549.991,00	453.503.469,00
14	Puskesmas Ganti	2.501.890,00	62.714.006,00	65.215.896,00	352.692.089,00
15	Puskesmas Darek	160.922.401,00	0,00	160.922.401,00	131.146.969,00
16	Puskesmas Ubung	1.582.699,00	9.755.494,00	11.338.193,00	354.975.963,00
17	Puskesmas Teratak	71.223.853,00	0,00	71.223.853,00	497.190.932,00
18	Puskesmas Pringgarata	106.744.703,00	0,00	106.744.703,00	536.325.209,00
19	Puskesmas Langko	106.385.514,64	9.821.055,16	116.206.569,80	546.652.448,00
20	Puskesmas Batu Jangkih	90.994.894,00	0,00	90.994.894,00	264.055.825,00
21	Puskesmas Batujai	15.270.147,00	5.000.000,00	20.270.147,00	231.036.285,00
22	Puskesmas Wajageseng	25.320.734,00	6.386.195,00	31.706.929,00	344.624.035,00
23	Puskesmas Tanak Beak	34.693.741,00	0,00	34.693.741,00	498.019.968,00
25	Puskesmas Praya BLUD	0,00	0,00	0,00	137.231.488,00
26	Puskesmas Puyung BLUD	0,00	0,00	0,00	215.724.364,00
27	Puskesmas Aikmual BLUD	0,00	0,00	0,00	166.035.707,00
28	Puskesmas Janapria BLUD	0,00	0,00	0,00	56.147.810,00
29	Puskesmas Aik Darek BLUD	0,00	0,00	0,00	314.747.120,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.660.319.170,64</b>	<b>201.060.366,16</b>	<b>1.861.379.536,80</b>	<b>11.020.654.257,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) per 31 Desember 2024 senilai Rp1.861.379.536,80 belum termasuk Saldo Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) pada Puskesmas Mujur senilai Rp12.260.000,00. Nilai tersebut merupakan dana Non Kapitasi PKM Mujur yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan, namun sampai dengan per 31 Desember 2024 belum ditarik dari rekening untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau digunakan dalam operasional pelayanan kesehatan. Sedangkan Saldo Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) Kopang dalam bentuk uang tunai sebesar Rp99.035.403,00 telah disalurkan kepada Tenaga Kesehatan dalam bentuk Jasa Pelayanan Kesehatan namun tidak tersedia anggarannya dalam dokumen DPA Tahun 2024 sehingga dalam penyajian laporan keuangan ini masih disajikan sebagai saldo kas di Bendahara Puskesmas (FKTP);

7. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp742.851.465,77 dan Rp460.405.406,64. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya dalam bentuk utang PFK. Berikut rinciannya:

**Tabel 98 Rincian Kas Lainnya**

No	Keterangan	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1</b>	<b>Utang PFK</b>		<b>742.851.465,77</b>	<b>460.041.637,88</b>
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.423.942,77	148.278.174,00
		Dinas Kesehatan	13.180.433,00	98.341.140,88
		Rumah Sakit Umum Daerah	677.247.090,00	213.310.463,00
		DPMD	0,00	70.048,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	41.812,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Keterangan	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
2	Pendapatan Jasa Giro	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	363.768,76
Jumlah			742.851.465,77	460.405.406,64

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 berupa Utang PFK telah disetor seluruhnya sampai dengan bulan Mei 2025. Sedangkan Utang Jangka Pendek berupa Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 pada enam bendahara pengeluaran kantor kelurahan senilai Rp363.768,76 dan telah dilimpahkan ke RKUD Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 99. Rincian Pendapatan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan Tahun 2023**

No	Nama Kelurahan	Nomor Rekening	Nilai
1	Bendahara Kantor Lurah Gonjak	003.02.05.996272	21.862,28
2	Kantor Lurah Rentang	003.02.05.979276	86.438,45
3	Bendahara Kantor Lurah Leneng	003.02.06.005274	31.309,82
4	Kantor Lurah Prapen	003.02.05.981271	27.244,75
5	Bendahara Kantor Lurah Gerantung	003.02.06.033274	153.135,63
6	Bendahara Kantor Lurah Sasake	003.02.06.035276	43.777,83
Jumlah			363.768,76

8. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki Saldo Dana BOSP per 31 Desember 2024 senilai Rp644.439.673,71 yang tersebar pada 665 sekolah se-Kabupaten Lombok Tengah baik pada Tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Berikut rincian posisi Kas di Bendahara Dana BOSP per 31 Desember 2024:

**Tabel 100. Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS**

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Kas Dana BOSP SD	535.747.471,08	62.000,00	535.809.471,08	0,00
2	Kas Dana BOSP SMP	107.796.682,63	833.520,00	108.630.202,63	0,00
Jumlah		643.544.153,71	895.520,00	644.439.673,71	0,00

9. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp4.989.670.827,00 BOK yang tersebar pada 29 FKTP dan tersimpan pada Bank BNI Cabang Praya sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan bahwa penyaluran dana Puskesmas harus melalui Bank BNI. Berikut rincian Kas Dana BOK Puskemas per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 101. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas (FKTP)**

FKTP	31 Desember 2024			31 Desember 2023
	Bank	Tunai	Jumlah	
Darek	303.469.830,00	0,00	303.469.830,00	0,00
Kuta	118.128.246,00	0,00	118.128.246,00	0,00
Sengkol	306.492.658,00	0,00	306.492.658,00	0,00
Batu Jangkih	148.098.490,00	0,00	148.098.490,00	0,00
Ganti	111.453.502,00	0,00	111.453.502,00	0,00
Muncan	209.509.347,00	0,00	209.509.347,00	0,00
Penujak	30.885.205,00	0,00	30.885.205,00	0,00
Ubung	271.928.309,00	0,00	271.928.309,00	0,00
Mantang	395.792.598,00	0,00	395.792.598,00	0,00
Bonjeruk	308.881.796,00	0,00	308.881.796,00	0,00
Mujur	252.601.600,00	0,00	252.601.600,00	0,00

FKTP	31 Desember 2024			31 Desember 2023
	Bank	Tunai	Jumlah	
Mangkung	112.136.435,00	0,00	112.136.435,00	0,00
Teratak	154.184.404,00	0,00	154.184.404,00	0,00
Praya	535.645.658,00	0,00	535.645.658,00	0,00
Langko	234.966.032,00	0,00	234.966.032,00	0,00
Puyung	165.168.388,00	0,00	165.168.388,00	0,00
Janapria	126.202.938,00	0,00	126.202.938,00	0,00
Batujai	58.333.803,00	0,00	58.333.803,00	0,00
Pringgarata	132.956.515,00	0,00	132.956.515,00	0,00
Teruwai	102.781.206,00	0,00	102.781.206,00	0,00
Aik Darek	136.149.136,00	0,00	136.149.136,00	0,00
Tanak Beak	79.363.979,00	0,00	79.363.979,00	0,00
Bagu	50.091.794,00	0,00	50.091.794,00	0,00
Batunyala	61.716.238,00	0,00	61.716.238,00	0,00
Kopang	202.375.250,00	0,00	202.375.250,00	0,00
Wajegeseng	21.224.250,00	0,00	21.224.250,00	0,00
Aik Mual	197.464.799,00	0,00	197.464.799,00	0,00
Pengadang	155.078.822,00	0,00	155.078.822,00	0,00
Awang	6.589.599,00	0,00	6.589.599,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.989.670.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.670.827,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut.

Tabel 104. Daftar Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Reklame	33.693.750,00	27.576.481,67	6.117.268,33	22,18
2	Piutang Pajak Air Tanah	22.596.200,00	14.415.214,00	8.180.986,00	56,75
3	Piutang PBB-P2	86.321.727.662,07	78.244.819.817,07	8.076.907.845,00	10,32
	<b>Jumlah</b>	<b>86.378.017.612,07</b>	<b>78.286.811.512,74</b>	<b>8.091.206.099,33</b>	<b>10,34</b>

Berikut rincian Piutang PBB tak tertagih berdasarkan tahun timbulnya Piutang:

Tabel 105. Piutang PBB-P2 Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Saldo Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tahun 2012	2.685.481.286,00	2.685.481.286,00	0,00	2.736.006.394,00
3	Tahun 2013	3.031.710.354,00	3.031.710.354,00	0,00	3.091.115.841,00
4	Tahun 2014	2.236.275.583,00	2.236.275.583,00	0,00	2.282.142.967,00
5	Tahun 2015	3.503.422.827,00	3.503.422.827,00	0,00	3.556.975.571,00
6	Tahun 2016	7.843.634.040,00	7.843.634.040,00	0,00	7.961.325.851,00
7	Tahun 2017	6.683.341.943,00	6.683.341.943,00	0,00	6.799.641.175,00
8	Tahun 2018	7.641.442.445,59	7.641.442.445,59	0,00	7.774.590.609,59
9	Tahun 2019	7.416.957.746,83	7.416.957.746,83	0,00	7.572.699.652,83
10	Tahun 2020	9.025.582.463,13	4.512.791.231,57	4.512.791.231,56	9.214.872.811,13
11	Tahun 2021	8.854.422.140,74	4.427.211.070,37	4.427.211.070,37	9.080.214.131,74
12	Tahun 2022	8.514.681.844,78	851.468.184,48	7.663.213.660,30	8.748.790.651,78
13	Tahun 2023	9.015.428.907,00	901.542.890,70	8.113.886.016,30	9.426.444.161,00
14	Tahun 2024	9.869.346.081,00	49.346.730,41	9.819.999.350,59	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Saldo Piutang	Penyisihan	NRV	
	Jumlah	86.321.727.662,07	51.784.626.332,95	34.537.101.329,12	78.244.819.817,07

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan verifikasi dan validasi data Wajib Pajak PBB-P2 dan Piutang PBB-P2 di antaranya:

- Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pemutahiran data di tiga desa/kelurahan yang potensial yaitu Kelurahan Praya, Kelurahan Leneng, dan Desa Kuta;
- Akan melakukan penilaian individu terhadap 20 Objek Pajak Potensial di wilayah Desa Kuta;
- Mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan penilai pajak PBB-P2; dan
- Penyusunan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penghapusan Piutang.

Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dan klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 6a*

#### 5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

Tabel 106. Daftar Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>1</b>	<b>Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>997.436.350,00</b>	<b>1.836.446.900,00</b>	<b>(839.010.550,00)</b>	<b>(45,69)</b>
	BPJS Non Kapitasi	551.044.350,00	1.365.306.900,00	(814.262.550,00)	(59,64)
	UTD Unit Laboratorium Dinas Kesehatan	446.392.000,00	471.140.000,00	(24.748.000,00)	(5,25)
<b>2</b>	<b>Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>293.247.045,00</b>	<b>293.247.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PT STP	36.993.379,42	36.993.379,42	0,00	0,00
	PT Pr	25.917.764,83	25.917.764,83	0,00	0,00
	PT XLA	63.696.184,58	63.696.184,58	0,00	0,00
	PT SSKP	13.113.317,92	13.113.317,92	0,00	0,00
	PT TB	26.034.306,50	26.034.306,50	0,00	0,00
	PT GT	32.653.762,50	32.653.762,50	0,00	0,00
	PT EBT	8.596.838,00	8.596.838,00	0,00	0,00
	PT IL	71.159.552,92	71.159.552,92	0,00	0,00
	PT MLP	15.081.938,33	15.081.938,33	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>522.940.983,33</b>	<b>1.522.940.983,33</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>	<b>(65,66)</b>
	Retribusi Sewa Tanah	473.415.983,33	1.473.415.983,33	(1.000.000.000,00)	(67,87)
	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	49.525.000,00	49.525.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan</b>	<b>51.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.260.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan UTD Persampahan	51.260.000,00	0,00	51.260.000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Piutang Retribusi Pasar Grosir Pertokoan</b>	<b>1.204.493.491,00</b>	<b>1.204.493.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Retribusi Sewa Kios	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.069.377.869,33</b>	<b>4.857.128.419,33</b>	<b>(1.787.750.550,00)</b>	<b>(36,81)</b>

Penjelasan:

- a. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan Pasien Umum disajikan sebagai Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya disajikan pada Lain-Lain PAD yang sah;
- b. Sebagai tindak lanjut atas piutang yang sudah masuk kategori macet, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 akan menyusun Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang;
- c. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas atas klaim dana Non Kapitasi dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 107. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Puskesmas Bagu	0,00	22.112.000,00
2	Piutang Puskesmas Batujai	56.988.750,00	28.812.500,00
3	Piutang Puskesmas Batunyala	0,00	33.800.000,00
4	Piutang Puskesmas Batu Jangkih	0,00	0,00
5	Piutang Puskesmas Bonjeruk	52.276.100,00	9.177.000,00
6	Piutang Puskesmas Darek	63.625.100,00	0,00
7	Piutang Puskesmas Ganti	0,00	33.798.800,00
8	Piutang Puskesmas Kopang	0,00	39.875.000,00
9	Piutang Puskesmas Kuta	0,00	36.438.800,00
10	Piutang Puskesmas Langko	0,00	149.140.600,00
11	Piutang Puskesmas Mangkung	195.437.000,00	149.451.800,00
12	Piutang Puskesmas Mantang	0,00	116.015.600,00
13	Piutang Puskesmas Mujur	0,00	22.576.800,00
14	Piutang Puskesmas Muncan	37.929.000,00	24.882.000,00
15	Piutang Puskesmas Pengadang	0,00	39.592.000,00
16	Piutang Puskesmas Penujak	38.304.400,00	0,00
17	Piutang Puskesmas Pringgarata	0,00	30.184.000,00
18	Piutang Puskesmas Sengkol	0,00	100.075.000,00
19	Piutang Puskesmas Tanak Beak	0,00	0,00
20	Piutang Puskesmas Teratak	54.884.000,00	199.644.800,00
21	Piutang Puskesmas Teruwai	0,00	115.816.000,00
22	Piutang Puskesmas Ubung	0,00	213.914.200,00
23	Piutang Puskesmas Wajageseng	51.600.000,00	0,00
24	Piutang Puskesmas Praya	0,00	0,00
25	Piutang Puskesmas Puyung	0,00	0,00
26	Piutang Puskesmas Aikmual	0,00	0,00
27	Piutang Puskesmas Janapria	0,00	0,00
28	Piutang Puskesmas Aik Darek	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>551.044.350,00</b>	<b>1.365.306.900,00</b>

- d. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 108. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang UTD pada RSI YATOFA	344.820.000,00	399.810.000,00
2	RS Mandalika	51.412.000,00	71.330.000,00
3	RS Cahaya Medika	22.089.000,00	0,00
4	RS Adikarsa	11.138.000,00	0,00
5	RS Anggoro	16.933.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>446.392.000,00</b>	<b>471.140.000,00</b>

- e. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp51.260.000,00 dan Rp0,00. Piutang ini bersumber pada fasilitas pelayanan pembuangan akhir yang dikelola oleh UTD Persampahan;
- f. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp293.247.045,00 dan Rp293.247.045,00. Nilai Piutang posisi per 31 Desember 2024 masih sama dengan posisi per 31 Desember 2023. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai Tahun 2024 sudah tidak lagi menjadi objek pendapatan retribusi daerah setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut.

- a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024 senilai bruto Rp522.940.983,33 terdiri dari Piutang Retribusi sewa Tanah senilai Rp473.415.983,33 dan Piutang Retribusi sewa Tanah dan Bangunan Rp49.525.000,00.
- b. Piutang Retribusi Sewa Tanah merupakan kontribusi atas sewa Tanah pemerintah yang berada di Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp473.415.983,33 dan Rp1.473.415.983,33 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 109. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Sewa Tanah (Bruto)**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sewa Tanah Komplek Orient	300.114.583,33	300.114.583,33
2	Sewa Tanah Terminal Praya	58.000.000,00	58.000.000,00
3	Sewa Tanah Kompleks Pertokoan Praya	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Sewa Tanah Batu Bungus	150.000,00	150.000,00
5	Sewa Tanah Pasar Sengkol	180.000,00	180.000,00
6	Sewa Tanah Pasar Mujur Dalam	3.600.000,00	3.600.000,00
7	Sewa Tanah Pasar Mujur Luar	1.500.000,00	1.500.000,00
8	Sewa Tanah Pasar Bonjeruk	230.000,00	230.000,00
9	Sewa Tanah Pasar Pengadang	780.000,00	780.000,00
10	Sewa Tanah -Pringgarata	3.264.000,00	3.264.000,00
11	Sewa Tanah Pasar Renteng	16.515.000,00	16.515.000,00
12	Sewa Tanah Pasar Sengkol Utara	320.000,00	320.000,00
13	Sewa Tanah Gudang Sinar Terang	0,00	0,00
14	Sewa Tanah Pasar Teratak	0,00	0,00
15	Sewa Tanah Pasar Tenganan	7.200.000,00	7.200.000,00
16	Sewa Tanah Di Pasar Selatan Pasar Puyung	500.000,00	500.000,00
17	Sewa Tanah Pasar Ubung	11.822.400,00	11.822.400,00
18	Sewa Tanah -Kauman	4.000.000,00	4.000.000,00
19	Sewa Tanah Kompleks BSI	36.200.000,00	36.200.000,00

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
20	Sewa Tanah Blakang Bioskop Praya	5.040.000,00	5.040.000,00
21	Sewa Tanah Warung Murah	0,00	0,00
22	PT Sinar Tiga Pilar-Raja Hotel	0,00	1.000.000.000,00
23	Sewa Tanah Kp Jawa - Rent Car	14.000.000,00	14.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>473.415.983,33</b>	<b>1.473.415.983,33</b>

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai bruto Rp49.525.000,00 dan Rp49.525.000,00. Piutang ini merupakan Sewa Rumah Dinas yang berlokasi di Kelurahan Leneng dan Praya. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan disebabkan karena tahun 2024 masih dalam proses pengalihan kewenangan pengelolaan retribusi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya akan diserahkan kepada SKPD yang mengelola aset tersebut.

- a. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.204.493.491,00 dan Rp1.204.493.491,00. Piutang ini bersumber dari pertokoan milik pemerintah daerah yang tersebar di Bulayak, Mantang, pusat pertokoan Praya dan lain-lain. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan disebabkan karena tahun 2024 masih dalam proses pengalihan kewenangan pengelolaan retribusi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya akan diserahkan kepada SKPD yang mengelola aset tersebut. Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada *Lampiran 6b*.

#### 5.3.1.1.2.3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

**Tabel 110. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

NO	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PT Bank NTB	0,00	11.301.134.268,00	(11.301.134.268,00)	(100,00)
2	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PT Jamkrida Bersaing	0,00	48.321.978,00	(48.321.978,00)	(100,00)
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PT BPR NTB	0,00	1.268.260.101,00	(1.268.260.101,00)	(100,00)
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PDAM	0,00	123.433.505,00	(123.433.505,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>(12.741.149.852,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, BUMD belum melaksanakan RUPS untuk tahun buku 2024. Sedangkan PD Air Minum Tirta Rinjani telah melakukan pembahasan terkait dengan pembagian dividen Tahun Buku 2024 dan telah disetujui oleh Bupati Lombok Tengah selaku pemilik sesuai Surat Nomor 500/08/EKO/2025, tanggal 17 Januari 2025. Dividen TB 2024 senilai Rp245.080.750,00 yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum disajikan sebagai penambah piutang maupun penambah nilai investasi pada laporan ini karena peristiwa transaksinya terjadi di tahun 2025. Daftar Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada *Lampiran 6c*.

#### 5.3.1.1.2.4. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

Tabel 111. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

NO	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<b>Piutang Denda</b>					
1	<b>Keterlambatan Pekerjaan</b>		<b>375.457.600,77</b>	<b>375.457.600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pembangunan Kantor Camat	BPKAD	370.009.922,77	370.009.922,77	0,00	0,00
	Pembangunan Fasilitas Pariwisata	BPKAD	5.447.678,00	5.447.678,00	0,00	0,00
2	<b>Piutang Denda Pajak</b>	Bappenda	<b>96.065.539,74</b>	<b>96.065.539,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	Bappenda	8.751.826,36	8.751.826,36	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	Bappenda	12.063.713,38	12.063.713,38	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00
3	<b>Piutang Denda Retribusi</b>		<b>145.580.648,08</b>	<b>145.580.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Kolam Renang Praya	BPKAD	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Izin Mendirikan Bangunan	DPMPSTP	4.154.300,00	4.154.300,00	0,00	0,00
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	140.626.348,08	140.626.348,08	0,00	0,00
4	<b>Piutang BLUD</b>		<b>21.248.500.430,00</b>	<b>28.196.846.523,00</b>	<b>(6.948.346.093,00)</b>	<b>(24,28)</b>
	Jasa Pelayanan	RSUD	21.056.937.430,00	27.748.782.123,00	(6.691.844.693,00)	(24,12)
	Jasa Pelayanan	Dikes	55.563.000,00	374.064.400,00	(318.501.400,00)	(85,15)
	Kerja sama pihak ketiga	RSUD	136.000.000,00	74.000.000,00	62.000.000,00	83,78
5	<b>Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>		<b>176.481.990,00</b>	<b>198.221.081,00</b>	<b>(21.739.091,00)</b>	<b>(11,23)</b>
	Piutang Keterlanjuran Pembayaran Gaji Pegawai yang Pensiun/Pindah/Meninggal	BPKAD	171.772.390,00	193.511.481,00	(21.739.091,00)	(11,23)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	ESF	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.709.600,00	4.709.600,00	0,00	0,00
6	<b>Piutang Bagi Hasil dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara</b>	BPKAD	<b>0,00</b>	<b>53.627.524.520,33</b>	<b>(53.627.524.520,33)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>22.042.086.208,59</b>	<b>82.639.695.912,92</b>	<b>(60.597.609.704,33)</b>	<b>(73,33)</b>

Penjelasan:

1. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan per 31 Desember 2024 dan per 2023 masing-masing senilai Rp375.457.600,77 dan Rp375.457.600,77 selama tahun 2024 tidak ada penyetoran atas piutang pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
2. Piutang Pendapatan denda Pajak per 31 Desember 2024 dan per 2023 masing-masing senilai Rp96.065.539,74 dan Rp96.065.539,74 terdiri dari:
  - Piutang denda pajak hotel senilai Rp8.751.826,36 pada beberapa objek pajak hotel, Piutang Denda Pajak hotel merupakan piutang atas masa pajak Tahun 2022. Selama Tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang pajak hotel;
  - Piutang Denda Pajak Restoran dan sejenis senilai Rp12.063.713,38. Piutang Denda Pajak Restoran dan sejenis merupakan piutang atas masa pajak Tahun 2022. Selama Tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang pajak denda Pajak Restoran dan Sejenis; dan
  - Piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan pada Bapenda senilai Rp75.250.000,00 merupakan piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan PPAT senilai Rp86.500.000,00 telah tertagih senilai Rp11.250.000,00. Sehingga masih tersisa Rp75.250.000,00.
3. Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp145.580.648,08 dan Rp145.580.648,08. Rincian Piutang Denda Retribusi sebagai berikut.
  - Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi senilai Rp140.626.348,08. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ini merupakan piutang atas masa retribusi Tahun 2022, tidak terdapat penambahan dan pengurang piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara selama Tahun 2024, hal ini disebabkan karena Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bukan lagi Objek Pendapatan Retribusi setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang merupakan atas pengelolaan Kolam Renang Praya senilai Rp800.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun pengurangan piutang Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah Kolam Renang Praya selama Tahun 2024; dan
  - Piutang Denda Persetujuan Bangunan Gedung atas Keterlambatan Penyetoran PBG senilai Rp4.154.300,00 selama tahun 2024 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang denda Persetujuan Bangunan Gedung.
4. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari Piutang BLUD dari Jasa Layanan dan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 112. Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan BLUD)**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	<b>Piutang BLUD dari Jasa Layanan</b>	<b>21.112.500.430,00</b>	<b>28.122.846.523,00</b>
2	<b>BLUD RSUD</b>	<b>21.056.937.430,00</b>	<b>27.748.782.123,00</b>
3	<b>BLUD Puskesmas</b>	<b>55.563.000,00</b>	<b>374.064.400,00</b>
4	Puskesmas Praya	0,00	29.209.000,00
5	Puskesmas Puyung	55.563.000,00	79.949.000,00
6	Puskesmas Aikmual	0,00	0,00
7	Puskesmas Janapria	0,00	52.565.400,00
8	Puskesmas Aik Darek	0,00	212.341.000,00
9	<b>Piutang BLUD dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga</b>	<b>136.000.000,00</b>	<b>74.000.000,00</b>
10	BLUD RSUD	136.000.000,00	74.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.248.500.430,00</b>	<b>28.196.846.523,00</b>

Piutang BLUD dari Kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2024 senilai Rp136.000.000,00 merupakan pendapatan BLUD RSUD Praya yang bersumber dari hasil pengelolaan lahan parkir RSUD Praya dan Kerjasama Pemanfaatan Gedung RSUD Praya untuk penempatan ATM dengan Pihak Ketiga.

5. Piutang atas kelebihan pembayaran gaji per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp176.481.990,00 dan Rp198.221.081,00. Piutang ini terdiri dari:
  - Lebih bayar gaji pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp6.709.600,00 kepada ESF, ST NIP.1986XXXXXX2 010 Pangkat III/c yang pindah ke Pemerintah Provinsi NTB. Lebih bayar tersebut timbul karena pembayaran gaji harusnya sudah dihentikan per Agustus 2018 sesuai dengan SKPP Nomor 991/209/SKPP/2019 tanggal 30 Juli 2018 namun masih dibayarkan hingga bulan Oktober 2018. Atas kelebihan bayar bulan Agustus 2018 telah diterima di Kas Daerah. Terhadap Piutang tersebut, yang bersangkutan telah menyetor senilai Rp2.000.000,00 pada tanggal 21 Januari 2019 namun sejak Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 tidak ada penyetoran sehingga per 31 Desember 2024 masih tersisa senilai Rp4.709.600,00; dan
  - Piutang atas kelebihan bayar gaji pada beberapa pegawai yang telah memasuki masa pensiun per 31 Desember 2024 senilai Rp171.772.390,00 dari posisi saldo awal senilai Rp193.511.481,00 tertagih sepanjang 2024 senilai Rp148.372.707,00 dan penambahan piutang pegawai tahun 2024 senilai Rp126.633.616,00.
6. Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp53.627.524.520,33 menurun sebesar Rp53.627.524.520,33 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2023, penurunan ini disebabkan karena belum adanya Laporan Keuangan atau berita acara pembagian atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara sampai dengan laporan keuangan ini disajikan. Penjelasan terhadap pembayaran piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a) Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun Buku 2020 dan Tahun Buku 2021 senilai Rp15.488.053.333,33. Pengakuan Piutang ini berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat pembahasan teknis pembayaran tagihan keuntungan bersih pemerintah pusat (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri) dan pemerintah daerah Provinsi NTB dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) pada tanggal 13 Agustus 2023. Terhadap nilai Piutang tersebut pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) telah melakukan penyetoran ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp16.143.889.520,00 pada tanggal 19 Februari 2024. Terdapat selisih nilai yang ditetapkan pada saat rekonsiliasi dengan nilai yang

- disetorkan sebesar Rp655.836.186,67 hal ini disebabkan karena perbedaan nilai kurs rupiah terhadap dolar pada saat pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah;
- b) Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun Buku 2022 senilai \$2.470.333 atau setara dengan Rp38.139.471.187,00 dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp15.439,00. Pengakuan piutang atas pembagian laba bersih dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara tahun buku 2022 didasarkan pada berita acara rekonsiliasi nomor 974/305A/BAPENDA/2024 tanggal 25 April 2024. Pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara melakukan pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 25 Juni 2024 senilai Rp40.456.643.541,00;
  - c) Piutang atas Bagi Hasil Laba Bersih dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun Buku 2023 belum disajikan di LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang disebabkan karena pada saat penyusunan LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) belum menyajikan laporan keuangan yang terpublikasi sebagai dasar perhitungan pembagian keuntungan bersih masing-masing daerah provinsi/kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat, namun pada tanggal 19 Desember 2024 PT Amman Mineral Nusa Tenggara melakukan pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah atas Bagi Hasil Laba Bersih TB 2023 senilai Rp17.689.069.400,00 sehingga jumlah penerimaan dari Bagi Hasil Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun 2024 sebesar Rp74.289.602.461,00;
  - d) Pembagian Laba Bersih dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara kepada Pemerintah Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota seluruh Nusa Tenggara Barat Tahun Buku 2024 didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada hari senin 5 Mei 2025. Laba Bersih Dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk Tahun Buku 2024 sebesar 14.373.460 USD, dan atas nilai tersebut belum disajikan sebagai piutang dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah karena Pelaksanaan Rekonsiliasi dilaksanakan dan ditandatangani pada Tahun 2025.

Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dan Daftar Mutasi Piutang BLUD RSUD dapat dilihat pada *Lampiran 6d* dan *Lampiran 6e*.

#### 5.3.1.1.2.5. Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

**Tabel 113. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	1.907.732.718,00	3.393.242.351,00	(1.485.509.633,00)	(43,78)
2	Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.532.434.816,00	4.079.446.127,00	(1.547.011.311,00)	(37,92)
3	Piutang PBH – PBBKB	8.169.381.124,00	3.028.326.929,00	5.141.054.195,00	169,77
4	Piutang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	7.404.426,00	7.289.615,00	114.811,00	1,57
5	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.616.953.084,00</b>	<b>10.508.305.022,00</b>	<b>2.108.648.062,00</b>	<b>20,07</b>

Penetapan nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Maret 2025, sedangkan saldo Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp10.508.305.022,00 diterima di Kas Daerah pada tanggal 13 Februari 2024 senilai Rp3.684.759.792,00 dan pada tanggal 4 Maret 2024 senilai Rp6.823.545.230,00.

Daftar Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 6f*.

#### 5.3.1.1.2.6. Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut.

**Tabel 114. Rincian Piutang Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	114.037.000,00	0,00	114.037.000,00	100,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa /Uang Muka Kerja CV AY	63.712.000,00	63.712.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>177.749.000,00</b>	<b>63.712.000,00</b>	<b>114.037.000,00</b>	<b>178,99</b>

- Nilai Piutang Lainnya senilai Rp114.037.000,00 merupakan pengembalian Kurang Volume Pekerjaan sebanyak 21 Paket Pekerjaan yang sudah lunas di Tahun 2025 dan sudah memiliki SKTJM; dan
- Saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp63.712.000,00 terdiri dari Piutang Lainnya-Uang Muka Kerja CV AY atas Pekerjaan Pengadaan Uji Kincup (*side slip*) senilai Rp53.757.000,00 dan jaminan pelaksanaan senilai Rp9.955.000,00 pada Dinas Perhubungan. Sejak tahun 2021 hingga 31 Desember 2024 atau laporan ini disajikan belum tertagih.

Daftar Mutasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 6g*.

#### 5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian penyisihan piutang sebagai berikut.

**Tabel 115. Rincian Penyisihan Piutang**

NO	Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Netto	Lampiran
1	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>124.106.434.773,99</b>	<b>54.161.634.997,02</b>	<b>69.944.799.776,97</b>	<b>Lampiran 6a</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>86.378.017.612,07</b>	<b>51.785.777.032,68</b>	<b>34.592.240.579,39</b>	<b>Lampiran 6a</b>
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	33.693.750,00	1.037.718,75	32.656.031,25	Lampiran 6a
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	22.596.200,00	112.981,00	22.483.219,00	Lampiran 6a
	Penyisihan Piutang PBBP2	86.321.727.662,07	51.784.626.332,93	34.537.101.329,14	Lampiran 6a
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>3.069.377.869,33</b>	<b>2.375.857.964,34</b>	<b>693.519.904,99</b>	<b>Lampiran 6b</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Netto	Lampiran
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan				
	Kesehatan-Pelayanan	997.436.350,00	345.327.860,00	652.108.490,00	Lampiran 6b
	Kesehatan di Tempat Pelayanan				
	Kesehatan Lainnya yang Sejenis				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara				
	Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara	293.247.045,00	293.247.045,00	0,00	Lampiran 6b
	Telekomunikasi				
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	Tanah dan Bangunan	49.525.000,00	49.525.000,00	0,00	Lampiran 6b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah				
	Tanah	473.415.983,33	473.415.983,34	(0,01)	Lampiran 6b
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan				
	Pelayanan Persampahan	51.260.000,00	9.848.585,00	41.411.415,00	Lampiran 6b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
	Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	0,00	Lampiran 6b
	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan				
	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>22.042.086.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.042.086.208,59</b>	<b>Lampiran 6d</b>
	<b>Penyisihan Piutang dana bagi hasil Pajak</b>	<b>12.616.953.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616.953.084,00</b>	<b>Lampiran 6f</b>
2	<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>177.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.749.000,00</b>	<b>Lampiran 6g</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>124.284.183.773,99</b>	<b>54.161.634.997,02</b>	<b>70.122.548.776,97</b>	

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan penyisihan piutang pendapatan sebagaimana terdapat dalam lampiran 6a dan 6b

#### 5.3.1.1.4 Beban dibayar dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban dibayar dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa dibayar dimuka dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 116. Beban dibayar dimuka

No	SKPD	Pekerjaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kominfo	Langganan Broadband Internet selama 1 Tahun (rinc sesuai Kontrak)	264.800.000,00	271.972.000,00	(7.172.000,00)	(2,64)
2	Dinas Kominfo	Sewa Hosting (Dedicated Hosting B- lomboktengahkab.go.id)	0,00	7.083.333,33	(7.083.333,33)	(100,00)
3	RSUD	Beban Dibayar Dimuka-Bunga Pinjaman Lembaga Keuangan Bank	101.851.932,53	0,00	101.851.932,53	100,00
4	SETDA	Sewa Colocation Server LPSE	31.250.000,00	18.750.000,00	12.500.000,00	66,67
		<b>Jumlah</b>	<b>397.901.932,53</b>	<b>297.805.333,33</b>	<b>100.096.599,20</b>	<b>33,61</b>

Penjelasan:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp794.400.000,00 berdasarkan Surat Pesanan kepada PT Hipermet Indodata nomor 027/159/DISKOMINFO/2024 tanggal 1 Mei tahun 2024 untuk Langganan Broadband Internet selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2025. Atas penyediaan bulan Januari sampai dengan 30 April 2025 dicatat sebagai beban dibayar dimuka senilai Rp264.800.000,00;
2. Sekretariat Daerah atas pembayaran sewa *Colocation Server LPSE* sesuai dengan Bukti Kuitansi Pengadaan Barang Nomor 04.3/SPK-BPBJ/2024 senilai Rp75.000.000,00 pada PT Optimus Teknologi Pro. Jasa diterima selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai tanggal 09 Mei 2024 hingga 08 Mei 2025. Sehingga terdapat beban dibayar dimuka atas periode 1 Januari sampai dengan 08 Mei 2025 senilai Rp31.250.000,00; dan
3. BLUD RSUD atas Pembayaran Bunga pinjaman jangka pendek kepada Bank BSI untuk periode 30 Desember 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 senilai Rp101.851.932,53 yang sudah dibayarkan pada saat pencairan dana pinjaman per tanggal 30 Desember 2024.
4. Rincian Perhitungan Beban dibayar dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

### 5.3.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut.

**Tabel 117. Persediaan**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.644.000,00	0,00
2	Bahan-Isi Tabung Gas	4.944.556,00	70.046.788,00
3	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran/alat Kesehatan habis pakai	11.610.060.252,60	0,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	39.173.945,00	1.035.869.147,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	605.499.209,00	482.032.433,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	286.967.730,00	0,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	424.627,00	0,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
9	Obat-Obatan	19.026.688.655,41	9.555.923.257,00
10	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.924.262.275,00
11	Natura dan Pakan-Pakan	0,00	00,00
12	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	00,00
13	Bibit Ternak	38.820.000,00	68.934.400,00
14	Bibit Tanaman	0,00	0,00
15	Bahan-bahan Baku	22.577.912,00	21.617.384,00
16	Bahan-bahan lainnya	142.334.232,00	4.245.768.039,00
17	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga - Jaga	984.592.503,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.775.727.622,01</b>	<b>21.404.453.723,00</b>

Penjelasan:

1. Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya;
2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan

- pada RSUD Kabupaten Lombok Tengah serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
3. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Hibah Barang Habis Pakai dari Pemerintah Provinsi NTB berupa Barang Persediaan Non Alat dan Obat Kontrasepsi senilai Rp18.279.166.192,59, Alat dan Obat Kontrasepsi senilai Rp2.301.554.304,00 dan Hibah Berupa Blangko KTP senilai Rp753.468.000,00;
  4. Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga–Jaga senilai Rp984.592.503,00 merupakan persediaan dalam bentuk beras pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp874.508.853,00 dan Persediaan Bahan Makanan untuk penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp110.083.650,00 yang sebelumnya disajikan pada Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
  5. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki persediaan yang kondisinya kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan Neraca 31 Desember 2024 pada RSUD Praya berupa Obat-obatan senilai Rp11.144.635,00;
  6. RSUD Praya pada Tahun 2023 melaksanakan pemusnahan/penghapusan Obat-obatan yang kedaluwarsa/rusak Tahun 2018 s.d. 2022 dengan Berita Acara Pemusnahan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang Kadaluwarsa/Rusak Nomor 445.6/DIR/278/RSUDP/2023 tanggal 8 Februari 2023 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan/hapuskan sebesar Rp101.939.555,00;
  7. Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 melaksanakan pemusnahan/penghapusan Obat-obatan yang kedaluwarsa/rusak bulan Januari s.d. November 2024 dengan Berita Acara Pemusnahan Obat dan BMHP Nomor 400.7.20/1645/KES/2024 tanggal 25 November 2024 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan/hapuskan sebesar Rp99.694.762,00; dan
  8. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan nilai persediaan per SKPD sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 8**.

### 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

**Tabel 118. Investasi Jangka Panjang**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	143.047.444.147,13	140.158.906.519,13	2.888.537.628,00	2,06
<b>Jumlah</b>		<b>143.047.444.147,13</b>	<b>140.158.906.519,13</b>	<b>2.888.537.628,00</b>	<b>2,06</b>

### 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non Permanen sebagai berikut.

**Tabel 119. Daftar Investasi Non Permanen**

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024			31 Desember 2023
			Saldo Investasi	Penyisihan	Investasi Netto	
1	Perkuatan Permodalan Koperasi	Diskop	5.713.421.999,67	5.713.421.999,67	0,00	5.743.021.999,67
2	Revolving Tembakau	Distani	344.605.000,00	344.605.000,00	0,00	344.605.000,00
3	LEPP-M3 Bilelendo	Disikan	284.598.300,00	284.598.300,00	0,00	284.598.300,00
4	Kredit Modal Usaha Kelembagaan	Distani	281.282.000,00	281.282.000,00	0,00	281.282.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024			31 Desember 2023
			Saldo Investasi	Penyisihan	Investasi Netto	
5	Lahan Marginal	Distani	494.505.000,00	494.505.000,00	0,00	494.505.000,00
6	Sapi Fetening	Distani	111.462.500,00	111.462.500,00	0,00	111.462.500,00
7	SKIM Kredit TKI	Disnaker	1.367.799.230,00	1.367.799.230,00	0,00	1.367.799.230,00
8	GAKIN PD-BPD	DPMD	3.589.641.397,00	3.589.641.397,00	0,00	3.589.641.397,00
9	Kelompok Tani Makmur	Bag Ekonomi	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
10	DBH-CHT	Bag Ekonomi	13.771.900.000,00	13.771.900.000,00	0,00	13.771.900.000,00
Jumlah			26.107.215.426,67	26.107.215.426,67	0,00	26.136.815.426,67

Penjelasan:

1. Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa Dana Bergulir merupakan bagian dari investasi non permanen yang merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan UKM;
2. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa dana bergulir disajikan berdasarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/NRV*). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Dari Sepuluh jenis Investasi Jangka Panjang non Permanen dalam bentuk dana bergulir hanya Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM dalam Bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi yang masih aktif atau masih bisa di tagih, sisanya masuk kategori macet; dan
4. Pada Tahun 2024 Dana Bergulir dalam bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi terdapat pengembalian pokok nilai investasi sebesar Rp29.600.000,00.

Rincian Perhitungan NRV Investasi Non Permanen dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

### 5.3.1.2.2. Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Permanen sebagai berikut.

**Tabel 120. Daftar Investasi Permanen / Penyertaan Modal**

No	Uraian	% Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	PDAM Lombok Tengah	100%	Ekuitas	69.797.444.147,13	66.908.906.519,13	2.888.537.628,00	4,32
2	PT Bank NTB	7,12%	Biaya	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0	0
3	PT BPR NTB	7,99%	Biaya	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	0	0
4	PT Jamkrida NTB	3,05%	Biaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	0
Jumlah				143.047.444.147,13	140.158.906.519,13	2.888.537.628,00	2,06

Penjelasan:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Lombok Tengah. Penggunaan metode mengacu pada porsi kepemilikan pada BUMD sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - b. Kepemilikan 20% sampai 50%. atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan
  - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
2. Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah adalah 100%. maka metode penilaian penyertaan modal pada PDAM dinilai dengan metode ekuitas (*Equity Method*). Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 (*audited*), jumlah ekuitas dana PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp69.797.444.147,13, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp69.797.444.147,13. Terdapat peningkatan nilai ekuitas/kekayaan bersih pada PDAM sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00009/3.0395/AU.2/11/0822-3/IV/2025 tanggal 30 April 2025 senilai Rp2.888.537.628,00 peningkatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 121. Nilai investasi pada PDAM Tirta Ardia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah**

No	Uraian	Nilai
1	Modal Hibah	931.496.865,00
2	Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	87.453.419.283,00
3	Akumulasi Kerugian Tahun sebelumnya	(21.209.833.917,87)
4	Laba/Rugi Tahun Berjalan	2.622.361.917,00
<b>Jumlah</b>		<b>69.797.444.147,13</b>

3. PT Bank NTB Syariah  
Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah dinilai dengan metode biaya senilai Rp60.000.000.000,00 yang merupakan akumulasi penyetoran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Bank NTB Syariah sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak menambah penyertaan modal di PT Bank NTB Syariah;
4. PT BPR NTB  
Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 7,99% pada PT BPR NTB sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp12.250.000.000,00.;
5. PT JAMKRIDA NTB BERSAING  
Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,05% pada PT JAMKRIDA NTB BERSAING sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp1.000.000.000,00. Sedangkan jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada beberapa BUMD per 31 Desember 2024 dengan rician sebagai berikut.

**Tabel 122. Daftar Modal di Setor**

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2024	Modal Disetor per 31 Desember 2023
1	PDAM	Perda No 4 Tahun 2016	97.963.243.900,31	87.453.419.283,31	87.453.419.283,31
2	PT Bank NTB	Perda No 4 Tahun 2016	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2024	Modal Disetor per 31 Desember 2023
3	PD BPR NTB	Perda No 4 Tahun 2016	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00
4	PT Jamkrida	Perda No 4 Tahun 2016	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah			172.213.243.900,31	160.703.419.283,31	160.703.419.283,31

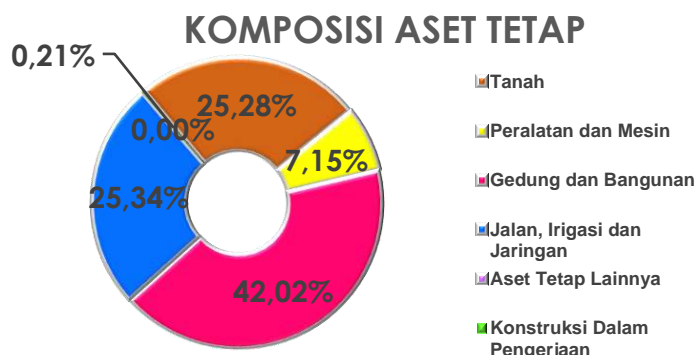
Daftar Nilai Investasi Permanen dan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

### 5.3.1.3. Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 123. Daftar Nilai Aset Tetap**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	913.866.030.409,53	917.940.216.235,00	(4.074.185.825,47)	(0,44)
2	Peralatan dan Mesin	848.040.000.440,25	747.774.262.151,13	100.265.738.289,12	13,41
3	Gedung dan Bangunan	1.828.258.831.779,79	1.683.053.352.731,47	145.205.479.048,32	8,63
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.357.145.716.776,02	2.320.284.343.457,03	36.861.373.318,99	1,59
5	Aset Tetap Lainnya	97.256.168.835,23	97.037.733.358,23	218.435.477,00	0,23
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.528.505.993,00	1.772.954.850,00	5.755.551.143,00	324,63
<b>Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan</b>		<b>6.052.095.254.233,82</b>	<b>5.767.862.862.782,86</b>	<b>284.232.391.450,96</b>	<b>4,93</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(2.339.469.829.142,01)	(2.121.200.141.321,01)	(218.269.687.821,00)	10,29
<b>Jumlah Bersih</b>		<b>3.712.625.425.091,81</b>	<b>3.646.662.721.461,85</b>	<b>65.962.703.629,96</b>	<b>1,81</b>



Penjelasan:

- Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD.
- Sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Bahwa Aset dinilai berdasarkan Biaya perolehan yaitu sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut

dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Salah satu kriteria dalam pengakuan aset tetap di antaranya nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kapitalisasi BMD, dimana Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:
  - Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin, alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00;
  - Pengelura untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00;
  - Pengeluaran untuk buku bacaan yang sama atau lebih dari Rp100.000,00; dan
  - Sedangkan Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak ditetapkan batas nilai kapitalisasi.
4. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan.
5. Penatausahaan dan Pelaporan BMD Kabupaten Lombok Tengah menggunakan aplikasi SIMDA BMD, namun dalam penerapannya SIMDA BMD masih belum diupdate terkait dengan implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang penatausahaan BMD, sehingga pada tahun 2024 telah dimulai tahap awal penerapan E BMD yaitu tahapan kordinasi dan konsultasi tentang penerapan E BMD dan pengisian *templete* data base BMD untuk bahan migrasi data dari SIMDA BMD ke E BMD, sehingga kedepannya penatausahaan dan Pelaporan BMD lebih valid.
6. Pada Tahun 2024 masih terdapat empat ruas tanah yang masih dalam proses penilaian nilai oleh Tim Penilai Pemerintah Daerah.
7. Nilai aset tetap yang diperoleh di Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki jaminan pemeliharaan yang belum dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.873.862.335,09 yang terdiri dari 135 paket pekerjaan dengan penerbit jaminan rincian dijelaskan pada *lampiran 12c*. Lembaga Penjamin pengadaan barang dan jasa dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 124. Daftar Lembaga Penjamin Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Lembaga Penjamin	Jumlah Paket Pekerjaan	Nilai
1	PT Asuransi Umum Bumida 1967	72	738.334.430,09
2	PT Asuransi Umum Videi	4	539.965.640,00
3	PT Jamkrida NTB Bersaing Penjamin	59	2.595.562.265,00
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>	<b>3.873.862.335,09</b>

#### 5.3.1.3.1. Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 125. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Tanah	913.866.030.409,53	917.940.216.235,00	(4.074.185.825,47)	(0,44)

Penjelasan:

1. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 126. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>917.940.216.235,00</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Hibah	313.512.965,00
2	Apraisal Nilai Aset Tetap	5.168.223.000,00
3	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD	6.293.172.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>11.774.907.965,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Hibah Aset Tetap Tanah	9.555.921.121,47
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD	6.293.172.000,00
3	Koreksi Pembulatan Nilai SIMDA BMD	669,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>15.849.093.790,47</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>913.866.030.409,53</b>

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai aset tetap tanah sebagai berikut:
- Penambahan aset tetap tanah yang bersumber dari penerimaan hibah Aset Tetap Tanah senilai Rp313.512.965,00 yang berasal dari:
    - Kampus Politeknik Pariwisata senilai Rp57.512.965,00 yang tercatat pada Sekretariat Daerah berupa tanah Gedung Pendidikan Desa Puyung; dan
    - Hibah dari PT Perumnas Mataram berupa tanah kosong Jalan Sono Keling Perumnas Tampar-ampar luas 1.000,00 m2 senilai Rp128.000.000,00 dan tanah kosong di jalan Trembesi Perumnas Tampar-ampar senilai Rp128.000.000,00 yang tercatat di Dinas PUPR.
  - Penambahan dari *Appraisal dan* Taksiran Nilai Aset Tetap Tanah Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan yang masih memiliki Nilai Rp0,00 untuk menyusun Neraca Pemerintah Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 127. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Nilai *Appraisal***

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>3.272.605.000,00</b>
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Lendang Jangkrik senilai Rp61.184.000,00	61.184.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Jago senilai Rp14.400.000,00	14.400.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Jago senilai Rp28.800.000,00	28.800.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru Montong Terep senilai Rp21.600.000,00	21.600.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Semparu senilai Rp51.200.000,00	51.200.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Dasan Jontak senilai Rp15.840.000,00	15.840.000,00
	Rumah Dinas Guru SDN Karang Tengah senilai Rp9.000.000,00	9.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Bare Paok senilai Rp1.400.000,00	1.400.000,00
	Tanah rumah Dinas Guru SDN Ketangan senilai Rp4.000.000,00	4.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Mentokan senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN 2 Ungga senilai Rp9.576.000,00	9.576.000,00
	Tanah Lapangan Puyung (Sanggar Kegiatan Belajar) SKB senilai Rp2.717.920.000,00	2.717.920.000,00
	Tanah TK Negeri Pringgarata senilai Rp103.000.000,00	103.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Sundil senilai Rp4.050.000,00	4.050.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Bodak senilai Rp9.990.000,00	9.990.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Bodak senilai Rp3.645.000,00	3.645.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Bodak senilai Rp9.000.000,00	9.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Pringgarata Barat senilai Rp15.232.000,00	15.232.000,00

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Kekalik senilai Rp6.750.000,00	6.750.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Jontlak senilai Rp9.000.000,00	9.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Selebung senilai Rp16.000.000,00	16.000.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Kopang Rembiga senilai Rp97.850.000,00	97.850.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru Montong Gamang senilai Rp35.640.000,00	35.640.000,00
	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Lingkung senilai Rp24.528.000,00	24.528.000,00
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>55.400.000,00</b>
	Tanah Pustu Perina, Pustu Mertak Tombok dan Poskesdes Lajut	55.400.000,00
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>268.500.000,00</b>
	Tanah	268.500.000,00
<b>4</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>1.514.518.000,00</b>
	Tanah Rumdis Tiga Dara, Tanah Rumdis Sebelah Timur Aero Hotel, Tanah Balai Karya, Tanah Belakang Sinar Terang, Tanah Belakang Kantor Desa Aik Bukak, Tanah Bangunan Sanggar Seni Desa Sukara	1.514.518.000,00
<b>5</b>	<b>Kantor Camat Praya</b>	<b>57.200.000,00</b>
	Tanah Kantor Lurah Renteng	32.000.000,00
	Tanah Kantor Lurah Gonjak	25.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.168.223.000,00</b>

c. Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 128. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Mutasi Antar SKPD**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>90.020.000,00</b>	
	Tanah eks SMPN 3 Praya di Aikmual	90.020.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>2</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>6.050.000.000,00</b>	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Jalan Ahmad Yani Praya	510.000.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Tertutup Eks Gedung Koni	590.000.000,00	Sekretariat Daerah
	Tanah Bangunan Sarana Olahraga Terbuka Jln. Diponegoro Praya /Alun-alun Tastura	4.950.000.000,00	Sekretariat Daerah
<b>3</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>153.152.000,00</b>	
	Tanah Eks Pasar Kuta	153.152.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>Jumlah</b>		<b>6.293.172.000,00</b>	

3. Mutasi pengurangan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

a. Hibah Aset Tetap Tanah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 129. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Hibah**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Intansi Penerima
<b>1</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>367.200.000,00</b>	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah/ Depan Kantor Bupati SK Bupati Nomor 380.a Tahun 2024 tgl 09 September 2024	367.200.000,00	Kwartir Pramuka Lombok Tengah
<b>2</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>9.188.721.121,47</b>	
	Tanah Kebun Percobaan/ Belakang Puskesmas Ketejer SK Bupati Nomor 371.a Tahun 2024 Tgl 29 September 2024	9.188.721.121,47	KPU Kabupaten Lombok Tengah
<b>Jumlah</b>		<b>9.555.921.121,47</b>	

- b. Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD senilai Rp6.293.172.000,00, penjelasan rinciannya sebagaimana pada Tabel 128 di atas.
  - c. Hasil pembulatan nilai SIMDA BMD senilai Rp669,00.
4. Nilai aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp913.866.030.409,53 atau sebanyak 2.018 Persil yang telah bersertifikat sebanyak 1.064 Persil, sehingga masih terdapat 954 Persil yang masih belum memiliki sertifikat, sedangkan aset tetap tanah yang berstatus sengketa per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 130. Aset Tetap Tanah dalam status sengketa**

No	Nama Aset	Luas M2	Nilai	Permasalahan saat ini	Tindaklanjut	Keterangan
1	Tanah Rumah Dinas Guru SDN Sedo Desa Sengkol Kecamatan Pujut	1.391,81	50.105.160,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Pemda Menang pada pengadilan TK I namun ahli Waris mengajukan Banding
2	Tanah Puskesmas Aik Darek	2.934,00	300.000.000,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Masih Berproses di Pengadilan
3	Tanah BPP Lajut			Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Gugatan di Tolak
4	Tanah Pasar Selong Belanak			Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Mediasi antara pemda dengan ahliwaris terkait cara perolehan
5	Tanah Pertanian di Desa Beber Kecamatan Pringgarata	99.620,00	1.992.400.000,00	Diklaim Ahli Waris	Mediasi Oleh Dinas Pertanian	
<b>Jumlah</b>		<b>103.945,81</b>	<b>2.342.505.160,00</b>			

Rincian mutasi tambah kurang dan penyesuaian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 11a*.

### 5.3.1.3.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 131. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	848.040.000.440,25	747.774.262.151,13	100.265.738.289,12	13,41

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan.
2. Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 132. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	747.774.262.151,13
II	Penambahan	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal	91.727.573.671,12
2	Nilai Taksiran	297.480,00
3	Mutasi antar SKPD	555.406.000,00
4	Reklasifikasi Antar KIB	4.718.617.817,00
5	Aset yang yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa	7.842.390.214,00
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.737.050,00
7	Aset Tetap Yang diperoleh dai Hibah	0,00
8	Koreksi akibat pembulatan Sistem SIMDA BMD	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>105.084.022.232,12</b>
<b>III Pengurangan</b>		
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke masyarakat	191.268.399,00
2	<i>Extracomptable</i>	2.076.814.251,00
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	1.914.139.000,00
4	Reklas ke KIB Lainnya	73.054.293,00
5	Mutasi antar SKPD	555.406.000,00
6	Kurang Volume Pekerjaan	7.602.000,00
7	Koreksi akibat pembulatan Sistem SIMDA BMD	0,00
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>4.818.283.943,00</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>848.040.000.440,25</b>

3. Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan dari Belanja Modal pada semua SKPD senilai Rp91.727.573.671,12 merupakan nilai belanja modal peralatan dan mesin pada LRA tahun 2024;
- Nilai Taksiran merupakan penambahan nilai aset tetap yang sebelumnya bernilai Nol berupa Kubus Plastik di SDN Selong Belanak senilai Rp260.000,00 dan Alat-alat Kesehatan senilai Rp37.480,00 pada PKM Teratak; dan
- Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 133. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun/Muatasi antar SKPD 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
1	<b>Dinas Pertanian</b>	<b>385.906.000,00</b>	
	Mutasi Kendaraan dinas Roda 4 merek Nissan Grand Livina	208.583.000,00	BKAD
	Mutasi Kendaraan dinas Roda 4 Open Cup merek Toyota Hilux VVT-1	177.323.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	<b>Kecamatan Praya</b>	<b>169.500.000,00</b>	
	Mutasi Kendaraan dinas Roda 4 Open Cup merek Daihatsu Grand Max	169.500.000,00	BKAD
<b>Jumlah</b>		<b>555.406.000,00</b>	

- Reklas Antar KIB Aset pada dua SKPD yaitu:

**Tabel 134. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Reklas antar KIB Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.364.660.817,00</b>	
	Perabotan Rehab Ruang Kelas, Perabotan Ruang Perpustakaan, Perabotan Ruang Laboratorium IPA, Perabotan Ruang UKS (Meja sisiwa, Bangku/kursi siswa, meja dan kursi guru, lemari, papan tulis/white board).	1.364.660.817,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
2	<b>Dinas PUPR</b>	<b>2.984.083.000,00</b>	
	Vidotron <i>Ballroom</i> Kantor Bupati	2.984.083.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
3	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>31.500.000,00</b>	
	Papan Nama Kantor	31.500.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
4	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>180.539.000,00</b>	
	Bangku taman	146.506.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Papan interpretasi kawasan dan rambu petunjuk arah	34.033.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
5	<b>Sek DPRD</b>	<b>157.835.000,00</b>	
	Space Papan Baliho	157.835.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
<b>Jumlah</b>		<b>4.718.617.817,00</b>	

- e) Terdapat reklasifikasi dari belanja barang/jasa ke aset peralatan dan mesin senilai Rp7.842.390.214,00 dengan kondisi bahwa aset tersebut memenuhi nilai kapitalisasi sebagai aset tetap. Nilai reklasifikasi barang/jasa ke aset tetap peralatan dan mesin terdapat pada perangkat daerah.

**Tabel 135. Rincian Reklasifikasi Barang/Jasa Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>8.135.464,00</b>	
	1 Unit Genset	8.135.464,00	Dikapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin/ Genset
2	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>7.834.254.750,00</b>	
	Peralatan Komputer, Alat-alat Kedokteran Umum	7.834.254.750,00	Dikapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin
<b>Jumlah</b>		<b>7.842.390.214,00</b>	

- f) Mutasi penambahan aset tetap yang bersumber dari utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp239.737.050,00 berupa pengadaan meubelair pada SDN 1 Lajut senilai Rp195.890.000,00 yang dilaksanakan oleh CV CAA, Pengadaan meubelair Perpustakaan senilai Rp32.820.000,00 yang dilaksanakan oleh CV EH dan Pengadaan 1 unit kamera senilai Rp11.027.050,00 pada dinas Pendidikan dan kebudayaan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024;
4. Pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp4.818.283.943,00 dengan penjelasan sebagai berikut.
- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi unsur penambah nilai aset tetap dan direklas sebagai Beban Barang habis pakai berupa alat kebersihan dan Barang diserahkan kepada Masyarakat karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi ataupun karena barang yang berasal dari belanja modal namun masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pada beberapa SKPD yaitu:

**Tabel 136. Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang Jasa Tahun 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
	Belanja Non Aset Berupa Aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Bidang Kebudayaan)	50.000.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
	Belanja Non Aset Berupa Aplikasi (SIM) Bidang SMP	50.000.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
2	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>46.446.799,00</b>	
	Bahan kimia di PKM Kuta berupa <i>handsanitizer</i> dan handuk bayi	46.446.799,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
3	<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>29.572.600,00</b>	
	Perban 20 unit	29.572.600,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
4	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>9.999.000,00</b>	
	Pembuatan Jasa Web Sisterlapor	9.999.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
5	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>5.250.000,00</b>	
	Belanja Non Aset berupa APD Karyawan Sestra Tepung Tapioka	5.250.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
<b>Jumlah</b>		<b>191.268.399,00</b>	

- b) Penyesuaian dari Belanja Modal tahun berjalan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi nilai aset tetap dan masuk sebagai kategori barang *extracomptable* pada beberapa SKPD:

**Tabel 137. Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.775.173.295,00
2	Dinas Kesehatan	168.136.884,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.917.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.425.000,00
5	Danas Lingkungan Hidup	123.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	432.000,00
7	Sekretariat Daerah	20.950.000,00
8	Kantor Camat Praya	27.672.072,00
9	Kantor Camat Janapria	23.690.000,00
10	Kantor Camat Jonggat	10.100.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	8.693.000,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	350.000,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24.152.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.076.814.251,00</b>

- c) Pengurangan karena Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan pada beberapa SKPD yaitu:

**Tabel 138. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / hibah ke sekolah swasta</b>	<b>1.672.739.000,00</b>
	130 Set Meja dan Kursi Siswa senilai Rp99.480.000,00	99.480.000,00
	<i>Wireless</i> ke Desa Beleka senilai Rp194.505.000,00	194.505.000,00
	247 Set Meja dan Kursi Siswa Senilai Rp189.012.000,00 kepada Yayasan Ihya Ulumuuddin Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.	189.012.000,00
	Kepada Yayasan Nurul Alimin berupa 124 Set Meja dan Kursi Siswa dan Meja.	189.778.000,00
	Kursi siswa senilai Rp49.964.000,00 ke Mts Nurul Haq Karang Bejelo Kelurahan Gonjak.	49.964.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
	Alat peraga praktik sekolah <i>interactive flat panel</i> LBR65XSCM ke sekolah Swasta senilai Rp950.000.000,00.	950.000.000,00
2	<b>Dinas Kesehatan/ Klinik swasta</b>	<b>93.400.000,00</b>
	Alat Kesehatan	93.400.000,00
3	<b>Sekretariat Daerah/ Yayasan Datok Lopan</b>	<b>148.000.000,00</b>
	Kendaraan Dinas Roda 4 DR.602 V Hibah ke Yayasan Keluarga Datok Lopan Desa Muncan Kecamatan Kopang	148.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.914.139.000,00</b>

d) Reklas Antar KIB pada dua SKPD:

**Tabel 139. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke KIB Lainnya Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>69.986.800,00</b>	
	Berugak/Gazebo).	62.786.800,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Sumur BOR	7.200.000,00	Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)
2	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.067.493,00</b>	
	Terali	3.067.493,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
<b>Jumlah</b>		<b>73.054.293,00</b>	

- e) Mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD senilai Rp555.406.000,00 penjelasannya sama dengan mutasi tambah aset peralatan dan mesin antar SKPD.
- f) Kurang volume atas penyelesaian pekerjaan Tahun 2024 senilai Rp7.602.000,00 berupa pengadaan peralatan interior Rumah Dinas Wakil Bupati Lombok Tengah.
- g) Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran I1b*.

### 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 140. Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.828.258.831.779,79	1.683.053.352.731,47	145.205.479.048,32	8,63

Penjelasan:

- Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straigh Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
- Rincian penyusunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 141. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai
I	<b>Saldo Awal</b>	<b>1.683.053.352.731,47</b>
II	<b>Penambahan</b>	
1	Belanja Modal	142.704.330.558,54
2	Nilai Taksiran	5.113.293.051,00
3	Aset yang diperoleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	297.869.000,00
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	65.854.293,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	8.095.561.560,00
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar SKPD	15.345.452.771,00
9	Koreksi	0,17
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>171.622.361.233,71</b>
III	<b>Pengurangan</b>	
1	Kurang Volume Pekerjaan	595.537.000,00
2	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Utang Kepada Pihak Ketiga	229.399.000,00
3	Mutasi antar SKPD	15.345.452.771,00
4	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	1.573.043.758,00
5	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	6.272.940.719,00
6	Extracomptable	112.036.800,00
7	Tidak memenuhi Kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	70.200.000,00
8	Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lainnya/ Aset Yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Atas Aset Gedung dan Bangunan yang dibongkar belum dihapus	2.218.272.137,00
9	Koreksi	0,39
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>26.416.882.185,39</b>
IV	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.828.258.831.779,79</b>

3. Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp142.704.330.558,54 pada beberapa SKPD (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di penjelasan pos-pos LRA); dan
- Penambahan dari *Appraisal dan* Taksiran Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan yang masih memiliki Nilai Rp0,00 untuk menyusun Neraca Pemerintah Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 142. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari nilai taksiran**

No	Perangkat Daerah/Nama Aset	Nilai
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
	berupa Bangunan Gedung Kantor Lain-lain WC SDN Papak senilai Rp15.065.736,00	15.065.736,00
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Pengembur senilai Rp169.583.386,56	169.583.386,56
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 3 Rembitan senilai Rp172.418.422,68	172.418.422,68
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Barelantan senilai Rp156.045.321,60	156.045.321,60
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Semundal senilai Rp191.723.932,68	191.723.932,68
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Pengengat senilai Rp151.204.090,24	151.204.090,24
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 2 Teruwai senilai Rp166.940.346,16	166.940.346,16
	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen SDN 2 Teruwai senilai Rp111.701.613,24	111.701.613,24
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen SMPN 3 Praya Timur senilai Rp204.649.338,66	204.649.338,66
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Masjuring senilai Rp98.316.365,62	387.194.360,40
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Masjuring senilai Rp98.316.365,62	98.316.365,62
	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen SDN Masjuring senilai Rp17.363.656,80	17.363.656,80
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen SDN 2 Tengari senilai Rp194.950.952,28	194.950.952,28



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Punik senilai Rp232.127.385,00	232.127.385,00
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Kekere senilai Rp226.639.056,00	226.639.056,00
	Bangunan Gedung Perpustakaan PermanenSDN 4 Praya senilai Rp202.879.320,00	202.879.320,00
	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen SDN 2 Tengari senilai Rp110.347.893,04	110.347.893,04
	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen SDN Punik senilai Rp119.522.664,80	119.522.664,80
	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen SDN Kekere senilai Rp109.779.022,08	109.779.022,08
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 2 Lendang Kunyit senilai Rp204.811.385,16	204.811.385,16
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Penimpoh senilai Rp216.478.733,16	216.478.733,16
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 2 Jembe senilai Rp207.728.222,16	207.728.222,16
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Sisik Timur senilai Rp187.692.008,82	187.692.008,82
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Bagu senilai Rp237.938.806,71	237.938.806,71
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Puspalaya senilai Rp130.807.283,52	130.807.283,52
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 2 Pejangka senilai Rp153.039.232,70	153.039.232,70
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 1 Pejangka senilai Rp144.187.774,70	144.187.774,70
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN 1 Nyerot senilai Rp132.286.654,70	132.286.654,70
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Batutulis senilai Rp177.121.305,21	177.121.305,21
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SDN Manggong senilai Rp169.031.362,70	169.031.362,70
	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen SDN 1 Bunkate senilai Rp113.717.417,62	113.717.417,62
<b>Jumlah</b>		<b>5.113.293.051,00</b>

- c. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa Pemeliharaan Bangunan dan Gedung senilai Rp297.869.000,00 pada Kantor Camat Praya berupa Berupa Pembangunan Gedung dan Bangunan Badan Keamanan Kelurahan di Kelurahan Perapen Senilai Rp35.100.000,00 dan Rehab Gedung dan Bangunan Kantor Lurah Leneng Senilai Rp262.769.000,00 yang dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja barang dan jasa.
- d. Penambahan dari Reklasifikasi antar jenis aset tetap pada dua SKPD sebagai berikut.

**Tabel 143. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi antar KIB Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>62.786.800,00</b>	
	Beragak/Gazebo).	62.786.800,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
2	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.067.493,00</b>	
	Terali	3.067.493,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
<b>Jumlah</b>		<b>65.854.293,00</b>	

- e. Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari perolehan aset dari pihak ketiga senilai Rp8.095.561.560,00 merupakan belanja atas beberapa paket kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Gedung dan bangunan sekolah pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 desember 2024 belum dibayar kepada pihak ketiga;
- f. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD pada beberapa SKPD sebagai berikut.

**Tabel 144. Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
1	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>	<b>12.462.288.652,00</b>	
	Gedung Olahraga Tertutup (GOR KONI)	12.462.288.652,00	Pindahan dari Dinas PUPR
2	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>2.883.164.119,00</b>	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
	Bangunan Gedung Terbuka Permanen/ Bencingah	135.070.000,00	Sekretariat Daerah
	Bangunan Kantor Pemerintahan Jalan Ahmad Yani Praya	1.401.202.119,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bangunan Kantor Pemerintahan/Tembok Pembatas Jalan Ahmad Yani Praya	32.350.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bangunan Kantor Permanen Penataan Halaman/paving Block Jalan Ahmad Yani Praya	59.810.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bangunan Kantor Pemerintahan Permanen Jalan Ahmad Yani Praya	165.175.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bangunan Gedung Permanen/ Pos Jaga Jalan Ahmad Yani Praya	23.940.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Gedung Bangunan Permanen /Penataan Bencingah	1.065.617.000,00	Dinas PUPR
	<b>Jumlah</b>	<b>15.345.452.771,00</b>	

- g. Koreksi senilai Rp0,17 merupakan hasil pembulatan nilai SIMDA BMD.
4. Mutasi Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp26.416.882.185,39 dengan penjelasan sebagai berikut.
- a. Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan atas kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 145. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kurang Volume Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2024**

No	Uraian Pekerjaan	SKTJM	Kekurangan Volume
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>			<b>83.211.000,00</b>
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Negeri Nyampe Praya Timur (PDTT)	ada	4.028.000,00
2	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya (PDTT)	ada	3.144.000,00
	SD Negeri 3 Gerunung	ada	
3	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri Mumbang (PDTT)	ada	2.531.000,00
4	Rehab Ruang Kelas Beserta Perabotnya SMPN 1 Pujut	ada	2.207.000,00
5	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 1 Pujut	ada	870.000,00
6	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pujut	ada	2.380.000,00
7	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SMPN 1 Praya	tidak ada	10.826.000,00
8	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN Mertak Umbak	tidak ada	2.828.000,00
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SDN Mertak Umbak	tidak ada	6.946.000,00
10	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDN Mertak Umbak	tidak ada	7.447.000,00
11	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 2 Sengkol	tidak ada	10.107.000,00
12	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 2 Sengkol	tidak ada	2.107.000,00
13	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDN 2 Sengkol	tidak ada	1.243.000,00
14	Rehab Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 2 Sengkol	tidak ada	1.751.000,00
15	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 2 Sengkol	tidak ada	2.464.000,00
16	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN Waker	tidak ada	15.653.000,00

No	Uraian Pekerjaan	SKTJM	Kekurangan Volume
17	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDN Waker	tidak ada	1.086.000,00
18	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN Waker	tidak ada	1.425.000,00
19	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN Waker	tidak ada	2.051.000,00
20	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN Waker	tidak ada	2.117.000,00
<b>Dinas Pariwisata</b>			<b>38.068.000,00</b>
1	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Tastura - Penanaman Rumput	ada	6.072.000,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Tastura - Gazebo	ada	5.458.000,00
3	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Media Tanam	ada	6.484.000,00
4	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Plaza/Area Pengunjung	ada	5.408.000,00
5	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Plaza Kuliner	ada	3.099.000,00
6	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Toilet dan Perlengkapannya	ada	9.568.000,00
7	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Kios Kuliner	ada	1.979.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>			<b>36.460.000,00</b>
1	Pembangunan Gedung PKM Pringggarata	ada	12.376.000,00
2	Pembangunan Gedung PKM Teruwai	ada	10.954.000,00
3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan PKM Teruwai	ada	13.130.000,00
<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>			<b>43.661.000,00</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana KIHT Tahap III	tidak ada	43.661.000,00
<b>RSUD</b>			<b>394.137.000,00</b>
	Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap	tidak ada	388.569.000,00
	Pembangunan Ruang Cathlab dan Cytotoxic	tidak ada	5.568.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>595.537.000,00</b>

- b. Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan bangunan yang sudah diakui tahun sebelumnya dan dibayarkan Tahun 2024 sehingga harus disesuaikan penyajiannya senilai Rp229.399.000,00 pada Dinas Kesehatan atas Rehab Pembangunan Puskesmas.
- c. Dihilangkan ke masyarakat/Instansi Lainnya senilai Rp1.573.043.758,00 pada beberapa SKPD ke Instansi Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 146. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Aset Gedung dan Bangunan yang Dihilangkan Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
1	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / hibah ke sekolah swasta</b>	<b>189.702.550,00</b>
	Pembayaran Pengawasan Penataan Halaman Ponpes Darul Qur'an Masigit Dsn Montong Tanggak dan MI Uswatun Hasanah Cempaka Putih senilai Rp8.995.600,00.	8.995.600,00
	Pembayaran Retensi (10%) Pembangunan PAUD di Desa Batunyalu Kecamatan Praya Tengah senilai Rp161.096.650,00.	161.096.650,00
	Pembayaran Termin I dan II (90%) Pembangunan RKB PAUD Mekarsari Dusun Pepao Barat Desa Lekor Kecamatan Janapria senilai Rp19.610.300,-	19.610.300,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
<b>2</b>	<b>Dinas Sosial/ Hibah Ke Pramuka</b>	<b>811.110.000,00</b>
	Bangunan Kantor Pemerintah/ Depan Kantor Bupati	811.110.000,00
<b>3</b>	<b>Dinas Pertanian/Hibah KPU</b>	<b>572.231.208,00</b>
	Gedung dan Bangunan keswan ketejer kelurahan praya	572.231.208,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.573.043.758,00</b>

Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke akun aset tetap lainnya pada Beberapa SKPD diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 147. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi antar aset tetap Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.517.555.719,00</b>	
	Reklas Ke Peralatan dan Mesin berupa Perabotan Rehab Ruang Kelas, Perabotan Ruang Perpustakaan, Perabotan Ruang Laboratorium IPA, Perabotan Ruang UKS (Meja siswa, Bangku/kursi siswa, meja dan kursi guru, lemari, papan tulis/ <i>white board</i> ).	1.364.660.817,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Reklas ke Aset Lainnya (Rusak Berat) senilai Rp152.894.902,00 berupa penilaian Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen SDN 2 Medas.	152.894.902,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke Aset Lainnya Rusak/Berat
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>211.945.000,00</b>	
	Reklas ke D Berupa Perencanaan pemeliharaan sumur Bor PKM Batujai	211.945.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke (KIB D) Jalan Jembatan dan Jaringan
<b>3</b>	<b>Dinas PUPR</b>	<b>2.984.083.000,00</b>	
	Vidiotron <i>Ballroom</i> Kantor Bupati	2.984.083.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke KIB B Peralatan dan Mesin
<b>4</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>31.500.000,00</b>	
	Papan Nama Kantor	31.500.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke KIB B Peralatan dan Mesin
<b>5</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>1.370.022.000,00</b>	
	Bangku taman	146.506.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke KIB B Peralatan dan Mesin
	Papan interpretasi kawasan dan rambu petunjuk arah	34.033.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke KIB B Peralatan dan Mesin
	Reklas ke D berupa pembuatan trotoar / jalur pejalan kaki senilai 647.541.000, pembuatan jalan dalam kawasan senilai 398.210.000, dan pembuatan talut taman aik bukak senilai 143.732.000	1.189.483.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke (KIB D) Jalan Jembatan dan Jaringan
<b>6</b>	<b>Sek DPRD</b>	<b>157.835.000,00</b>	
	Space Papan Baliho	157.835.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke KIB B Peralatan dan Mesin
<b>Jumlah</b>		<b>6.272.940.719,00</b>	

d. Reklas ke *extracomtable* senilai Rp112.036.800,00 pada beberapa SKPD yaitu:

**Tabel 148. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan *extracomtable* Tahun 2024**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.786.800,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.600.000,00
3	Kantor Camat Jonggat	9.650.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>112.036.800,00</b>

- e. Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap berupa belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 149. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa belanja barang dan jasa Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
<b>1</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>45.950.000,00</b>
	Barang yang diserahkan kemasyarakat berupa perencanaan sumur bor posyandu Desa Montong Terep senilai Rp3.600.000,00	3.600.000,00
	Pengawasan penataan sarana dan prasarana lingkungan Poskestren Desa Mangkung senilai Rp4.800.000,00	4.800.000,00
	Pengawasan dan perencanaan pembangunan Poskestren Nidaurrahman Bebie Desa Mekar Damai senilai Rp14.000.000,00	14.000.000,00
	Konsultan perencanaan posyandu Dusun Jelajok Desa Kopang Rembiga senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Perencanaan rehab posyandu lingkungan Tengari senilai Rp1.650.000,00	1.650.000,00
	Perencanaan pembangunan posyandu Desa Perina senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Perencanaan pembangunan posyandu Bolor Gejek Desa Pandan Indah Praya Barat Daya senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Penrencanaan pembangunan posyandu Rege Desa Pandan Indah Praya Barat Daya senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Perencanaan penyediaan air bersih di lingkungan Poskestren Pemantek Janapria senilai Rp3.900.000,00	3.900.000,00
	Perencanaan pembangunan posyandu Desa Selebung Rembiga senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
	Perencanaan pembangunan posyandu Nangker Desa Pandan Indah senilai Rp3.000.000,00	3.000.000,00
<b>2</b>	<b>Kantor Camat Praya Tengah</b>	<b>24.250.000,00</b>
	Non aset berupa konsultan perencanaan dan pengawasan yang terdiri dari honor kegiatan yang bangunan fisik berada pada barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa jalan/ trotoar	24.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>70.200.000,00</b>

- f. Senilai Rp2.218.272.137,00 merupakan Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain/ Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah atas aset Gedung dan Bangunan Puskesmas Teruwai dan Puskesmas Pringgarata yang dibongkar namun belum dihapus dengan nilai masing-masing Rp1.103.003.747,00 dan Rp1.115.268.390,00.
- g. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada RSUD senilai Rp0,39.
- h. Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada *Lampiran 11c*.

#### 5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 150. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.357.145.716.776,02	2.320.284.343.457,03	36.861.373.318,99	1,59

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan metode garis lurus (*StraightLine Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan; dan
2. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 151. Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>2.320.284.343.457,03</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Belanja Modal	38.965.281.078,00
2	Utang Kepada Pihak Ketiga	316.954.384,00
3	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	1.408.628.000,00
4	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	2.129.000.000,00
5	Penerimaan Hibah	
6	Mutasi antar SKPD	
7	Nilai Taksiran	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>42.819.863.462,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.300.000,00
	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	5.799.849.143,00
	Tidak memenuhi Kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	1.517.000,00
	Kurang Volume Pekerjaan	151.824.000,00
	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0,01
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>5.958.490.143,01</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.357.145.716.776,02</b>

3. Mutasi Penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 senilai Rp42.819.863.462,00 diuraikan sebagai berikut.
  - a. Belanja Modal senilai Rp38.965.281.078,00 pada beberapa SKPD (rincian dapat dilihat pada penjelasan pos LRA-Belanja Modal);
  - b. Utang Belanja Modal atas selisih realisasi fisik dan Keuangan Pembangunan Jembatan Ngerapak Senilai Rp316.954.384,00; dan
  - c. Reklas jenis aset tetap pada tiga SKPD yaitu:

**Tabel 152. Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Mutasi antar aset Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>7.200.000,00</b>	
	Penambahan Reklas dari Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D) senilai Rp7.200.000,00 berupa Sumur Bor).	7.200.000,00	Reklas dari Peralatan dan Mesin (KIB B)
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>211.945.000,00</b>	
	Reklas dari Peralatan dan mesin Berupa Perencanaan pemeliharaan sumur Bor PKM Batujai	211.945.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke (KIB D) Jalan Jaringan dan Irigasi
<b>3</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>1.189.483.000,00</b>	
	Reklas ke D berupa pembuatan trotoar / jalur pejalan kaki senilai Rp647.541.000,00 pembuatan jalan dalam	1.189.483.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C) Ke (KIB D) Jalan Jaringan dan Irigasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
	kawasan senilai Rp398.210.000,00, dan pembuatan talud taman aik bukak senilai Rp143.732.000,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>1.408.628.000,00</b>	

- d. Penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa berupa pengadaan IPAL 1 unit senilai Rp2.129.000.000,00 pada RSUD Praya;
4. Mutasi pengurangan terhadap nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp5.958.490.143,01 bersumber dari:
  - a. Pembayaran utang belanja modal tahun 2023 di tahun 2024 sedangkan asetnya telah di catat pada tahun 2023 berupa konsultan pengawasan pembangunan Sumur Bor Pustu Bonder senilai Rp5.300.000,00;
  - b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan karena mutasi antar jenis aset tetap berupa Pembangunan Jembatan Ngerapak Kidang Desa Bangket Parak yang masih dalam konstruksi pengerjaan senilai Rp5.799.849.143,00;
  - c. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan karena tidak memenuhi Kriteria aset tetap yaitu belanja modal berupa seklar, balon lampu dan kabel pada Kantor Camat Janapria senilai Rp1.517.000,00; dan
  - d. Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 153. Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Kurang Volume Pekerjaan Tahun 2024**

No	Uraian Pekerjaan	SKTJM	Kekurangan Volume
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>140.833.000,00</b>
1	Peningkatan Saluran Sekunder Bedus DI. Mujur II PDTT	ada	4.831.000,00
2	Rehabilitasi Saluran BKL 6 - BKLB 1 DI. Kulem PDTT	ada	6.388.000,00
3	Rehabilitasi Saluran Sekunder Murbaya PDTT	ada	5.117.000,00
4	Peningkatan Saluran Inen Ratu PDTT	ada	6.132.000,00
5	Peningkatan Saluran Sekunder DI. Emb. Loang Maka PDTT	ada	13.968.000,00
6	Rehabilitasi Saluran Sekunder BMN 1 - BMN 2 DI. Mujur PDTT	ada	4.750.000,00
7	Rehabilitasi Saluran Sekunder Embung Pejeruk PDTT	ada	4.750.000,00
8	Rehabilitasi Saluran Sekunder BBN 1 - BBN 3 DI. Batu Ngapah PDTT	ada	4.750.000,00
9	Peningkatan Talud Eat Sungai Segala Anyar PDTT	ada	4.750.000,00
10	Pembangunan Dam Selak Aik Desa Aik Berik PDTT	ada	4.750.000,00
11	Rehabilitasi Dam Merobot PDD	ada	4.750.000,00
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Embung Batu Bokah	ada	16.263.000,00
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simbe	Tidak Ada	50.224.000,00
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Embung Bombas	Tidak Ada	9.410.000,00
<b>Dinas Pariwisata</b>			<b>10.991.000,00</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	Tidak Ada	6.400.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Jalan Dalam Kawasan	Tidak Ada	4.591.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>151.824.000,00</b>

- e. Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang disebabkan karena adanya koreksi senilai Rp0,01 pada dinas PUPR.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 11d*.

#### 5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 154. Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Lainnya	97.256.168.835,23	97.037.733.358,23	218.435.477,00	0,23

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 155. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>97.037.733.358,23</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Belanja Modal	10.513.658.618,00
2	Mutasi antar SKPD	0,00
3	Reklas Antar KIB	0,00
4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>10.513.658.618,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
2	Reklas Ke Aset Lain-lainnya	1.805.959.800,00
3	Ekstracomtabel	8.283.073.341,00
4	Hibah	206.190.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>10.295.223.141,00</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>97.256.168.835,23</b>

- Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp10.513.658.618,00 terdiri dari belanja modal (rincian dapat dilihat pada penjelasan pos LRA-Belanja Modal);
- Pengurangan nilai aset tetap lainnya senilai Rp10.295.223.141,00 terdiri dari:
  - Reklasifikasi aset tetap lainnya ke Aset Lain-Lain berupa Hewan Ternak kambing, sapi, ayam potong, itik dan lain-lain.
  - Barang *extracomtable* pada dua SKPD berupa buku pelajaran dan bahan bacaan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 156. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Berupa Barang *Extracomtable* Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.218.128.741,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.944.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.283.073.341,00</b>

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 11e*.

### 5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 157. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	7.528.505.993,00	1.772.954.850,00	5.755.551.143,00	324,63

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 158. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>1.772.954.850,00</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Reklas Dari aset jalan, jaringan dan jembatan atas realisasi belanja modal pembangunan jembatan ngerapak desa kidang tahun 2024	5.482.894.759,00
2	Utang Belanja Modal atas selisih realisasi fisik dan Keuangan Pembangunan Jembatan Ngerapak	316.954.384,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>5.799.849.143,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Kurang Volume atas Penyelesaian Pekerjaan	44.298.000,00
2	Reklas Antar KIB	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>44.298.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.528.505.993,00</b>

- Jembatan Ngerapak yang berlokasi di Bangket Parak Desa Kidang dibangun dengan sumber pendanaan PAD Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV PMP dengan Nomor Kontrak 620/114/PPK-BM/PAD/DPUPR/2024 masa kerja awal 210 hari kalender (14 Mei s/d 9 Desember 2024), Nilai Kontrak Rp7.041.370.000,00, dengan persentase realisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar 79,82%. Dalam pelaksanaannya Pihak Pelaksana telah tiga kali mengajukan Adendum, terakhir Adendum dengan masa pengerjaan 40 Hari (29 Januari 2025 sampai dengan 9 Maret 2025).

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 11f*.

### 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 159. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024**

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin	589.639.008.007,05	505.759.265.371,05	83.879.742.636,00	16,58
3	Gedung dan Bangunan	308.922.164.653,89	272.361.786.248,89	36.560.378.405,00	13,42
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.440.908.656.481,07	1.343.079.089.701,07	97.829.566.780,00	7,28
5	Aset Tetap Lainnya				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
6	KDP				
	<b>Jumlah</b>	<b>2.339.469.829.142,01</b>	<b>2.121.200.141.321,01</b>	<b>218.269.687.821,00</b>	<b>10,29</b>

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
2. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 160. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024**

No	Uraian	Nilai
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>2.121.200.141.321,01</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.027.742.636,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.481.162.703,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	97.829.566.780,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>219.338.472.119,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
1	Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan	148.000.000,00
2	Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihibahkan	427.487.194,00
3	Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan PKM Teruwai dan PKM Pringgarata yang dibongkar	493.297.104,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>1.068.784.298,00</b>
<b>IV</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.339.469.829.142,01</b>

#### 5.3.1.4. Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 161. Properti Investasi**

Uraian	Bentuk Kerjasama	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah BBI Gerunung	Sewa	43.116.000,00	43.116.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura	BGS	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika)	KSP	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sewa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient)	KSP	1.736.400.000,00	1.736.400.000,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya	KSP	18.417.825.383,00	18.417.825.383,00	0,00	0,00
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen.	KSP	4.640.000.004,00	4.640.000.004,00	0,00	0,00
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen: Komplek Toko Orient	KSP	999.899.994,00	999.899.994,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Nilai Perolehan</b>		<b>31.027.241.381,00</b>	<b>31.027.241.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		(5.641.088.895,00)	(5.193.847.139,00)	(447.241.756,00)	8,61
<b>Jumlah Nilai Netto Aset Properti Investasi</b>		<b>25.386.152.486,00</b>	<b>25.833.394.242,00</b>	<b>(447.241.756,00)</b>	<b>(1,73)</b>

Penjelasan:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bahwa Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan;
2. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Properti investasi dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
3. Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bahwa Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
4. Kerjasama Pemanfaatan dalam bentuk BGS atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT STP dengan Nomor Perjanjian 01/PTSP/KT.RK/X/2019 dengan jangka waktu Kerjasama selama 30 Tahun. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut Pihak Kedua akan memberikan Kontribusi dengan tahapan untuk tahun pertama yaitu 2019 dan 2020 sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yaitu pada masa Pembangunan tidak ada pemberian kontribusi. Pihak Kedua akan memberikan kontribusi pada tahun ketiga sejak ditandatangani perjanjian kerjasama yaitu tahun 2021 sebesar Rp700.000.000,00, dan tahun kedua beroperasi dan seterusnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00;
5. Dari nilai Aset Properti Investasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masih terdapat aset properti investasi yang kontribusinya pada peningkatan PAD dengan menggunakan tarif retribusi daerah, kedepannya akan disesuaikan dengan pola Kerjasama pemanfaatan/Sewa sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD, disamping itu masih terdapat aset properti investasi yang masih dalam proses Lelang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Tanah dan Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika);
6. Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2025 masing-masing senilai Rp6.969.516.000,00 dan Rp6.969.516.000,00. Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 terdiri dari:
  - a. Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura Senilai Rp5.000.000.000,00;
  - b. Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika) senilai Rp170.000.000,00;
  - c. Tanah BBI Gerunung Rp43.116.000,00;
  - d. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I Rp20.000.000,00;
  - e. Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient Rp1.736.400.000,00.
7. Properti Investasi Gedung dan Bangunan senilai Rp24.057.725.381,00 yang terdiri dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya senilai Rp18.417.825.383,00 dan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen senilai Rp5.639.899.998,00; dan
8. Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi  
Nilai beban penyusutan properti investasi tahun 2024 sebesar Rp447.241.756,00 sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.641.088.895,00.

**5.3.1.5. Dana Cadangan**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Cadangan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut.

**Tabel 161a. Daftar Dana Cadangan**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.3.1.6. Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 161b. Daftar Aset Lainnya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	9.529.420.079,83	7.361.364.250,76	2.168.055.829,07	29,45
2	Aset Tidak Berwujud	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
3	Aset Lain-lain	32.901.104.503,96	29.167.274.768,96	3.733.829.735,00	12,80
4	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	46.000.000,00	-	46.000.000,00	100,00
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	32.426.834.000,00	(32.426.834.000,00)	(100,00)
Jumlah		42.476.524.583,79	69.005.473.019,72	(26.528.948.435,93)	(38,44)

### 5.3.1.6.1. Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang/TGR per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang/TGR serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 162. Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9.529.420.079,83	7.361.364.250,76	2.168.055.829,07	29,45

Penjelasan:

1. Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang telah memiliki ketetapan/SKTJM;
2. Penyajian Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah didasarkan pada hasil rekonsiliasi jumlah nilai ketetapan dan jumlah nilai yang ditindaklanjuti dalam periode pelaporan dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 163. Daftar Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2024	Tambahan Selama Tahun 2024	Tindak Lanjut Selama Tahun 2024	Koreksi (-)	31 Desember 2023
1	PNS Non Bendahara	607.054.490,00	229.689.843,00	200.433.069,00	17.357.460,00	595.155.176,00
2	Pihak III	8.922.365.589,83	3.806.852.294,91	1.616.431.099,91	34.264.679,93	6.766.209.074,76
Jumlah		9.529.420.079,83	4.036.542.137,91	1.816.864.168,91	51.622.139,93	7.361.364.250,76

3. Dari nilai Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp9.529.420.079,83 terdapat nilai Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp617.383.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan Tahun 2024 yang belum diterbitkan SKTJM.

Mutasi rincian TGR dapat dilihat pada *Lampiran 12, 12a dan 12b*.

### 5.3.1.6.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak ada transaksi yang menyebabkan timbulnya pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, karena pada tahun 2023 nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga seluruhnya direklas menjadi aset properti investasi.

Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak III dapat dilihat dalam *Lampiran 13a dan 13b*.

#### 5.3.1.6.3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud (ATB) per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud (ATB) serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 164. Daftar Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)

Penjelasan:

- Saldo ATB per 31 Desember 2023 senilai Rp50.000.000,00 berupa aplikasi penerimaan peserta didik baru yang tidak memenuhi kriteria ATB sehingga direklas ke Aset Rusak Berat/aset dalam proses penghapusan.

#### 5.3.1.6.4. Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 165. Daftar Aset Lain-Lain**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	18.204.834.880,96	16.195.980.178,96	2.008.854.702,00	12,40
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	14.696.269.623,00	12.971.294.590,00	1.724.975.033,00	13,30
<b>Jumlah</b>		<b>32.901.104.503,96</b>	<b>29.167.274.768,96</b>	<b>3.733.829.735,00</b>	<b>12,80</b>

Penjelasan:

- Aset Rusak Berat/Usang
  - Nilai Aset rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.204.834.880,96 merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional Pemerintah Daerah. Aset Rusak Berat/Usang disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan;
  - Terdapat penambahan nilai aset rusak berat sebesar Rp2.008.854.702,00 yang terdiri dari reklas dari aset tetap Gedung dan bangunan berupa rumah negara gol II pada SDN medas dalam kondisi rusak berat senilai Rp152.894.902,00, Reklas dari Aset Tetap Lainnya Dinas Pertanian berupa bibit dan hewan ternak senilai Rp1.805.959.800,00 yang masih perlu identifikasi dan penelusuran lebih lanjut, dan reklas dari aset tidak berwujud pada dinas Pendidikan dan kebudayaan senilai Rp50.000.000,00 berupa aplikasi penerimaan siswa baru;
  - Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum melakukan proses pengusulan dan penghapusan terhadap aset dalam kondisi rusak/usang;
  - Rincian nilai bersih dan nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang sebagai berikut.

**Tabel 166. Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	<b>Aset Rusak Berat</b>	<b>59.676.219.397,70</b>	<b>57.667.364.695,70</b>	<b>2.008.854.702,00</b>	<b>3,48</b>
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(41.471.384.516,74)	(41.471.384.516,74)	0,00	0,00
<b>Aset Rusak Berat Netto</b>		<b>18.204.834.880,96</b>	<b>16.195.980.178,96</b>	<b>2.008.854.702,00</b>	<b>12,40</b>

e. Rincian Aset Rusak Berat per SKPD beserta nilai penyusutannya dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 167. Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat per SKPD**

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	24.967.288.404,17	10.771.795.222,39	14.195.493.181,78
2	Dinas Kesehatan	1.604.087.182,00	585.548.005,93	1.018.539.176,07
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.203.282.197,39	21.586.086.118,00	617.196.079,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	562.035.000,00	562.035.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	107.070.000,00	107.070.000,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	244.965.000,00	166.939.500,00	78.025.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	139.959.000,00	139.959.000,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	2.133.431.182,00	2.065.587.842,00	67.843.340,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.451.000,00	25.642.700,00	33.808.300,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pertanian	1.957.259.800,00	151.300.000,00	1.805.959.800,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.890.000,00	69.490.000,00	41.400.000,00
26	PPKD	0,00	0,00	0,00
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	3.522.285.925,97	3.616.001.592,97	(93.715.667,00)
30	Sekretariat DPRD	724.633.302,00	335.670.286,00	388.963.016,00
31	Kantor Camat Praya	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	0,00	0,00	0,00
33	Kantor Camat Praya Barat	0,00	0,00	0,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
35	Kantor Camat Praya Timur	0,00	0,00	0,00
36	Kantor Camat Pujut	3.800.000,00	2.345.835,00	1.454.165,00
37	Kantor Camat Janapria	71.564.000,00	57.017.440,00	14.546.560,00
38	Kantor Camat Kopang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
39	Kantor Camat Batukliang	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Camat Pringgarata	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
42	Kantor Camat Jonggat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
43	Inspektorat Daerah	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	152.700.000,00	152.700.000,00	0,00
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	257.923.404,17	222.601.974,45	35.321.429,72

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	379.470.000,00	379.470.000,00	0,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>59.676.219.397,70</b>	<b>41.471.384.516,74</b>	<b>18.204.834.880,96</b>

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Nilai sebesar Rp14.696.269.623,00 merupakan aset yang merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pihak Pihak Ketiga/Dihapus sesuai dengan mekanisme penghapusan BMD per 31 Desember 2024. Nilai tersebut di atas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 168. Daftar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>A Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah</b>					
1	Aset Dalam Proses TGR	477.071.922,00	477.071.922,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan aset dalam proses TGR	(51.938.214,00)	(51.938.214,00)	0,00	0,00
<b>Aset Lain-Lain Netto dalam Proses TGR</b>		<b>425.133.708,00</b>	<b>425.133.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	DED	2.246.212.600,00	2.246.212.600,00	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan DED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nilai Netto DED</b>		<b>2.246.212.600,00</b>	<b>2.246.212.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Aset dalam proses penghapusan	31.618.307.568,49	29.400.035.431,49	2.218.272.137,00	7,55
6	Aset dalam proses penghapusan berupa Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan	152.122.350,00	152.122.350,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset dalam proses penghapusan	(19.669.445.428,49)	(19.176.148.324,49)	(493.297.104,00)	2,57
8	Akumulasi Penyusutan Aset dalam proses penghapusan berupa Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan	(76.061.175,00)	(76.061.175,00)	0,00	0,00
<b>Aset dalam proses penghapusan Netto</b>		<b>12.024.923.315,00</b>	<b>10.299.948.282,00</b>	<b>1.724.975.033,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Netto</b>		<b>14.696.269.623,00</b>	<b>12.971.294.590,00</b>	<b>1.724.975.033,00</b>	<b>13,30</b>

Penjelasan:

1. Aset Dalam Proses TGR

Nilai Netto Aset Dalam Proses TGR per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai bersih Rp425.133.708,00 dan Rp425.133.708,00. Nilai ini merupakan aset dalam Proses TGR;

2. *Detail Engineering Design* (DED)

Nilai Netto DED yang merupakan bagian dari Aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.246.212.600,00 dan Rp2.246.212.600,00. Berikut rincian DED:

**Tabel 169. Daftar *Detail Engineering Design* (DED)**

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Perencanaan Pembangunan Kantor Disdik	Disdik	87.905.400,00	87.905.400,00
2	Perencanaan Penataan Halaman SMP 1 Praya Timur	Didik	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batunyala	Dikes	0,00	0,00
4	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batujangkih	Dikes	0,00	0,00
5	Perencanaan Pemb/pustu	Dikes	45.416.000,00	45.416.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
6	Perencanaan PJU	Dinas Perkim	91.979.000,00	91.979.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop BLK	Dinas Tenaga Kerja	154.030.800,00	154.030.800,00
8	Perencanaan Jalan Desa Bile Tengah	Dinas Perhubungan	31.650.000,00	31.650.000,00
9	Rehab Gedung Sekolah	BPBD	0,00	0,00
10	Rehab Jembatan Wage Ngolak	BPBD	0,00	0,00
11	Perencanaan Rehab Balai Penyuluh	Pertanian	79.952.400,00	79.952.400,00
12	Pembangunan Balai Penyuluh KB-Pratim	BP2KB	37.246.000,00	37.246.000,00
13	Perencanaan Mall Pelayanan Publik	PU-PR	1.712.033.000,00	1.712.033.000,00
Jumlah			2.246.212.600,00	2.246.212.600,00

Nilai DED tersebut Sebagian besar merupakan biaya perencanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang tidak jadi dilaksanakan mengingat adanya *refocusing*/efisiensi anggaran sehingga bangunan induknya tidak jadi dilaksanakan;

### 3. Aset Dalam Proses Penghapusan

Nilai Netto Aset Dalam Proses Penghapusan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai bersih Rp12.024.923.315,00 dan Rp10.299.948.282,00, Nilai Aset Dalam Proses Penghapusan per 31 Desember 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.

- Dari Nilai Aset Netto sebesar Rp12.024.923.315,00 terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.886.934.000,00 merupakan aset gedung yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Barabali sampai dengan 31 Desember 2024 SK Hibah masih dalam proses penetapan, dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan PKM Teruwai dan PKM Pringgarata senilai bersih Rp1.724.975.033,00 yang telah dibongkar namun belum dihapus dari Neraca Daerah;
- Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan Netto per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai bersih Rp76.061.175,00 dan Rp76.061.175,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sampai dengan pelaporan 31 Desember 2022 tidak bisa diidentifikasi wajib retribusinya sehingga harus direklas ke aset lain-lainnya, dan selanjutnya akan diproses untuk dihapus dari daftar pencatatan piutang retribusi; dan
- Nilai Netto Sebesar Rp8.336.953.107,00 merupakan Aset Dalam Proses Penghapusan yang terdapat pada beberapa SKPD yang masih dalam proses verifikasi dan identifikasi lebih lanjut terkait untuk dilakukan penghapusan.

#### 5.3.1.6.5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas yang dibatasi Penggunaannya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kas yang dibatasi Penggunaannya serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 170. Kas yang dibatasi Penggunaannya**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas yang dibatasi Penggunaannya/Uang Jaminan	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	100,00
Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya		46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	100,00

Penjelasan:

1. Berupa uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah areal parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan dilaporan realisasi anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sampai dengan perjanjian sewa tersebut berakhir dan dikembalikan ke pihak penyewa.

### 5.3.1.6.6. Dana Transfer – Dana Bagi Hasil TDF

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer- Dana Bagi Hasil TDF per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Transfer- Dana Bagi Hasil TDF serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 171. Daftar Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF	0,00	32.426.834.000,00	(32.426.834.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Netto TDF</b>	<b>0,00</b>	<b>32.426.834.000,00</b>	<b>(32.426.834.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Penjelasan:

1. Tidak terdapat transaksi Dana Transfer – Dana Bagi Hasil TDF pada tahun 2024, sedangkan Dana Transfer – Dana Bagi Hasil TDF Tahun 2023 sudah dilimpahkan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Rincian mutasi tambah/kurang Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 15a sampai dengan 15f**.

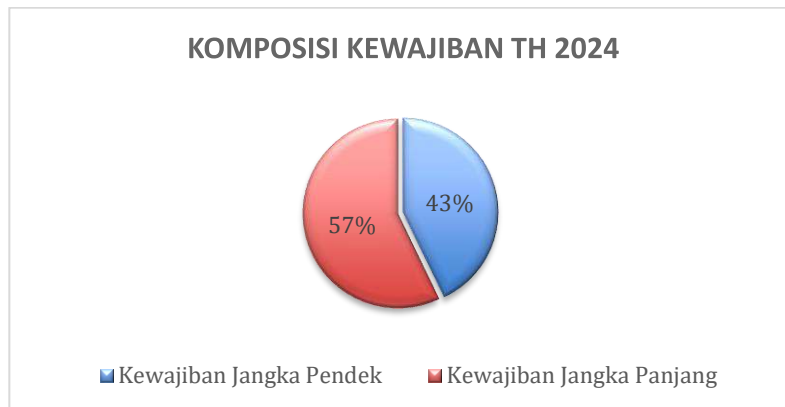
### 5.3.2. KEWAJIBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut.

**Tabel 173. Rincian Kewajiban**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	100.306.950.067,79	109.401.756.303,05	(9.094.806.235,26)	(8,31)
2	Kewajiban Jangka Panjang	133.697.947.150,00	164.878.644.490,00	(31.180.697.340,00)	(18,91)
	<b>Jumlah</b>	<b>234.004.897.217,79</b>	<b>274.280.400.793,05</b>	<b>(40.275.503.575,26)</b>	<b>(14,68)</b>

Komposisi perbandingan jumlah nilai kewajiban sebagaimana disajikan pada gambar diagram sebagai berikut.



#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut.

**Tabel 174. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	742.851.465,77	536.041.637,88	206.809.827,89	38,58

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Utang pinjaman dari Bank BUMN/Jangka pendek	4.950.317.300,00	0,00	4.950.317.300,00	100,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.180.697.340,00	20.787.131.560,00	10.393.565.780,00	50,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	738.647.818,00	940.647.012,58	(201.999.194,58)	(21,47)
5	Utang Belanja dan Transfer	62.648.436.144,02	87.137.936.092,59	(24.489.499.948,57)	(28,10)
6	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>100.306.950.067,79</b>	<b>109.401.756.303,05</b>	<b>9.094.806.235,26</b>	<b>8,31</b>

#### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 175. Daftar Utang PFK per SKPD Tahun 2024**

No	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.423.942,77	148.278.174,00	(95.854.231,23)	(64,64)
2	Dinas Kesehatan	13.180.433,00	98.341.140,88	(85.160.707,88)	(86,60)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	677.247.090,00	213.310.463,00	463.936.627,00	217,49
4	DPMD	0,00	70.048,00	(70.048,00)	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	76.041.812,00	(76.041.812,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>742.851.465,77</b>	<b>536.041.637,88</b>	<b>206.809.827,89</b>	<b>38,58</b>

Penjelasan:

1. Nilai sebesar Rp742.851.465,77 merupakan pajak pusat yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 oleh Bendahara Pengeluaran Lingkup SKPD Kabupaten Lombok Tengah selaku Wajib Pungut Pajak Pusat; dan
2. Nilai tersebut di atas telah dilimpahkan/disetorkan seluruhnya sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 ke RKUN.

Daftar Mutasi Utang PFK dapat dilihat pada *Lampiran 16a*.

#### 5.3.2.1.2. Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 176. Daftar Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank-Jangka Pendek**

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	4.950.317.300,00	0,00	4.950.317.300,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.950.317.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.317.300,00</b>	<b>100,00</b>

Penjelasan:

1. Pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Bank BSI KCP Praya Pada Tanggal 30 Desember 2024 senilai Rp4.950.317.300,00 Ke Rekening atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang ada di BSI KCP Praya dengan Nomor Rekening 7772214477;

2. Jangka waktu Pinjaman tersebut direncanakan selama tiga bulan (30 Desember 2024 s.d 30 Maret 2025) dengan pembebanan Bunga/Ujroh didepan sebesar Rp104.140.740,00 yang dicairkan pada tanggal 30 Desember 2024;
3. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk memenuhi likuiditas dan Pemenuhan Biaya Operasional BLUD RSUD Praya; dan
4. Selama Tahun 2024 Pihak RSUD Praya telah mencairkan dana pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 31 Desember 2024 untuk pemenuhan biaya operasional BLUD RSUD.

#### 5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 177. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	31.180.697.340,00	20.787.131.560,00	10.393.565.780,00	50,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.180.697.340,00</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>10.393.565.780,00</b>	<b>50,00</b>

Penjelasan:

1. Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 merupakan Bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan pada PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI;
2. Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp31.180.697.340,00 merupakan pembayaran pokok utang untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 masing-masing perbulannya senilai Rp2.598.391.445,00; dan
3. Perhitungan ini didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Utang antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT SMI.

#### 5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan diterima dimuka per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan diterima dimuka serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 178. Pendapatan Diterima Dimuka**

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-</b>						
<b>A</b>	<b>Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(30,77)</b>
1	Retribusi Sewa Tanah Desa Mantang	BPKAD	13.500.000,00	19.500.000,00	(6.000.000,00)	(30,77)
2	Retribusi Sewa Tanah Desa Aik Darek	BPKAD	13.500.000,00	19.500.000,00	(6.000.000,00)	(30,77)
<b>Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Perdagangan/Perusahaan</b>						
<b>B</b>	<b>Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung</b>		<b>286.109.750,01</b>	<b>213.909.416,67</b>	<b>72.200.333,34</b>	<b>33,75</b>
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-ATM Bank NTB Syariah- Kantor Bupati	BPKAD	13.500.000,00	27.000.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-ATM Bank NTB Syariah- PKM Kuta	BPKAD	10.687.500,00	17.437.500,00	(6.750.000,00)	(38,71)
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-UD C60	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - UD A	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi pemakaian kekayaan daerah PT AK	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi pemakaian kekayaan daerah RM T	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Tanah Y	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Kolam Ikan	Dislutkan	20.833.333,33	20.833.333,33	0,00	0,00
9	Retribusi Sewa Tanah Jln Jend Sudirman-Warung Murah	BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Sewa Toko IB	BPKAD	8.487.333,33	11.999.333,33	(3.512.000,00)	(29,27)
11	Retribusi Sewa Toko emas A	BPKAD	3.264.916,67	4.615.916,67	(1.351.000,00)	(29,27)
12	Lain-Lain PAD yg sah Sewa Lahan ATM Mandiri	RSUD	5.062.500,00	0,00	5.062.500,00	100,00
13	Lain-Lain PAD yg sah Sewa Lahan ATM NTB	RSUD	0,00	5.250.000,00	(5.250.000,00)	(100,00)
14	Sewa Tanah Gelondong Kelurahan Panjisari	BPKAD	0,00	3.833.333,33	(3.833.333,33)	(100,00)
15	Sewa Tanah Lahan ATM Bank NTB	BPKAD	35.833.333,33	45.833.333,33	(10.000.000,00)	(21,82)
16	Sewa Tanah Milik Pemkab Lombok Tengah, Jln. Jendral Sudirman Semayan	BPKAD	7.520.000,00	9.440.000,00	(1.920.000,00)	(20,34)
17	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence</i> (POP) Container Infrastruktur Internet	BPKAD	13.416.666,66	16.916.666,66	(3.500.000,00)	(20,69)
18	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence</i> (POP) Container Infrastruktur Internet	BPKAD	13.416.666,67	16.916.666,67	(3.500.000,00)	(20,69)
19	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence</i> (POP) Container Infrastruktur Internet	BPKAD	13.416.666,67	16.916.666,67	(3.500.000,00)	(20,69)
20	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence</i> (POP) Container Infrastruktur Internet	BPKAD	13.416.666,67	16.916.666,67	(3.500.000,00)	(20,69)
21	Sewa Tanah di Janapria	BPKAD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
22	Sewa Tanah Samping Kantor Desa Kuta	BPKAD	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
23	Sewa Tanah Eks Kominfo	BPKAD	7.254.166,67	0,00	7.254.166,67	100,00
24	Sewa Tanah BBI Pemepek	Dislutkan	102.500.000,00	0,00	102.500.000,00	100,00
<b>D</b>	<b>Pendapatan di terima di muka atas pajak reklame</b>	<b>Bapenda</b>	<b>425.538.068,00</b>	<b>687.737.595,92</b>	<b>(262.199.527,92)</b>	<b>(38,12)</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>738.647.818,00</b>	<b>940.647.012,58</b>	<b>(201.999.194,58)</b>	<b>(21,47)</b>

Penjelasan:

1. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 merupakan Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain yang periode sewanya belum dilaksanakan oleh pihak ketiga; dan
2. Perhitungan Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 didasarkan pada periode waktu perjanjian sewa disesuaikan dengan periode pelaporan keuangan.

Daftar mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 16b**.

### 5.3.2.1.5. Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 179. Rincian Utang Belanja**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	13.368.017.330,05	37.408.566.216,31	(24.040.548.886,26)	(64,26)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	34.710.065.782,16	43.652.644.808,16	(8.942.579.026,00)	(20,49)
3	Utang Belanja Modal	8.729.522.994,00	238.179.000,00	8.491.343.994,00	3.565,11
4	Utang Belanja Transfer	5.840.830.037,81	5.838.546.068,12	2.283.969,69	0,04
	<b>Jumlah</b>	<b>62.648.436.144,02</b>	<b>87.137.936.092,59</b>	<b>(24.489.499.948,57)</b>	<b>(28,10)</b>

Penjelasan:

1. Utang Belanja Pegawai Senilai Rp13.368.017.330,05 merupakan utang belanja pegawai berupa Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN, Gaji PPPK, dan belanja pegawai BLUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 180. Rincian Utang Belanja Pegawai**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah /Berkurang	%
1	Utang Gaji dan Tunjangan	152.622.146,00	398.231.545,00	(245.609.399,00)	(61,68)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	8.039.725.593,00	7.829.255.220,00	210.470.373,00	2,69
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	774.365.319,60	20.000.227.079,70	(19.225.861.760,10)	(96,13)
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	20.310.030,00	(20.310.030,00)	(100,00)
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	4.401.304.271,45	9.160.542.341,61	(4.759.238.070,16)	(51,95)
	<b>Jumlah</b>	<b>13.368.017.330,05</b>	<b>37.408.566.216,31</b>	<b>(24.040.548.886,26)</b>	<b>(64,26)</b>

2. Utang Belanja Barang dan Jasa
  - a. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp34.710.065.782,16 merupakan utang belanja barang dan jasa yang terdiri dari utang belanja barang, utang belanja jasa dan utang belanja pemeliharaan, dan utang belanja perjalanan dinas;
  - b. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp34.710.065.782,16 terdapat utang belanja barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/pihak ketiga atas beberapa paket pengadaan barang dan jasa senilai Rp5.979.715.050,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024; dan
  - c. Berikut ini adalah rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut.

**Tabel 181. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>A</b>	<b>Utang Belanja Barang</b>	<b>32.453.417.349,16</b>	<b>35.190.364.020,16</b>	<b>(2.736.946.671,00)</b>	<b>(7,78)</b>
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	2.106.630.000,00	8.735.001.504,00	(6.628.371.504,00)	(75,88)
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	1.212.120,00	4.950.000,00	(3.737.880,00)	(75,51)
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	196.115.000,00	626.804.070,00	(430.689.070,00)	(68,71)
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	827.298.639,00	827.298.639,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	13.186.038.147,00	14.118.888.675,53	(932.850.528,53)	(6,61)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.644.801.199,16	9.785.297.762,63	(140.496.563,47)	(1,44)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.291.300,00	0,00	17.291.300,00	100,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.448.785.944,00	831.166.500,00	5.617.619.444,00	675,87
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	25.245.000,00	260.956.869,00	(235.711.869,00)	(90,33)
<b>B</b>	<b>Utang Belanja Jasa</b>	<b>2.256.648.433,00</b>	<b>2.719.022.582,00</b>	<b>(462.374.149,00)</b>	<b>(17,01)</b>
1	Utang Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	160.182.500,00	0,00	160.182.500,00	100,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	45.899.930,00	72.660.309,00	(26.760.379,00)	(36,83)
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.387.347.435,00	1.453.505.562,00	(66.158.127,00)	(4,55)
4	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.926.278,00	24.817.135,00	(5.890.857,00)	(23,74)
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	40.691.756,00	564.439.042,00	(523.747.286,00)	(92,79)
6	Utang Belanja Luran Jaminan/Asuransi- Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	601.452.014,00	601.452.014,00	0,00	0,00
7	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya	2.148.520,00	2.148.520,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Utang Belanja Pemeliharaan</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731.332.650,00</b>	<b>(5.731.332.650,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	5.494.775.000,00	(5.494.775.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	0,00	6.105.000,00	(6.105.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	230.452.650,00	(230.452.650,00)	(100,00)
<b>D</b>	<b>Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925.556,00</b>	<b>(11.925.556,00)</b>	<b>(100,00)</b>
1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	11.925.556,00	(11.925.556,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>34.710.065.782,16</b>	<b>43.652.644.808,16</b>	<b>(8.942.579.026,00)</b>	<b>(20,49)</b>

3. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp8.729.522.994,00 termasuk utang belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp8.169.351.560,00 atas pengerjaan beberapa paket pekerjaan fisik dan nonfisik sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayarkan. Berikut disajikan rincian utang belanja modal sebagai berikut.

**Tabel 182. Rincian Utang Belanja Modal**

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>A</b>	<b>Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	DIKBUD	<b>313.527.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.527.050,00</b>	<b>100,00</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Utang Belanja Modal Alat Kantor-					
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	DIKBUD	68.050.000,00	0,00	68.050.000,00	100,00
2	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	DIKBUD	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	100,00
3	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	DIKBUD	221.080.000,00	0,00	221.080.000,00	100,00
4	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DIKBUD	18.317.050,00	0,00	18.317.050,00	100,00
<b>B</b>	<b>Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>		<b>8.099.041.560,00</b>	<b>238.179.000,00</b>	<b>7.860.862.560,00</b>	<b>3.300,40</b>
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DIKES/DI KBUD	444.890.000,00	238.179.000,00	206.711.000,00	86,79
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	DIKBUD	1.024.207.400,00	0,00	1.024.207.400,00	100,00
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	DIKBUD	203.770.000,00	0,00	203.770.000,00	100,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	DIKBUD	5.665.320.760,00	0,00	5.665.320.760,00	100,00
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	DIKBUD	101.703.400,00	0,00	101.703.400,00	100,00
6	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	DIKBUD	368.025.000,00	0,00	368.025.000,00	100,00
7	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	DIKBUD	291.125.000,00	0,00	291.125.000,00	100,00
<b>B</b>	<b>Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>		<b>316.954.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.954.384,00</b>	<b>100,00</b>
1	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PUPR	316.954.384,00	0,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.729.522.994,00</b>	<b>238.179.000,00</b>	<b>8.491.343.994,00</b>	<b>3.565,11</b>

Daftar Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal serta Utang BLUD RSUD dapat dilihat pada *Lampiran 16a s.d 16i*.

4. Utang Transfer timbul karena adanya kurang salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa. Utang Belanja Transfer Ke Desa per 31 Desember 2024 belum diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang kurang salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa karena masih dalam tahap verifikasi alokasi masing-masing Desa penghasil. Berikut rincian Utang Transfer ke desa untuk tahun 2024.

**Tabel 183. Rincian Utang DBH Ke Desa**

No	Uraian	Utang DBH Tahun 2024	Utang DBH Tahun 2023
1	Pajak daerah	5.019.134.566,75	4.932.408.772,96
2	Reribusi Daerah	821.695.471,06	906.137.295,16
	<b>Jumlah</b>	<b>5.840.830.037,81</b>	<b>5.838.546.068,12</b>

### 5.3.2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu sebesar Rp46.000.000,00, merupakan uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah area parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan dilaporan realisasi anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya dan disajikan sebagai utang jangka pendek lainnya.

### 5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut.

**Tabel 184. Daftar Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN**

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	133.697.947.150,00	164.878.644.490,00	(31.180.697.340,00)	(18,91)
<b>Jumlah</b>		<b>133.697.947.150,00</b>	<b>164.878.644.490,00</b>	<b>(31.180.697.340,00)</b>	<b>(18,91)</b>

Penjelasan:

1. Nilai Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 merupakan pinjaman kepada PT SMI untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 dicatat dan diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 telah diubah melalui Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei 2022 antara Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) dengan Bupati Lombok Tengah. Melalui perjanjian tersebut telah disepakati bahwa PT SMI memberikan pinjaman senilai Rp200.000.000.000,00 dengan jangka waktu delapan tahun atau 96 bulan terhitung sejak tanggal pencairan pertama. Masa pencairan pinjaman (*availability Period*) adalah sejak tanggal pencairan pertama yaitu tanggal 27 April 2022 senilai Rp50.000.000.000 sampai dengan 30 September 2022 sesuai dengan Perjanjian perubahan pertama. Namun perkembangan selanjutnya, pemberian pinjaman yang dapat dicairkan hingga September 2022 senilai Rp187.084.169.050,00. Pada Tahun 2023 terjadi pengurangan nilai pinjaman senilai Rp1.418.393.000,00 yang disebabkan karena terdapat selisih HPS dengan nilai kontrak dalam pengerjaan infrastruktur yang didanai dari pinjaman PT SMI. Sehingga nilai seluruhnya realisasi pinjaman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT SMI per 31 Desember 2023 senilai Rp185.665.776.050,00. Penarikan Pinjaman dari PT SMI sebagai berikut.

**Tabel 185. Daftar Penarikan Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN**

NO	Uraian	Jumlah	Tanggal Penarikan
1	Penarikan I	50.000.000.000,00	27 April 2022
2	Penarikan II	90.000.000.000,00	12 September 2022
3	Penarikan III	47.084.169.050,00	30 September 2022
4	Koreksi Atas Kelebihan Salur Utang oleh PT SMI	(1.418.393.000,00)	28 Februari 2023
<b>Jumlah</b>		<b>185.665.776.050,00</b>	

2. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan reklasifikasi angsuran pokok utang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp31.180.697.340,00 untuk angsuran pokok periode bulan Januari sampai dengan Desember 2025;
3. Berikut Disajikan Mutasi Utang Jangka Panjang kepada PT SMI sebagai berikut.

**Tabel 186. Mutasi Utang Jangka Panjang**

Periode	Mulai	Akhir	Kewajiban Pokok Tahun 2025	Sisa Pokok
1	Saldo Utang Jangka Panjang s.d Periode Ketiga2			164.878.644.490,00
2	30/11/2024	31/12/2024	2.598.391.445,00	162.280.253.045,00
3	31/12/2024	31/01/2025	2.598.391.445,00	159.681.861.600,00
4	31/01/2025	28/02/2025	2.598.391.445,00	157.083.470.155,00
5	28/02/2025	31/03/2025	2.598.391.445,00	154.485.078.710,00
6	31/03/2025	30/04/2025	2.598.391.445,00	151.886.687.265,00
7	30/04/2025	31/05/2025	2.598.391.445,00	149.288.295.820,00
8	31/05/2025	30/06/2025	2.598.391.445,00	146.689.904.375,00
9	30/06/2025	31/07/2025	2.598.391.445,00	144.091.512.930,00
10	31/07/2025	31/08/2025	2.598.391.445,00	141.493.121.485,00
11	31/08/2025	30/09/2025	2.598.391.445,00	138.894.730.040,00
12	30/09/2025	31/10/2025	2.598.391.445,00	136.296.338.595,00
13	31/10/2025	30/11/2025	2.598.391.445,00	133.697.947.150,00
Sisa Pokok			31.180.697.340,00	133.697.947.150,00

### 5.3.3. EKUITAS

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut.

**Tabel 187. Nilai Ekuitas**

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ekuitas	3.928.911.099.331,98	3.816.068.873.789,83	112.842.225.542,15	2,96
Jumlah		3.928.911.099.331,98	3.816.068.873.789,83	112.842.225.542,15	2,96

Penjelasan:

1. Nilai Ekuitas tersebut adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal pelaporan; dan
2. Nilai Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.4**.

## 5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

### 5.4.1 PENDAPATAN DAERAH - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 188. Rincian Pendapatan – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	322.125.333.930,16	352.053.500.488,76
Pendapatan Transfer – LO	2.073.944.463.028,00	1.776.114.936.097,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	77.336.083.729,27	89.290.865.415,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.473.405.880.687,43</b>	<b>2.217.459.302.000,76</b>

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 189. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	190.681.563.492,75	148.750.476.819,82
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	29.210.384.887,66	22.281.092.476,85
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	2.745.795.422,00	15.068.523.847,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	99.487.590.127,75	165.953.407.345,09
<b>Jumlah</b>	<b>322.125.333.930,16</b>	<b>352.053.500.488,76</b>

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 190. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	8.208.720.449,00	0,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	81.789.065.301,36	0,00
Pajak Hotel – LO	15.001.978.695,61	29.619.675.398,84
Pajak Restoran – LO	14.694.027.768,03	25.414.723.607,04
Pajak Hiburan – LO	4.333.375.502,50	8.800.496.168,00
Pajak Reklame – LO	2.215.411.061,25	1.807.404.216,75
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	25.514.569.522,00



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Parkir – LO	596.325.789,00	2.232.379.229,00
Pajak Air Tanah – LO	496.125.399,00	330.716.024,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	4.350.000,00	18.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	3.549.329.804,00	1.348.208.186,58
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	24.090.802.640,00	24.098.193.768,61
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	35.702.051.083,00	29.566.110.699,00
<b>Jumlah</b>	<b>190.681.563.492,75</b>	<b>148.750.476.819,82</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Perubahan nomenklatur dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, menjadi PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 19 Januari 2024. Namun karena sistem SIPD tidak memungkinkan perubahan nomenklatur di tengah tahun anggaran, pencatatan tetap menggunakan nomenklatur lama hingga perencanaan dalam APBD Perubahan pada bulan September 2024;
  - b. Pendapatan Pajak Air Tanah - LO mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh:
    - Kinerja Satgas PAD yang ditugaskan khusus untuk optimalisasi Pajak Air Tanah dengan menargetkan hotel-hotel dan industri yang ada di kabupaten Lombok Tengah. Satgas melakukan sosialisasi dan merekomendasikan para pelaku usaha untuk mengurus izin air tanah dan memasang meteran air untuk mengukur debit air yang digunakan dan mempermudah penghitungan pajak air tanahnya.
    - objek pajak sudah mulai memasang meter air untuk pembayaran pajak air tanah sehingga mulai melakukan pembayaran pajak air tanah di Tahun 2024.
  - c. Penurunan realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LO disebabkan oleh:
    - Penurunan produksi walet di Tahun 2024.
    - Kesadaran pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak masih rendah. Selain itu juga dari hasil penelusuran ke wajib pajak, para pengusaha sarang burung walet mengaku tidak ada walet yang bersarang di gedung mereka.
  - d. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO mengalami kenaikan disebabkan oleh:
    - Karena ada SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sejak Tahun 2024 sehingga Bapenda dibantu dalam penagihan Pajak MBLB.
    - Penambahan MBLB lebih banyak di Tahun 2024 disebabkan pembangunan fisik baik oleh pemerintah maupun masyarakat lebih banyak dibandingkan Tahun 2023.
  - e. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 untuk pertama kali Kepala Dusun dan Kepala lingkungan menjadi pemungut PBBP2. Penerapan kebijakan baru ini memerlukan adaptasi dan penyesuaian serta diberikan pemahaman lebih lanjut kepada Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk optimalnya penagihan PBBP2; dan

- f. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO mengalami kenaikan hal ini disebabkan lebih banyak pergantian hak tanah dan bangunan di Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 dan perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat di KEK Mandalika.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp8.353.405.627,25 (Rp190.681.563.492,75 - Rp182.328.157.865,50). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 191. Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>8.353.405.627,25</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>24.822.388.924,92</b>
Penambahan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024	22.596.200,00
Penambahan Piutang PBBP2	24.082.761.379,00
Pendapatan diterima di muka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron di Tahun 2024 atas Masa Pajak Reklame Tahun 2025	717.031.345,92
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>16.468.983.297,67</b>
Pembayaran Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	23.176.481,67
Pendapatan diterima di muka atas pajak reklame	425.538.068,00
Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah	14.415.214,00
Pembayaran Piutang PBBP2	16.005.853.534,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>8.353.405.627,25</b>

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 192. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Retribusi Jasa Umum – LO</b>	<b>22.651.463.106,00</b>	<b>15.708.870.374,85</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	20.391.845.498,00	11.836.452.660,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	483.205.000,00	323.869.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	251.980.000,00	208.676.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.494.343.675,00	1.502.676.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	411.027.744,85
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	0,00	7.690.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	30.088.933,00	1.418.478.270,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.074.978.666,66</b>	<b>4.061.008.376,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.041.041.666,66	2.345.870.126,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	688.364.000,00	1.300.594.750,00
Retribusi Tempat Pelelangan – LO	-	35.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	19.448.000,00	19.850.000,00



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	156.600.000,00	92.063.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - LO	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	169.525.000,00	267.630.500,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>3.483.943.115,00</b>	<b>2.511.213.726,00</b>
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00	166.750.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	250.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.626.981.115,00	2.344.213.726,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	856.962.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.210.384.887,66</b>	<b>22.281.092.476,85</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Retribusi Jasa Umum-LO
    - 1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:
      - a) Terjadinya peningkatan di pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari sisi klaim non kapitasi karena Program *Universal Health Coverage* (UHC) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui anggaran Dinas Kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2024 masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sudah dipremikan ke peserta JKN sejumlah 1.104.599 atau 99,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah;
      - b) Adanya peningkatan tarif pelayanan di Puskesmas sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, sehingga tarif pendapatan dan retribusi pelayanan kesehatan meningkat juga;
      - c) Adanya penambahan Rumah Sakit mitra pada UPTD Labkes dan Unit Transfusi Darah yang secara langsung menjadi tambahan penghasilan bagi Dinas Kesehatan;
      - d) Adanya Pendapatan Operasional Tahun 2023 yang bersumber dari pelayanan kesehatan Tahun 2023 yang dibayarkan oleh penjamin pada Tahun 2024 yang berasal dari Pasien Jampersal. Pasien Jampersal merupakan pasien yang dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme klaim. Selain itu, terdapat Pasien Bansos yang merupakan pasien dengan penjamin pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui PPKD pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga Bidang Kesehatan atas Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota sebesar Rp6.271.983.769,00; dan
      - e) Terdapat peningkatan pendapatan jasa layanan pasien umum pada Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan Kesehatan kepada pasien yang tidak memiliki jaminan Kesehatan dari Lembaga penjamin manapun.
    - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sehingga dapat mengakibatkan kenaikan volume sampah yang dihasilkan setiap hari, sehingga diperlukan lebih banyak layanan pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah;
    - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh:

- a) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan kepada para juru parkir secara berkala di seluruh Kecamatan;
  - b) Jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik untuk kontribusi dari ritel modern alfamart dan indomaret; dan
  - c) Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar – LO mengalami penurunan hal ini disebabkan karena penurunan omset pedagang sehingga pedagang tidak bisa membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan akibatnya banyak pedagang yang tidak berjualan di pasar;
  - 5) Pada Tahun 2024 sudah tidak terdapat lagi pungutan terhadap Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan karena Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) telah dihapus dan digratiskan sejak 1 Januari 2024. Perubahan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan yang wajib uji KIR, seperti bus, truk, dan mobil penumpang umum. Penghapusan retribusi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 6) Pada Tahun 2024 sudah tidak terdapat Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus karena dasar pemungutannya telah dihapus dari Perda Nomor 1 Tahun 2024;
  - 7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan hal ini disebabkan pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lagi memungut Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pendapatan yang diperoleh pada Tahun 2024 merupakan pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya;
- b. Retribusi Jasa Usaha - LO
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena:
    - a) Adanya pembayaran atas piutang pendapatan sewa tanah Hotel Raja oleh PT Tiga Pilar pada Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 2 Januari 2024;
    - b) Adanya pembayaran sewa tanah dan bangunan BBI Pemepek untuk 5 tahun sebesar Rp7.700.000,00;
    - c) Terdapat pembayaran dari Sewa Rusunawa sebesar Rp19.620.000,00; dan
    - d) Terdapat enam objek Retribusi pada Tahun 2024, yang MOU-nya diperbarui dimana terdapat perubahan kenaikan tarif sehingga terdapat penambahan retribusi sebesar Rp38.700.000,00.
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena penurunan omset pedagang karena semakin meningkatnya transaksi penjualan secara *online shop*.

Terdapat pendapatan Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir pertokoan dan tempat kegiatan usaha lain sebesar Rp975.000,00 yang salah dalam pengidentifikasian kode akun saat pengentrian pada SIPD sehingga dilakukan reklasifikasi menjadi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Pada Tahun 2024 tidak terdapat Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan - LO dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat aktivitas pelelangan di tempat pelelangan ikan di Teluk Awang karena semakin banyaknya pihak swasta yang lebih menguasai pasar pembenihan ikan di sekitar Kabupaten Lombok Tengah;

- 4) Retribusi Rumah Potong Hewan - LO mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh permintaan hewan ternak menurun, yang pada akhirnya menurunkan retribusi yang diterima;
  - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO mengalami kenaikan. Hal ini sebabkan oleh adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek tempat rekreasi dan olah raga sehingga kunjungan masyarakat meningkat; dan
  - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya pihak swasta yang lebih menguasai pasar pembenihan ikan di sekitar Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdapat aktivitas ditempat pelelangan ikan (TPI Teluk Awang). Selain itu adanya wabah penyakit baik virus maupun bakteri sehingga mempengaruhi target panen.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu - LO
- 1) Tahun 2024 sudah tidak terdapat Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena dasar pemungutannya telah dihapus dari Perda Nomor 1 Tahun 2024;
  - 2) Tahun 2024 sudah tidak terdapat Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum karena dasar pemungutannya telah dihapus dari Perda Nomor 1 Tahun 2024;
  - 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya perkembangan pariwisata dan pendukungnya untuk Sirkuit Mandalika sehingga berdampak pada meningkatnya perizinan bangunan baru; dan
  - 4) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) - LO mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena penarikan Retribusi dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing ini baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2024 yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sedangkan pada tahun sebelumnya belum bisa dilakukan penarikan retribusi, karena belum memiliki payung hukum yang kuat.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.848.138.383,34 (Rp29.210.384.887,66 - Rp31.058.523.271,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 193. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(1.848.138.383,34)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>837.193.516,66</b>
Pendapatan diterima di muka retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2023	133.317.166,66
Penambahan Piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2024	652.616.350,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	51.260.000,00
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>2.685.331.900,00</b>
Pembayaran piutang Retribusi pelayanan kesehatan 2023	1.491.626.900,00
Pembayaran piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2023	1.000.000.000,00
Pendapatan diterima di muka retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2024	193.705.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(1.848.138.383,34)</b>

### 5.4.1.1.3

## Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 194. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	0,00	12.617.716.347,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	2.745.795.422,00	2.450.807.500,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.745.795.422,00</b>	<b>15.068.523.847,00</b>

### Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - Pemerintah Daerah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberian/pembagian dividen dan kontribusi terhadap laba bersih BUMD; dan
  - Tahun 2024 terdapat penerimaan laba atas penyertaan modal pada Perumdam Tiara Loteng dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp9.995.354.430,00 (Rp2.745.795.422,00 - Rp12.741.149.852,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 195. Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan– LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>9.995.354.430,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>2.622.361.917,00</b>
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-2024	2.622.361.917,00
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>12.617.716.347,00</b>
Pembayaran Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-2023	12.617.716.347,00

Uraian	Nilai
Jumlah Penjelasan Selisih	9.995.354.430,00

#### 5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 196. Rincian Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jasa Giro – LO	1.791.092.003,99	1.367.792.747,67
Pendapatan Bunga – LO	2.244.946.521,53	2.722.228.822,26
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	3.344.520.138,51	1.703.079.362,11
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	758.893.603,44	55.450.990.494,39
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	0,00	268.527.214,34
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	795.163.493,55	833.636.536,42
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	14.370.367,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	884.489.193,37	499.663.545,00
Pendapatan BLUD – LO	89.668.485.173,36	91.551.062.436,63
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	11.542.055.819,27
<b>Jumlah</b>	<b>99.487.590.127,75</b>	<b>165.953.407.345,09</b>

#### Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Pendapatan Jasa Giro mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh frekuensi atau volume transaksi perbankan meningkat, baik itu transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya yang melibatkan rekening giro, maka pendapatan dari biaya-biaya transaksi juga meningkat;
  - b. Pendapatan Bunga mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2024 terdapat Pendapatan Transfer TDF remunerasi atas imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF sebesar Rp371.011.313,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.701.295.493,00. Persentase remunerasi ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan:
    - Jumlah kasus penyalahgunaan kerugian daerah yang ditemukan berkurang karena peningkatan kepatuhan maupun efektivitas pengawasan;
    - Pemerintah Daerah meningkatkan sistem pengendalian internal, pengawasan, dan audit sehingga potensi kerugian daerah dapat dicegah; dan
    - Terdapat tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang belum menjadi ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sehingga terhadap nilai setoran tersebut direklasifikasi menjadi Pendapatan Pengembalian Kelebihan Belanja.

- d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena penerimaan yang masuk ke kas daerah sudah dapat ditelusuri jenis pendapatannya;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu sudah mulai meningkat dan sistem pengelolaan pajak daerah Tahun 2024 lebih optimal sehingga pengenaan atas denda pajak berkurang;
- f. Pendapatan Denda Retribusi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 tidak terdapat pendapatan dari Denda Retribusi karena wajib retribusi memiliki kesadaran penuh untuk membayar retribusi secara tepat waktu sehingga tidak terdapat denda atas keterlambatan;
- g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor dalam konteks kebijakan dan kondisi yang ada. Selain itu terdapat reklasifikasi pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah terhadap Non Bendahara ke Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja atas tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang belum menjadi ketetapan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp906.228.284,37;
- h. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum yang memiliki jaminan kesehatan dari lembaga penjamin seperti BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja.

Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa pemanfaatan aset daerah terdiri dari:

- RSUD Praya melakukan kerja sama dengan PT MTP untuk pengelolaan lahan parkir dalam jangka waktu kerjasama selama lima tahun sampai dengan Tahun 2027 dengan ketentuan bahwa pengelola parkir mempunyai kewajiban membayar pembagian laba sebesar Rp14.000.000,00 per bulan kepada RSUD Praya;
- RSUD Praya bekerjasama sewa Gedung Koperasi dengan pengurus koperasi karyawan dengan nilai sewa sebesar Rp4.000.000,00 per bulan; dan
- Sewa bangunan ruang ATM bekerjasama dengan PT Bank NTB Syariah dan PT Bank Mandiri sebesar Rp24.300.000,00 selama satu tahun.

Selain itu terdapat Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Giro sebesar Rp15.940.728,91;

2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp5.444.426.715,00 (Rp99.487.590.127,75 - Rp104.932.016.842,75). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 197. Penjelasan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(5.444.426.715,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>9.777.538.883,91</b>
Pendapatan diterima dimuka BLUD RSUD 2024.	19.237.500,00
Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan tunjangan	126.633.616,00
Piutang dari Pendapatan BLUD	6.287.147.630,00
Penambahan Aset Lainnya TGR 2024	3.344.520.137,91
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>15.221.965.598,91</b>
Penyetoran TGR 2022 di 2024 sebagai pengurang aset lainnya.	1.817.049.168,91



Uraian	Nilai
Pembayaran Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan tunjangan	148.372.707,00
Pembayaran Piutang Pendapatan BLUD RSUD 2023	13.232.243.723,00
Pendapatan diterima dimuka BLUD RSUD 2025	24.300.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(5.444.426.715,00)</b>

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 198. Rincian Pendapatan Transfer – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan– LO	1.947.658.744.050,00	1.650.293.624.746,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	126.285.718.978,00	120.087.273.351,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.073.944.463.028,00</b>	<b>1.776.114.936.097,00</b>

#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 199. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Dana Perimbangan – LO</b>	<b>1.923.949.968.050,00</b>	<b>1.650.293.624.746,00</b>
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	100.451.016.000,00	138.007.497.619,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.248.441.289.000,00	1.047.472.659.000,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	202.489.811.306,00	149.737.378.651,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	372.567.851.744,00	315.076.089.476,00
<b>dana Insentif Daerah – LO</b>	<b>23.708.776.000,00</b>	<b>5.734.038.000,00</b>
<b>Insentif Fiskal – LO</b>	<b>23.708.776.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.947.658.744.050,00</b>	<b>1.656.027.662.746,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Kebijakan perhitungan alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus - DAK Fisik maupun Dana Alokasi Khusus - DAK Non Fisik pada Tahun 2023 sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan besaran penetapan alokasi masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun 2024 pada Lampiran V salinan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
  - b. Terdapat penyaluran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Tahun 2023 yang disalurkan pada Tahun 2024 yang bersumber dari penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF. Penyaluran tersebut berdasarkan surat dari kementerian Keuangan Nomor S-

319/KPN.2301/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 secara nontunai melalui rekening Treasury Deposit Facility (TDF).

- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp217.448.546.000,00 (Rp1.947.658.744.050,00 - Rp2.165.107.290.050,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 200. Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>217.448.546.000,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>185.021.712.000,00</b>
Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Laporan Operasional	185.021.712.000,00
<b>Pembayaran piutang Pendapatan Remunerasi TDF pada pemerintah pusat Tahun 2024:</b>	<b>32.426.834.000,00</b>
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	505.973.000,00
DBH PPh Pasal 21	1.584.168.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.367.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	30.325.326.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>217.448.546.000,00</b>

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 201. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Bagi Hasil – LO</b>	<b>126.285.718.978,00</b>	<b>116.502.699.351,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	19.768.462.835,00	18.415.820.447,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	25.258.177.237,00	21.083.884.355,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	36.287.995.067,00	34.038.589.793,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	85.941.333,00	87.509.752,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	44.885.142.506,00	42.876.895.004,00
<b>Bantuan Keuangan – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.574.000,00</b>
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.584.574.000,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.285.718.978,00</b>	<b>120.087.273.351,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-184 Tahun 2024 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebesar Rp116.502.699.351,00 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sebesar Rp126.285.718.978,00;
  - b. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 yang dibayarkan Tahun 2024 lebih besar dari Piutang Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 sehingga realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi NTB pada Laporan Realisasi Anggaran meningkat; dan
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp2.108.648.062,00 (Rp126.285.718.978,00- Rp124.177.070.916,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 202. Penjelasan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.108.648.062,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>12.616.953.084,00</b>
Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.907.732.718,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.532.434.816,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.169.381.124,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.404.426,00
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>10.508.305.022,00</b>
Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bagi Hasil pajak 2023	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.393.242.351,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.079.446.127,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.028.326.929,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.289.615,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.108.648.062,00</b>

#### 5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 203. Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	21.914.611.961,60	58.780.926.994,00
Dana Darurat – LO	0,00	0,00



Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO 55.421.471.767,67 30.509.938.421,00

Jumlah	77.336.083.729,27	89.290.865.415,00
--------	-------------------	-------------------

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 204. Rincian Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	810.980.965,00	48.115.506.462,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.580.720.496,60	10.017.582.782,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	522.910.500,00	647.837.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.914.611.961,60</b>	<b>58.780.926.994,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp810.980.965,00 yang terdiri dari:
    - 1) Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Poltekpar berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Desa Puyung sebesar Rp57.512.965,00;
    - 2) Hibah Barang berupa Blangko KTP sebesar Rp753.468.000,00;
  - b. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp20.580.720.496,60 yang terdiri dari:
    - 1) Hibah Barang Habis Pakai dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB berupa *Buffer Stock* sebesar Rp18.279.166.192,60;
    - 2) Hibah Barang Habis Pakai dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB berupa Alat Kontrasepsi senilai Rp2.301.554.304,00;
  - c. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp522.910.500,00 yang terdiri dari:
    - 1) Hibah Aset Tanah dari PT Perumnas Mataram berupa tanah kosong Jalan Sono Keling Perumnas Tampar – Ampar luas 1.000 m2 senilai Rp128.000.000,00 dan tanah kosong di Jalan Trembesi Perumnas Tampar Ampar senilai Rp128.000.000,00;
    - 2) Sumbangan atas rekom ternak pada Dinas Pertanian sebesar Rp237.910.500,00;
    - 3) Kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp29.000.000,00; dan
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp21.647.701.461,60 (Rp21.914.611.961,60- Rp266.910.500,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 205. Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah LO**



Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>21.647.701.461,60</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>21.647.701.461,60</b>
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Kesehatan Berupa <i>Buffer stock</i>	18.279.166.192,60
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas KB Berupa Alat Kontrasepsi	2.301.554.304,00
Pendapatan Hibah Pemerintah pusat-LO berupa hibah blangko KTP sebanyak 74.000 pada Dinas dukcapil	753.468.000,00
Pendapatan hibah aset tanah dari PT Perumnas Mataram berupa tanah kosong Jalan Sono Keling Perumnas Tampar – Ampar luas 1.000 m2 senilai Rp128.000.000,00 dan tanah kosong di jalan Trembesi Perumnas Tampar Ampar senilai Rp128.000.000,00	256.000.000,00
Pendapatan hibah aset tanah dari Poltekpar berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Desa puyung	57.512.965,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>21.647.701.461,60</b>

#### 5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan- LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 206. Rincian Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Lain-Lain Pendapatan</b>	<b>34.759.393.827,00</b>	
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	34.759.393.827,00	30.509.938.421,00
<b>Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara – LO</b>	<b>20.662.077.940,67</b>	
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi-LO	20.662.077.940,67	
<b>Jumlah</b>	<b>55.421.471.767,67</b>	<b>30.509.938.421,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS dan jumlah layanan meningkat; dan
  - b. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp53.627.524.520,33 (Rp55.421.471.767,67 - Rp109.048.996.288,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 207 Penjelasan Selisih Pendapatan Lain – Lain LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>53.627.524.520,33</b>
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	<b>53.627.524.520,33</b>
Pembayaran atas Piutang Pembagian Laba Bersih dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk TB 2020/2021 dan TB 2022 yang dibayarkan Tahun 2024	53.627.524.520,33
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>53.627.524.520,33</b>

#### 5.4.2 Beban Operasional

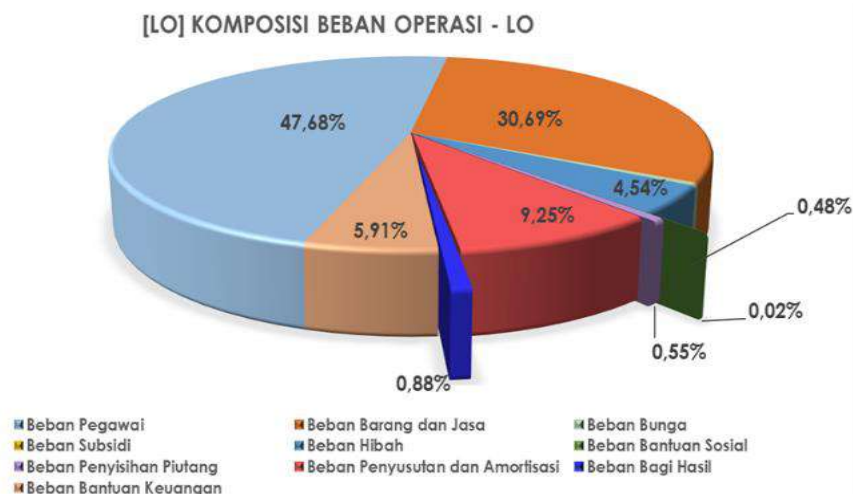
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 208. Rincian Beban Operasional – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Pegawai	1.132.436.367.267,50	1.051.792.190.334,35
Beban Barang dan Jasa	728.873.016.825,94	641.608.425.951,29
Beban Bunga	11.302.707.488,00	12.089.762.459,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	107.746.181.707,47	46.762.878.219,93
Beban Bantuan Sosial	540.000.000,00	540.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	13.012.698.219,00	6.037.379.710,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.785.713.875,00	217.205.131.699,71
Beban Transfer	161.278.604.553,69	166.207.740.923,12
<b>Jumlah</b>	<b>2.374.975.289.936,60</b>	<b>2.142.243.509.297,62</b>

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



##### 5.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 209. Rincian Beban Pegawai LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	734.547.607.098,00	658.846.601.650,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	113.117.685.592,00	104.557.246.719,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.644.347.354,46	214.745.008.524,25
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.759.407.930,00	23.925.039.130,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.309.702,00	168.910.972,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	791.000.000,00	852.000.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	18.502.092.200,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	34.408.009.591,04	30.195.291.139,10
<b>Jumlah</b>	<b>1.132.436.367.267,50</b>	<b>1.051.792.190.334,35</b>

**Penjelasan:**

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - Tahun 2023 Belanja Guru Tidak Tetap (GTT) dicatat sebagai Belanja Pegawai BOS, sedangkan pada Tahun 2024 disesuaikan dengan menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Belanja Jasa Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
  - Meningkatnya porsi pembayaran Jasa Pelayanan pada belanja pegawai BLUD RSUD yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai kontrak BLUD hasil dari perekrutan Tahun 2024;
  - Terdapat pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD atas Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024;
  - Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024 pembayaran Tambahan Penghasilan ASN (TPP) 14 untuk Tunjangan Hari Raya dan TPP 13 untuk bantuan pendidikan dibayarkan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 50%; dan
  - Terdapat kenaikan pendapatan pada puskesmas BLUD dari sisi kapitasi maupun non kapitasi sehingga Belanja Pegawai BLUD juga meningkat.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp24.040.550.894,26 (Rp1.132.436.367.267,50 - Rp1.156.476.918.161,76). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 210. Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO**



Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(24.040.550.894,26)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Beban LO:</b>	<b>13.368.017.330,05</b>
Utang Gaji dan Tunjangan Tahun 2024	152.631.537,00
Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024	8.039.725.593,00
Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024	774.355.928,60
Utang jasa pelayanan BLUD Tahun 2024	4.401.304.271,45
<b>Pengurangan Beban LO:</b>	<b>37.408.568.224,31</b>
Utang Gaji dan Tunjangan Tahun 2023	398.233.553,00
Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023	7.829.255.220,00
Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023	20.020.537.109,70
Utang jasa pelayanan BLUD Tahun 2023	9.160.542.341,61
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(24.040.550.894,26)</b>

#### 5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2024 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 211. Rincian Beban Barang dan Jasa – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang	372.539.250.674,08	381.003.081.551,76
Beban Jasa	214.961.533.911,31	161.524.401.003,53
Beban Pemeliharaan	7.109.347.169,83	9.234.613.350,00
Beban Perjalanan Dinas	30.474.081.581,00	21.728.940.120,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	25.654.164.678,00	6.102.097.240,00
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	78.134.638.811,72	62.015.292.686,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>728.873.016.825,94</b>	<b>641.608.425.951,29</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Tahun 2023 Belanja Guru Tidak Tetap (GTT) dicatat sebagai Belanja Pegawai BOS, sedangkan pada Tahun 2024 disesuaikan dengan menjadi Belanja Barang dan Jasa BOS pada Belanja Jasa Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS);
  - b. Belanja Barang dan Jasa BLUD meningkat dari tahun sebelumnya disebabkan karena tingginya kebutuhan operasional tahun berjalan akan barang-barang kefarmasian; dan
  - c. Terdapat belanja bunga atas pinjaman BLUD RSUD pada PT BSI sebesar Rp108.584.295,78.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp13.726.069.829,38 (Rp728.873.016.825,94 - Rp715.146.946.996,56). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 212. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa LO**

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>13.726.069.829,38</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Beban LO:</b>	<b>100.828.401.406,08</b>
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	34.710.065.782,16
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	297.805.333,33
Koreksi lebih saji Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya pada RSUD berupa Utang BLUD RSUD Pada UTD	5.494.775.000,00
Pendapatan Hibah Berupa Barang Persediaan Habis pakai dari Pemerintah Provinsi NTB /Pemerintah Pusat	21.334.188.496,59
Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	21.404.453.723,00
Reklasifikasi Beban Luar Biasa lainnya ke Beban barang dan Jasa yang bersumber dari belanja BTT	6.768.463.280,00
Reklas Belanja Aset Tetap Ke Beban barang dan Jasa	10.818.649.791,00
<b>Pengurangan Beban LO:</b>	<b>87.102.331.576,70</b>
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	43.652.644.808,16
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	397.901.932,53
Kekurangan volume atas pekerjaan barang yang diserahkan kepada masyarakat	6.798.000,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	32.775.727.622,01
Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	10.269.259.214,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>13.726.069.829,38</b>

#### 5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 213. Rincian Beban Bunga LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	11.302.707.488,00	12.089.762.459,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.302.707.488,00</b>	<b>12.089.762.459,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.

- a. Bunga dan Pokok Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp11.302.707.488,00 pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan langsung melalui Pendapatan DAU oleh Pemerintah Pusat. Pembayaran bunga maupun pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kewajiban Pinjaman Reguler dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2021 (PEN APBD Tahun 2021) Kabupaten Lombok Tengah Nomor BA-17/SMI/DPPPP/DPPU1/2024; dan
- b. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 sesuai saldo Belanja Bunga pada LRA Tahun 2024 sebesar Rp0,00 (Rp11.302.707.488,00 - Rp11.302.707.488,00).

#### 5.4.2.4 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk Tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.4.2.5 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 214. Rincian Beban Hibah – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.476.375.550,00	34.739.763.657,93
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.679.699.185,47	11.126.026.266,00
Belanja Hibah Dana BOS	49.686.020.600,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	904.086.372,00	897.088.296,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>107.746.181.707,47</b>	<b>46.762.878.219,93</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Terdapat peningkatan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
    - 1) Bawaslu berupa dokumen NPHD yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 431/NPHD/203/BKBP/X/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
    - 2) Komisi Pemilihan Umum berupa dokumen NPHD yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 431/NPHD/202/BKBP/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
  - b. Terdapat kenaikan realisasi beban hibah, hal ini disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah partai yang memenangkan Pemilu pada Tahun 2024 yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gelora; dan
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp12.673.806.685,47 (Rp107.746.181.707,47 - Rp95.072.375.022,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 215. Penjelasan Selisih Beban Hibah**



Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	12.673.806.685,47
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
Penambahan Beban LO	12.673.806.685,47
Hibah Aset	12.673.806.685,47
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>12.673.806.685,47</b>

#### 5.4.2.6 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 216. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	540.000.000,00	540.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>

Penjelasan:

1. Tidak terdapat perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dengan Tahun 2023. Hal ini terlihat dari tidak terdapat kenaikan atau penurunan realisasi belanja bansos Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi belanja bansos Tahun 2024 merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada buruh pabrik rokok; dan
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun 2024 Rp0,00 (Rp540.000.000 –Rp540.000.000).

#### 5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 217. Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	12.453.711.859,33	5.681.161.256,10
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	558.986.359,67	356.218.454,12
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.012.698.219,00</b>	<b>6.037.379.710,22</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.

- a. Adanya Piutang yang masuk kategori macet terutama piutang retribusi pasar grosir dan pertokoan; dan
  - b. Adanya penambahan Piutang Pajak PBBP2 dan rendahnya realisasi pembayaran piutang tahun sebelumnya.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp582.034.538,49 [(Rp54.161.634.997,02 - Rp41.730.971.316,51) - Rp13.012.698.219,00]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 218. Penjelasan Selisih Penyisihan Piutang – LO**

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	582.034.538,49
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
Pengurangan Penyisihan Piutang:	582.034.538,49
Surplus atas penyisihan piutang terbayar	582.034.538,49
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>582.034.538,49</b>

#### 5.4.2.8

#### Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 219. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.027.742.636,00	81.000.970.606,27
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.481.162.703,00	38.907.723.818,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	97.829.566.780,00	96.849.195.519,44
Beban Penyusutan Properti Investasi	447.241.756,00	334.443.748,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	112.798.008,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain – Lain	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>219.785.713.875,00</b>	<b>217.205.131.699,71</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Penambahan Aset Tetap pada Tahun 2024 melalui Belanja Modal yang berpengaruh langsung pada peningkatan nilai beban penyusutan aset tetap;
  - b. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh hibah aset tanah, peralatan mesin dan aset gedung dan bangunan.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.3.7.**

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.4.2.8**, dan juga dapat dilihat pada **Lampiran 11b, Lampiran 11 c, Lampiran 11 d**.

#### 5.4.2.9 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 220. Rincian Beban Transfer LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	20.840.644.093,69	17.884.284.017,12
Beban Transfer Bantuan Keuangan	140.437.960.460,00	148.323.456.906,00
<b>Jumlah</b>	<b>161.278.604.553,69</b>	<b>166.207.740.923,12</b>

##### 5.4.2.9.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 221. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.232.815.715,79	16.429.208.857,12
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.607.828.377,90	1.455.075.160,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.840.644.093,69</b>	<b>17.884.284.017,12</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya Realisasi PAD dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 yang berpengaruh terhadap proporsi jumlah dana transfer bagi hasil ke desa; dan
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp2.283.969,69 (Rp20.840.644.093,69- Rp20.838.360.124,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 222. Penjelasan Selisih Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan – LO**

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.283.969,69
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Beban LO:</b>	<b>5.840.830.037,81</b>
Utang Transfer Bagi Hasil Ke Desa Atas Kurang Salur Ke Desa	5.840.830.037,81
<b>Pengurangan Beban LO:</b>	<b>5.838.546.068,12</b>
Pembayaran Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa	5.838.546.068,12
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.283.969,69</b>

##### 5.4.2.9.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer

Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 223. Rincian Transfer Bantuan Keuangan – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	131.363.260.460,00	117.661.334.675,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	9.074.700.000,00	30.662.122.231,00
<b>Jumlah</b>	<b>140.437.960.460,00</b>	<b>148.323.456.906,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut.
  - a. Terdapat peningkatan Pendapatan Realisasi Dana Bagi Hasil dibandingkan dengan Tahun 2023 sehingga formasi perhitungan anggaran sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil juga mengalami peningkatan; dan
  - b. Terdapat penurunan belanja kendaraan operasional Kepala Dusun pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp0,00 (Rp140.437.960.460,00 - Rp140.437.960.460,00).

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan Dana Desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

#### 5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 224. Surplus Non – Operasional LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO</b>		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	976.835.821,48	1.177.075.869,11
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Dana Bergulir)	0,00	23.000.000,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>976.835.821,48</b>	<b>1.200.075.869,11</b>

Penjelasan:

Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan karena terdapat nilai piutang tahun sebelumnya yang sudah disisihkan dan terbayar pada Tahun 2024.

#### 5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 225. Defisit Non – Operasional**



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO</b>		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	365.201.283,00	708.096,00
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>365.201.283,00</b>	<b>708.096,00</b>

Penjelasan:

Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan oleh terdapat koreksi lebih saji aset tetap gedung dan bangunan kantor yang sebelumnya tercatat sebagai penambah aset baru seharusnya tercatat sebagai aset kapitalisasi.

#### 5.4.5

#### Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 226. Pos Luar Biasa – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Luar Biasa</b>		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Beban Luar Biasa</b>		
Beban Tidak Terduga	2.069.890.667,00	12.813.251.840,00
Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.069.890.667,00</b>	<b>12.813.251.840,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat reklasifikasi pengakuan beban luar biasa yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah ke akun beban operasional; dan
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp6.768.463.280,00 (Rp2.069.890.667,00–Rp8.838.353.947,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 227. Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa - LO

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>6.768.463.280,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Pengurangan Beban LO:</b>	<b>6.768.463.280,00</b>
Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	305.940.400,00
Reklasifikasi ke Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.076.480,00
Reklasifikasi ke Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.429.446.400,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>6.768.463.280,00</b>

#### 5.4.6

#### Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:



**Tabel 228. Rincian Surplus/(Defisit) – LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Daerah – LO</b>	<b>2.473.405.880.687,43</b>	<b>2.217.459.302.000,76</b>
Pendapatan Asli Daerah – LO	322.125.333.930,16	352.053.500.488,76
Pendapatan Transfer – LO	2.073.944.463.028,00	1.776.114.936.097,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	77.336.083.729,27	89.290.865.415,00
<b>Beban Daerah</b>	<b>2.374.975.289.936,60</b>	<b>2.142.243.509.297,62</b>
Beban Operasi	2.213.696.685.382,91	1.976.035.768.374,50
Beban transfer	161.278.604.553,69	166.207.740.923,12
<b>Surplus Non-Operasional</b>	<b>976.835.821,48</b>	<b>1.200.075.869,11</b>
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	976.835.821,48	1.200.075.869,11
<b>Defisit Non-Operasional</b>	<b>2.435.091.950,00</b>	<b>12.813.959.936,00</b>
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	365.201.283,00	708.096,00
Beban Luar Biasa	2.069.890.667,00	12.813.251.840,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.972.334.622,31</b>	<b>63.601.908.636,26</b>

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO diatas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.2**.

## 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat 4 (empat) aktivitas yang memengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2024 dan Tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 229. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.729.660.115.585,25	2.278.299.769.297,99
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.333.675.334.199,32	2.025.078.398.467,23
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>395.984.781.385,93</b>	<b>253.221.370.830,76</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

**Tabel 230. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>182.328.157.865,50</b>	<b>147.240.146.529,07</b>
Pajak Hotel	261.843.932,00	31.017.043.511,84
Pajak Restoran	673.886.229,91	26.121.087.581,04
Pajak Hiburan	3.806.500,00	8.813.025.350,00
Pajak Reklame	1.947.094.265,00	2.474.103.456,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	27.939.630.764,00
Pajak Parkir	176.927.675,00	2.466.398.329,00
Pajak Air Tanah	487.944.413,00	327.308.567,00
Pajak Sarang Burung Walet	4.350.000,00	18.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.549.329.804,00	1.348.208.186,58
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.013.894.795,00	17.149.230.084,61
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.702.051.083,00	29.566.110.699,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	40.558.956.651,69	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	31.282.324.551,00	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	45.255.519.994,40	0,00
PBJT-Jasa Parkir	1.449.087.453,00	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.961.140.518,50	0,00
<b>Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>31.058.523.271,00</b>	<b>20.820.541.076,85</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>23.439.213.656,00</b>	<b>14.538.825.474,85</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.230.856.048,00	10.666.407.760,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	431.945.000,00	323.869.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	251.980.000,00	208.676.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.494.343.675,00	1.502.676.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	411.027.744,85
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	7.690.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.088.933,00	1.418.478.270,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>4.135.366.500,00</b>	<b>3.729.315.876,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.101.429.500,00	2.089.534.626,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	688.364.000,00	1.225.237.750,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	35.000.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	19.448.000,00	19.850.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	156.600.000,00	92.063.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	169.525.000,00	267.630.500,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>3.483.943.115,00</b>	<b>2.552.399.726,00</b>
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	166.750.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	250.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.626.981.115,00	2.385.399.726,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	856.962.000,00	0,00
<b>Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>12.741.149.852,00</b>	<b>11.824.141.617,00</b>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.741.149.852,00	11.824.141.617,00
<b>Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>104.932.016.842,75</b>	<b>94.228.055.870,07</b>
Jasa Giro	1.791.092.003,99	1.367.792.747,67
Pendapatan Bunga	2.244.946.521,53	2.722.228.822,26
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.817.049.169,51	5.898.433.802,50
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	758.893.603,44	1.826.464.667,86
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	268.527.214,34
Pendapatan Denda Pajak Daerah	795.163.493,55	849.246.680,54
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	55.276.447,00
Pendapatan dari Pengembalian	906.228.284,37	330.683.550,00
Pendapatan BLUD	96.618.643.766,36	69.367.346.118,63
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	11.542.055.819,27
<b>Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.165.107.290.050,00</b>	<b>1.853.774.800.135,00</b>
Dana Perimbangan	1.956.376.802.050,00	1.681.147.943.135,00
Dana Desa	185.021.712.000,00	166.892.819.000,00
Insentif Fiskal	23.708.776.000,00	5.734.038.000,00
<b>Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>124.177.070.916,00</b>	<b>119.201.281.956,00</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>124.177.070.916,00</b>	<b>115.616.707.956,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.253.972.468,00	18.418.274.550,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.805.188.548,00	20.479.859.200,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.146.940.872,00	33.753.178.884,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	85.826.522,00	88.500.318,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	44.885.142.506,00	42.876.895.004,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.574.000,00</b>
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.584.574.000,00
<b>Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>109.315.906.788,00</b>	<b>31.210.802.114,00</b>



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Penerimaan Hibah</b>	<b>266.910.500,00</b>	<b>700.863.693,00</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	53.025.943,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	266.910.500,00	647.837.750,00
<b>Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>109.048.996.288,00</b>	<b>30.509.938.421,00</b>
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	34.759.393.827,00	30.509.938.421,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	74.289.602.461,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.729.660.115.585,25</b>	<b>2.278.299.769.297,99</b>

### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

**Tabel 231 . Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pembayaran Belanja Pegawai</b>	<b>1.156.476.918.161,76</b>	<b>1.028.819.909.685,20</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	734.793.209.114,00	658.857.933.039,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.907.215.219,00	104.739.028.587,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	244.890.528.535,56	187.001.713.748,80
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.759.407.930,00	23.925.039.130,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.309.702,00	168.910.972,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	791.000.000,00	852.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	18.502.092.200,00
Belanja Pegawai BLUD	39.167.247.661,20	34.773.192.008,40
<b>Pembayaran Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>715.146.946.996,56</b>	<b>560.356.950.091,03</b>
Belanja Barang	319.198.797.580,50	264.532.444.185,00
Belanja Jasa	197.200.408.855,64	150.003.516.279,00
Belanja Pemeliharaan	5.067.068.633,83	6.240.869.830,00
Belanja Perjalanan Dinas	29.717.328.031,00	21.267.079.884,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.260.797.478,00	6.102.097.240,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP/BOS	78.134.638.811,72	62.015.292.686,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.567.907.605,87	50.195.649.987,03
<b>Pembayaran Belanja Bunga</b>	<b>11.302.707.488,00</b>	<b>12.111.886.019,00</b>
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	11.302.707.488,00	12.111.886.019,00
<b>Pembayaran Belanja Hibah</b>	<b>95.072.375.022,00</b>	<b>81.628.294.002,00</b>
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.476.375.550,00	18.984.250.366,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.005.892.500,00	61.746.955.340,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	904.086.372,00	897.088.296,00
Belanja Hibah Dana BOSP	49.686.020.600,00	0,00
<b>Pembayaran Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>540.000.000,00</b>
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	540.000.000,00	540.000.000,00
<b>Pembayaran Belanja Tak Terduga</b>	<b>8.838.353.947,00</b>	<b>14.359.344.815,00</b>
Belanja Tak Terduga	8.838.353.947,00	14.359.344.815,00
<b>Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil</b>	<b>20.838.360.124,00</b>	<b>12.045.737.949,00</b>



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	18.146.089.922,00	10.590.662.789,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.692.270.202,00	1.455.075.160,00
<b>Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>325.459.672.460,00</b>	<b>315.216.275.906,00</b>
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	325.459.672.460,00	315.216.275.906,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.333.675.334.199,32</b>	<b>2.025.078.398.467,23</b>

### 5.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 232. Aktivitas Investasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	283.920.793.925,66	236.112.590.581,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(283.920.793.925,66)</b>	<b>(236.112.590.581,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

#### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2024 tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

#### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

**Tabel 233. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Perolehan Peralatan dan Mesin</b>	<b>91.727.573.671,12</b>	<b>80.516.876.650,00</b>
Belanja Modal Alat Besar	5.927.141.139,00	6.587.824.090,00
Belanja Modal Alat Angkutan	9.264.109.000,00	8.183.436.457,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.780.000,00	1.695.465.939,00
Belanja Modal Alat Pertanian	25.815.000,00	2.988.220.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.380.373.626,00	3.457.686.120,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	871.162.505,00	927.631.656,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.304.161.241,00	37.437.074.203,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	20.449.453.613,00	22.349.800,00
Belanja Modal Komputer	9.616.296.715,00	3.341.434.308,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	95.741.640,00	21.751.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.600.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	1.137.000.000,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	101.597.218,12	91.410.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	4.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP/BOS	14.349.693.120,00	14.139.914.167,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.140.648.854,00	1.618.678.710,00
<b>Perolehan Gedung dan Bangunan</b>	<b>142.704.330.558,54</b>	<b>104.743.919.626,00</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung	141.955.915.438,59	104.626.634.126,00



Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	447.972.931,95	99.091.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.442.188,00	18.193.900,00
<b>Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>38.965.281.078,00</b>	<b>41.496.385.300,00</b>
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	20.547.605.759,00	39.055.942.850,00
Belanja Modal Bangunan Air	12.609.332.740,00	205.617.000,00
Belanja Modal Instalasi	5.596.453.900,00	1.615.950.450,00
Belanja Modal Jaringan	211.888.679,00	618.875.000,00
<b>Perolehan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>10.513.658.618,00</b>	<b>9.355.409.005,00</b>
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	74.944.600,00	124.975.438,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	374.466.000,00	5.214.596,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	0,00	34.031.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP/BOS	10.064.248.018,00	9.191.187.771,00
<b>Perolehan Aset Lainnya</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	9.950.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>283.920.793.925,66</b>	<b>236.112.590.581,00</b>

### 5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

Tabel 234. Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.979.917.300,00	23.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	20.787.131.560,00	19.901.253.226,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(15.807.214.260,00)</b>	<b>(19.878.253.226,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

#### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 235. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	4.950.317.300,00	0,00
<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	29.600.000,00	23.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.979.917.300,00</b>	<b>23.000.000,00</b>

#### 5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

**Tabel 236. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>		
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	20.787.131.560,00	19.901.253.226,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.787.131.560,00</b>	<b>19.901.253.226,00</b>

#### 5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2024 dan tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 237. Aktivitas Transitoris**

	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	292.455.063.321,54	266.229.333.029,62
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	292.246.310.306,28	266.257.638.629,06
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>208.753.015,26</b>	<b>(28.305.599,44)</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

##### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

**Tabel 238. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>136.771.898.553,00</b>	<b>112.845.047.640,00</b>
luran Wajib Pegawai	42.245.545.603,00	37.933.416.553,00
Pajak Penghasilan	94.526.352.950,00	74.911.631.087,00
<b>Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran</b>	<b>155.305.693.569,20</b>	<b>153.145.258.092,80</b>
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	155.305.693.569,20	153.145.258.092,80
<b>Kiriman Uang Masuk</b>	<b>377.471.199,34</b>	<b>239.027.296,82</b>
Kiriman Uang Masuk	377.471.199,34	239.027.296,82
<b>Jumlah</b>	<b>292.455.063.321,54</b>	<b>266.229.333.029,62</b>

Untuk Tahun 2024, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD pada RSUD maupun pada Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran terdiri dari total SPJ UP/GU/TU selama tahun 2024, total STS pengembalian UP/GU/TU tahun berjalan, dan pengembalian UP/GU/TU tahun 2023.

Kiriman Uang Masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp377.471.199,34 terdiri dari sisa kas Bendahara penerimaan tahun 2023 sebesar Rp271.718.835,30 pengembalian sisa kas sekolah yang ditutup dan merger sebesar Rp105.388.595,28 dan sisa Kas Lainnya tahun 2023 atas Jasa Giro beberapa Kelurahan yang masih berada di Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp363.768,76.

##### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

**Tabel 239. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<b>136.771.898.553,00</b>	<b>112.845.047.640,00</b>
luran Wajib Pegawai	42.245.545.603,00	37.933.416.553,00
Pajak Penghasilan	94.526.352.950,00	74.911.631.087,00
<b>Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran</b>	<b>155.293.023.158,00</b>	<b>153.140.508.385,00</b>
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	155.293.023.158,00	153.140.508.385,00
<b>Kiriman Uang Keluar</b>	<b>181.388.595,28</b>	<b>272.082.604,06</b>
Kiriman Uang Keluar	181.388.595,28	272.082.604,06
<b>Jumlah</b>	<b>292.246.310.306,28</b>	<b>266.257.638.629,06</b>

Untuk tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD pada RSUD maupun Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran merupakan Jumlah SP2D UP/GU tahun 2024 sebesar Rp155.293.023.158,00, sedangkan Kirim Uang Keluar pada aktivitas transitoris sebesar Rp181.388.595,28 terdiri dari Uang Jaminan Pasar Jelajok dan Pasar Renteng sebesar Rp76.000.000,00, pengembalian sisa kas sekolah yang ditutup dan merger sebesar Rp105.388.595,28.

#### 5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 240. Kenaikan/(Penurunan) Kas**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	395.984.781.385,93	253.221.370.830,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(283.920.793.925,66)	(236.112.590.581,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(15.807.214.260,00)	(19.878.253.226,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	208.753.015,26	(28.305.599,44)
<b>Jumlah</b>	<b>96.465.526.215,53</b>	<b>(2.797.778.575,68)</b>

#### 5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas tahun 2024 dan tahun 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 241. Saldo Awal Kas**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	22.555.286.973,55	25.655.073.633,32
Kas di BLUD	4.652.784.282,97	10.349.096.950,50
Kas Dana BOSP/BOS	647.168.714,71	688.227.475,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	11.020.654.257,00	4.981.249.745,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.875.894.228,23</b>	<b>41.673.647.804,53</b>

#### 5.5.7 Kas Lainnya Di Bendahara (Selain BUD)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) tahun 2024 dan tahun 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 242. Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya	742.851.465,77	0
<b>Jumlah</b>	<b>742.851.465,77</b>	<b>0</b>

Kas lainnya merupakan Utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp52.423.942,77, Dinas Kesehatan sebesar Rp13.180.433,00, dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp677.247.090,00.

### 5.5.8 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada tahun 2024 dan tahun 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 243. Koreksi SiLPA Tahun Lalu**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
koreksi saldo awal pada Kas Daerah-Bank Mandiri yang disebabkan BUD mengakui biaya administrasi bank senilai Rp25.000 dan Lebih saji senilai Rp0,62 akibat selisih pembulatan ke atas	0	24.999,38
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>24.999,38</b>

Tahun 2024 tidak terdapat koreksi SiLPA.

### 5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas tahun 2024 dan tahun 2023 yang terdiri dari:

**Tabel 244. Saldo Akhir Kas**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	0,00
Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97
Kas Dana BOS	0,00	647.168.714,71
Kas Dana Kapitasi di FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
Kas Dana BOSP	644.439.673,71	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	742.851.465,77	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>136.084.271.909,53</b>	<b>38.875.894.228,23</b>

Saldo Akhir Kas sebesar Rp.136.084.271.909,53 telah memperhitungkan saldo Kas Lainnya sebesar Rp742.851.465,77, sehingga Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas sama dengan Kas dan Setara Kas di Neraca per 31 desember 2024.

Di dalam Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4** di atas.

## 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 245. Ekuitas Awal-LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	3.816.068.873.789,83	3.538.683.561.951,74

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

### 5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 246. Surplus/(Defisit)-LO**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit)-LO	96.972.334.622,31	63.601.908.636,25

Pada Tahun 2024 dan Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

**Tabel 247. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	2.000.000,00	(360.830.712,55)
Koreksi Ekuitas atas Investasi Jangka Panjang	142.742.206,00	(123.453.729,00)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	10.281.812.861,77	213.671.943.780,02
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(51.437.139,93)	(141.090.049,13)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek	5.494.772.992,00	736.833.912,50
<b>Jumlah Dampak Kumulatif</b>	<b>15.869.890.919,84</b>	<b>213.783.403.201,84</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban di antaranya yaitu:

#### 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar

Koreksi Ekuitas Aset Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Jumlah Rp2.000.000,00 sebagai kurang saji dengan rincian dan Penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 248. Rincian Koreksi Ekuitas Piutang**

Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	24.999,38
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi	0,00	(38.963.000,00)
Koreksi Ekuitas Piutang Lain Lain PAD yg sah	2.000.000,00	(321.892.711,92)
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(360.830.712,54)</b>

Koreksi-koreksi tersebut pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi kurang saji piutang sebesar Rp2.000.000,00 adalah piutang yang bersumber dari pendapatan kerjasama pemanfaatan aset daerah berupa sewa bangunan oleh Koperasi Karyawan RSUD Praya, dimana sesuai dengan kesepakatan sewa, bahwa nilai sewa adalah sebesar Rp4.000.000,00 per tahun. Namun pada laporan keuangan tahun 2023, PPK SKPD RSUD Praya menyajikan hanya sebesar Rp2.000.000,00 sehingga pada laporan keuangan Tahun 2024 dilakukan koreksi kurang saji sebesar Rp2.000.000,00.

#### 5.6.3.2 Koreksi Ekuitas atas Investasi Jangka Panjang

Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp142.742.206,00 dan Rp123.453.729,00 sebagai kurang saji. Koreksi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 249. Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang**

No	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
1	Pengalihan Laba Tahun sebelumnya	0,00	(123.433.505,00)
2	Akumulasi Kerugian PDAM 2020	0,00	0,00
3	Koreksi laba ditahan-PDAM	142.742.206,00	(20.224,00)
4	Laba	0,00	0,00
5	Penyertaan Modal dari Hibah pemus-PDAM	0,00	0,00
6	Penyesuaian nilai Ekuitas BPR	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>142.742.206,00</b>	<b>(123.453.729,00)</b>

Koreksi Ekuitas Nilai Investasi sebesar Rp142.742.206,00 merupakan koreksi laba ditahan-PDAM. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai investasi pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas, dimana penambahan maupun pengurangan nilai Investasi tergantung pada nilai ekuitas akhir perusahaan.

#### 5.6.3.3 Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp10.281.812.861,77 dan Rp213.671.943.780,02. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

**Tabel 250. Koreksi Ekuitas Aset Tetap**

No	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
<b>A</b>	<b>Koreksi Nilai Aset Tetap</b>	<b>10.281.812.861,77</b>	<b>188.310.296.582,32</b>
1	Tanah	5.168.222.331,00	159.076.501.272,00
2	Peralatan dan Mesin	297.480,00	(3,67)
3	Gedung dan Bangunan	5.113.293.050,78	29.225.028.303,99
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0,01)	8.767.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	10,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap</b>	<b>0,00</b>	<b>25.361.647.197,70</b>
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	188.332,95
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	(1,00)
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	25.361.458.865,75
<b>Jumlah</b>		<b>10.281.812.861,77</b>	<b>213.671.943.780,02</b>

Penjelasan dari masing-masing Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai berikut.

**a. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah**

Koreksi Ekuitas Tanah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 Rp5.168.222.331,00. Koreksi ini merupakan koreksi kurang saji atas penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil *appraisal* dari Tim Penilaian Aset yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tanggal 9 September 2024. Rincian koreksi kurang saji aset tetap tanah per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 251. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah**

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.272.605.000,00
2	Dinas Kesehatan	55.400.000,00
3	Dinas PUPR	268.500.000,00
4	Sekretariat Daerah	1.514.517.331,00
5	Kantor Camat Praya	57.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.168.222.331,00</b>

**b. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Koreksi Ekuitas Tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp297.480,00. Koreksi ini merupakan koreksi kurang saji atas penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil dari Tim Penilaian Aset yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tanggal 9 September 2024. Rincian koreksi kurang saji aset tetap Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 252. Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	260.000,00
2	Dinas Kesehatan	37.480,00
<b>Jumlah</b>		<b>297.480,00</b>

**c. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Koreksi Ekuitas Tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp5.113.293.050,78. Koreksi ini merupakan koreksi kurang saji atas penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil dari Tim Penilaian Aset yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tanggal 9 September 2024 sebesar Rp5.113.293.051,00. Selain itu, terdapat lebih saji senilai Rp0,39 dan kurang saji senilai

Rp0,17 akibat dari hasil pembulatan nilai di SIMDA BMD. Rincian koreksi kurang saji dan lebih saji aset tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 253. Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.113.293.051,00	Koreksi Kurang saji disebabkan adanya penambahan nilai Aset Tetap yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil dari Tim Penilaian Aset.
2	RSUD Praya	(0,39)	Koreksi Lebih saji dikarenakan adanya penyesuaian hasil pembulatan nilai di Simda BMD.
3	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,17	Koreksi kurang saji dikarenakan adanya penyesuaian hasil pembulatan nilai di Simda BMD.
<b>Jumlah</b>		<b>5.113.293.050,78</b>	

**d. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Koreksi Ekuitas Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,01. Koreksi ini merupakan koreksi lebih saji pada dinas PUPR akibat dari pembulatan nilai di SIMDA BMD.

**5.6.3.4 Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lainnya**

Koreksi Ekuitas Atas Perubahan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp51.437.139,93. Koreksi ini merupakan koreksi lebih saji nilai TGR yang telah ditindaklanjuti namun belum dicatat sebagai pengurang nilai TGR di tahun sebelumnya.

**5.6.3.5 Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek**

Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp5.494.772.992,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 254. Rincian Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek**

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	RSUD Praya	5.494.775.000,00	Koreksi Ekuitas- Lebih Saji Kewajiban/Utang Belanja Barang Pakai Habis Obat-Obatan-Obat-obatan Lainnya dikarenakan RSUD Praya memandang Transaksi yang menyebabkan timbulnya Kewajiban tersebut adalah transaksi Resiprokal, yaitu antara RSUD Praya dengan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan yang sekarang berganti nama menjadi UPT. Labkes Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
2	Dinas Permukiman	(2.008,00)	Dikarenakan adanya kurang saji utang belanja pegawai Tahun 2023.
<b>Jumlah</b>		<b>5.494.772.992,00</b>	

**5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir**

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023.

**Tabel 233 Rincian Ekuitas Akhir**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Saldo Ekuitas Akhir</b>	<b>3.928.911.099.331,98</b>	<b>3.816.068.873.789,83</b>

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point* 5.3.3.